

Dr. H. Ahmad Sampurna, S.Sos.I., MA.

litrus.



KOMUNIKASI BIROKRASI

Telaah dan Riset Kebijakan Publik

Pengantar:

Prof. Dr. Hasan Sazali, M.Ag.

Guru Besar Ilmu Komunikasi UIN Sumatera Utara

Editor:

Dr. Anang Anas Azhar, MA

Mujhirul Iman, M.Pd

Dr. H. Ahmad Sampurna, S.Sos.I., MA.

KOMUNIKASI **BIROKRASI**

Telaah dan Riset Kebijakan Publik

Editor:

Dr. Anang Anas Azhar, MA.
Mujhirul Iman, M.Pd.

 Penerbit
litrus.

KOMUNIKASI BIROKRASI
Telaah dan Riset Kebijakan Publik

Ditulis oleh:

Dr. H. Ahmad Sampurna, S.Sos.I., MA.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Agustus 2024

Editor:

Dr. Anang Anas Azhar, MA.
Mujhirul Iman, M.Pd.

Perancang sampul: An Nuha Zarkasyi
Penata letak: Bagus Aji Saputra

ISBN : 978-623-519-126-3

xvi + 166 hlm. ; 15,5x23 cm.

©Agustus 2024

PRAKATA



Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, saya merasa sangat bahagia dapat mempersembahkan karya ini, “KOMUNIKASI BIROKRASI: Telaah dan Riset Kebijakan Publik”, kepada para pembaca yang budiman. Buku ini lahir dari dorongan untuk memahami dan mengeksplorasi lebih dalam mengenai peran komunikasi dalam birokrasi serta bagaimana kebijakan publik dirancang, disosialisasikan, dan diimplementasikan di berbagai tingkatan pemerintahan.

Komunikasi birokrasi adalah sebuah bidang yang kompleks namun sangat penting dalam menentukan efektivitas pemerintahan. Birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini termasuk bagaimana kebijakan publik dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat, disampaikan dengan jelas kepada publik, dan dievaluasi secara terus-menerus untuk memastikan relevansinya.

Komunikasi Birokrasi bukan hanya sekadar penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak lain, tetapi juga mencakup aspek-aspek strategis yang dapat menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan. Buku ini menyajikan analisis mendalam mengenai teori dan praktik komunikasi dalam birokrasi, yang disertai dengan studi kasus dan riset terkini

Dalam menyusun buku ini, saya melakukan penelitian mendalam yang melibatkan berbagai sumber literatur, studi kasus kebijakan publik dan komunikasi birokrasi. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang komprehensif dan praktis mengenai bagaimana komunikasi yang efektif dapat meningkatkan kinerja birokrasi dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Buku ini terdiri dari beberapa bab yang disusun secara sistematis. Setiap bab membahas aspek-aspek penting dari komunikasi birokrasi, mulai dari teori dasar hingga penerapan praktis dalam berbagai situasi. Saya berharap, dengan pendekatan ini, pembaca dapat memahami konsep-konsep yang disajikan secara menyeluruh dan mampu menerapkannya dalam konteks nyata.

Saya menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari para pembaca sangat saya harapkan untuk penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan buku ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ucapan terima kasih khusus saya sampaikan kepada keluarga saya yang selalu memberikan dukungan moral dan materiil selama proses penulisan ini. Juga kepada rekan-rekan sejawat di lingkungan akademis yang telah memberikan masukan berharga, serta kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian dan penyusunan buku ini.

Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada penerbit yang telah bersedia menerbitkan buku ini dan mendistribusikannya ke seluruh penjuru tanah air. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi para pembaca, baik itu mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun para pengambil kebijakan di berbagai level pemerintahan.

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi pembaca dalam memahami pentingnya komunikasi birokrasi dan bagaimana kebijakan publik dapat dikelola dengan lebih baik melalui komunikasi yang efektif. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam setiap langkah kita.

Selamat membaca.

Medan, Agustus 2024

Dr. H. Ahmad Sampurna, S.Sos.I, M.A.

KATA SAMBUTAN

Pj. Bupati Batubara



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua. Dengan penuh rasa syukur dan bangga, saya menyampaikan kata sambutan ini dalam rangka terbitnya buku “Komunikasi Birokrasi: Telaah dan Riset Kebijakan Publik”. Buku ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi dari penulis yang telah memberikan kontribusi penting dalam dunia akademik dan praktik pemerintahan.

Buku ini hadir di saat yang tepat, di mana kebutuhan akan komunikasi yang efektif dalam birokrasi semakin penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, birokrasi dituntut untuk lebih responsif, transparan, dan akuntabel. Komunikasi yang baik menjadi kunci utama dalam membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kinerja pemerintahan.

Sebagai Pj. Bupati Batubara, saya sangat mendukung upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas komunikasi dalam birokrasi. Kabupaten Batubara terus berupaya melakukan berbagai inovasi dalam pelayanan publik, dan buku ini memberikan panduan serta wawasan yang sangat berharga untuk memperkuat langkah-langkah tersebut. Saya yakin, dengan pemahaman yang mendalam tentang komunikasi birokrasi, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih harmonis dan efektif.

Saya juga mengapresiasi upaya para penulis yang telah melakukan riset mendalam dalam penyusunan buku ini. Riset kebijakan publik yang

dilakukan menjadi landasan penting dalam pembuatan keputusan yang lebih bijaksana dan tepat sasaran. Melalui penelitian yang komprehensif, kita dapat mengidentifikasi berbagai tantangan dan peluang dalam komunikasi birokrasi, serta merumuskan strategi yang lebih baik untuk menghadapinya.

Peran komunikasi dalam birokrasi tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga melibatkan interaksi yang konstruktif antara berbagai pemangku kepentingan. Buku ini mengajak kita untuk memahami pentingnya komunikasi yang terbuka dan partisipatif, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang kita junjung tinggi.

Saya berharap, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para aparatur sipil negara, akademisi, serta praktisi kebijakan publik. Pengetahuan yang disajikan dalam buku ini diharapkan dapat menginspirasi kita semua untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas komunikasi dalam setiap aspek pemerintahan. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap perubahan zaman.

Selain itu, saya juga ingin menggarisbawahi pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak dalam meningkatkan kualitas komunikasi birokrasi. Pemerintah, akademisi, dan masyarakat harus bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog yang konstruktif. Melalui kolaborasi yang baik, kita dapat mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik dan merata.

Kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam penyusunan buku ini, saya sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga upaya ini menjadi amal jariyah yang membawa manfaat bagi kita semua, serta menjadi inspirasi untuk terus berkarya dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat atas peluncuran buku “Komunikasi Birokrasi: Telaah dan Riset Kebijakan Publik”. Semoga

buku ini dapat memberikan manfaat yang besar dan menjadi sumbangsih berharga dalam upaya meningkatkan kualitas birokrasi di Indonesia.

Lima Puluh, Agustus 2024

Pj. Bupati Batu Bara

H. Heri Wahyudi Marpaung, S.STP., M.AP.



KATA SAMBUTAN

Bupati Labuhanbatu Utara



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga buku “Komunikasi Birokrasi: Telaah dan Riset Kebijakan Publik” dapat kita pegang saat ini. Buku ini diharapkan menjadi rujukan penting bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi di bidang komunikasi dan kebijakan publik.

Komunikasi birokrasi memegang peranan vital dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang dirancang dengan matang tidak akan dapat diimplementasikan secara optimal. Oleh karena itu, buku ini hadir sebagai upaya untuk menjawab tantangan dalam komunikasi birokrasi yang sering kali menjadi hambatan dalam penerapan kebijakan publik.

Saya menyambut baik inisiatif penulisan buku ini, yang tentunya akan memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu komunikasi birokrasi. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi para pejabat dan staf birokrasi dalam meningkatkan kemampuan komunikasi mereka, sehingga dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam buku ini, berbagai aspek komunikasi birokrasi dibahas secara komprehensif, mulai dari teori dasar hingga aplikasi praktis. Penulis juga menyertakan berbagai studi kasus dan hasil riset kebijakan publik yang relevan, yang dapat menjadi pembelajaran berharga bagi kita semua. Hal

ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman yang mendalam tentang komunikasi birokrasi dalam konteks pemerintahan.

Sebagai Bupati Labuhan Batu Utara, saya melihat langsung bagaimana pentingnya komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dan masyarakat. Dengan komunikasi yang baik, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dan merumuskan kebijakan yang tepat sasaran. Buku ini, saya yakin, akan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua untuk terus memperbaiki komunikasi birokrasi di daerah kita.

Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para penulis, editor, dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan buku ini. Kerja keras dan dedikasi kalian sangat berarti bagi peningkatan kualitas komunikasi birokrasi di Indonesia. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak dan menjadi acuan dalam berbagai penelitian dan praktik kebijakan publik di masa depan.

Harapan saya, buku ini tidak hanya menjadi bacaan akademis semata, tetapi juga dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari pemerintahan. Melalui peningkatan komunikasi birokrasi, kita dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan efisien, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Mari kita jadikan buku ini sebagai salah satu langkah konkret dalam upaya kita memperbaiki sistem komunikasi birokrasi. Dengan demikian, kita dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkualitas di Labuhan Batu Utara, serta di seluruh Indonesia.

Akhir kata, saya mengucapkan selamat kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penerbitan buku ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap langkah kita. Terima kasih.

Aek Kanopan, Agustus 2024

Bupati Labuhanbatu Utara



Hendri Yanto Sitorus, S.E., M.M.



KATA SAMBUTAN

Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK)
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan

Meskipun perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi sudah demikian pesatnya, tetapi agaknya budaya menulis tetap perlu dilestarikan. Dalam banyak hal memang budaya menulis beralih dari *printed* ke digital (ditulis secara *online*). Tetapi dalam hal menuliskan hasil pikiran, opini, imajinasi dan kerja akal/otak lainnya tak dapat disangkal masih sangat diperlukan.

Dalam tradisi intelektual Islam kita mengenal sangat kental dengan kegiatan menulis. Sejak awal turunnya Alquran, Nabi Muhammad SAW, sudah memerintahkan Zaid bin Tsabit untuk menulisnya. Dalam Alquran, khususnya pada surat Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT, memerintahkan umat Islam untuk menulis perjanjian atau transaksi (*bi dainin faktubuh*).

Dalam konteks inilah, patut untuk kita pahami bahwa Allah SWT melalui wahyu-Nya Alquran maupun Nabi telah meletakkan dasar budaya tulis di kalangan umat Islam. Budaya inilah yang kemudian dijiwai oleh para sarjana/ulama sepanjang sejarah Islam—terutama pada zaman keemasan Islam (*The Golden Age of Islam*)—mereka telah menulis buku dalam berbagai bidang keilmuan, dan buku-buku tersebut masih dapat kita baca hingga saat ini. Melalui tulisan atau buku, ilmu diwariskan dari generasi ke generasi.

Patut dicatat bahwa salah satu kelemahan sarjana Islam dewasa ini dalam hal budaya menulis. Kesan yang muncul, budaya lisan demikian kuatnya di tengah-tengah masyarakat, sementara untuk menuliskannya

tidak serta-merta dapat dilakukan. Untuk menggugah kembali spirit atau semangat menulis, perlu ditanamkan keyakinan bahwa menulis termasuk amal saleh yang dapat mengantarkannya masuk surga (*'ilmu yuntafa'u bih*).

Dosen sebagai ilmuwan diharapkan menganut falsafah kelapa, bukan falsafah pisang. Kelapa terus menerus berbuah, sedangkan pisang hanya sekali berbuah, lalu mati. Sebahagian kaum terpelajar dan civitas akademika, khususnya dosen lebih dekat dengan falsafah pisang, hanya sekali berbuah. Mereka hanya menulis skripsi (S1), tesis (S2) dan disertasi (S3), kemudian tidak pernah muncul karya tulisnya yang monumental. Selain itu, konsumtivitas dalam ranah ilmuwan tentu kurang relevan, di mana hanya mampu membaca karya orang lain, tidak produktif dengan melahirkan gagasan dan ide-ide segar untuk pemecahan masalah sosial dan keumatan. Padahal ide-ide kreatif yang dituliskan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, kini dan ke depan.

Untuk mengatasi hal di atas, maka Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2015 yang lalu, yang terus berlanjut hingga sekarang tahun 2024 ini, menetapkan/melestarikan program penerbitan buku. Tujuannya untuk mendorong para dosen agar lebih kreatif dalam menulis, khususnya yang berkaitan dengan mata kuliah yang diampunya. Bagaimanapun, berdasarkan regulasi yang ada bagi dosen khususnya, mulai dari level fungsional paling rendah Asisten Ahli hingga ke level fungsional paling tinggi Guru Besar (Profesor), diwajibkan menyebarkan gagasannya, yang salah satu caranya dengan menulis buku.

Pimpinan fakultas terus mendorong dan memfasilitasi para dosen untuk menerbitkan karya ilmiahnya menjadi buku, baik tulisan yang berasal dari diktat, tesis maupun disertasi, selain naskah orisinal dari hasil kajian dan penelitian. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas dosen sebagai ilmuwan.

Buku Komunikasi Birokrasi : Telaah dan Riset Kebijakan Publik yang berada di tangan Anda ini, menjadi bukti bahwa dosen dan mahasiswa harus terus berkarya untuk meneruskan tradisi menulis. Buku ini juga merupakan salah satu buku yang direkomendasikan FDK UINSU dibaca

kalangan masyarakat luas, khususnya mahasiswa, dosen dan praktisi. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih kepada penulis, semoga buku monumental ini bermanfaat dan menambah wawasan bagi para pembacanya.

Medan, 1 Agustus 2024



Prof. Dr. H. Hasan Sazali, M.Ag.

DAFTAR ISI



Prakata	iii
Kata Sambutan Pj. Bupati Batubara	v
Kata Sambutan Bupati Labuhanbatu Utara.....	ix
Kata Sambutan Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi (FDK) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.....	xi
Daftar Isi.....	xv

BAGIAN I

Pengantar Komunikasi Birokrasi	1
--------------------------------------	---

BAGIAN II

Dasar-Dasar Kebijakan Komunikasi	7
Pengertian Kebijakan Komunikasi	7
Tujuan Kebijakan Komunikasi	14
Proses Kebijakan Publik	18

BAGIAN III

Implementasi Kebijakan Komunikasi	21
Prinsip-Prinsip Kebijakan Komunikasi	21
Komponen-Komponen Kebijakan Komunikasi	24
Hambatan Kebijakan Komunikasi.....	33

BAGIAN IV

Komunikasi Islam	43
Etika Komunikasi Islam	43
Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam	45
Tafsir Al-Qur'an dalam Komunikasi Islam.....	48

BAGIAN V

Inovasi Kebijakan Publik	53
Kebijakan Inovasi Publik.....	53
Model Proses Keputusan Inovasi	56
Upaya Meminimalisir Disonansi	60

BAGIAN VI

Komunikasi Organisasi	63
Komunikasi Organisasi	63
Gaya Kepemimpinan	67
Iklim Organisasi	70
Komunikasi Vertikal	75
Komunikasi Horizontal	80

BAGIAN VII

Telaah Komunikasi Kebijakan Publik	83
Sasaran Daerah Birokrasi.....	90
Pendukung dan Penghambat Kebijakan Publik	104
Model Komunikasi Birokrasi.....	110
Implementasi Komunikasi Birokrasi	124

BAGIAN VIII

Konklusi Kajian Komunikasi Birokrasi	147
Daftar Pustaka	149
Tentang Penulis	157
Tentang Editor	161



BAGIAN I

PENGANTAR KOMUNIKASI BIROKRASI

Kebijakan komunikasi muncul setelah adanya sistem komunikasi yang berlaku pada semua pemerintahan. Setiap pemerintahan mempunyai, dan sedang membentuk, pola komunikasi yang membentuk sistem. Sistem yang terdiri dari subsistem menjalankan fungsinya masing-masing, dan subsistem ini memerlukan regulasi agar dapat berfungsi tanpa bertentangan satu sama lain.

Menurut Abrar (2008:12) Kebijakan komunikasi adalah studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang berkaitan dengan masalah komunikasi. Penelitian kebijakan komunikasi bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menganalisis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan komunikasi dan menarik kesimpulan tentang keberadaan kebijakan tersebut. Kebijakan komunikasi oleh Mc Braid (dalam Cangara 2013) menetapkan sistem komunikasi untuk menyediakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengoordinasikan kegiatan, mempertimbangkan kemungkinan alokasi sumber daya, memilih pendekatan, dan menggunakan prinsip, aturan, atau pedoman. Ini digunakan dalam pengambilan keputusan struktural mengenai kegiatan komunikasi dan dalam upaya untuk mengkompensasi ketidakseimbangan antara faktor eksternal dan internal dan menentukan prioritas.

Kebijakan bersifat *problem solving* dan proaktif, beda dengan peraturan (*regulation*) dan hukum (*law*) serta kebijakan bisa lebih adaptif dan interpretatif, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh. Kebijakan tersebut harus bersifat umum, tanpa mengesampingkan karakteristik lokal

tertentu. Oleh karena itu, kebijakan dapat memberikan peluang untuk ditafsirkan sesuai dengan keadaan yang ada.

Asumsi tentang politik mendapat tempat khusus dalam model rasional karena elemennya relatif tahan terhadap uji konsistensi. Jadi dapat bisa berbicara tentang kebijakan luar negeri, kebijakan sosial, kebijakan pemasaran, kebijakan pendidikan dan lain-lain. Istilah ini sepertinya menyiratkan kebijakan regional dengan tema universal, suatu metode memanipulasi lingkungan eksternal organisasi dan menggunakan tindakan spesifik dan tertarget (Arwildayanto et al., 2018).

Pemerintah sebagai pemegang otoritas dan penyelenggara pelayanan publik memiliki tanggung jawab untuk terus berinovasi dalam pembuatan kebijakan. Kebijakan yang inovatif adalah langkah penting dalam menjawab tantangan-tantangan zaman yang terus berkembang, serta untuk menciptakan solusi-solusi baru yang lebih efektif dan efisien dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Edquist (2005), jawaban terkait kebijakan inovasi mungkin berbeda jika kebijakan inovasi dipandang sebagai kebijakan yang mempunyai dampak penting terhadap inovasi. Meskipun istilah inovasi lebih sering digunakan saat ini dibandingkan beberapa dekade yang lalu, inovasi merupakan fenomena yang telah ada sejak zaman umat manusia. Dari perspektif ini, kebijakan inovasi yaitu kebijakan yang mempengaruhi inovasi mungkin sudah ada selama berabad-abad. Kebijakan yang inovatif adalah langkah penting dalam memenuhi tuntutan zaman yang terus berubah dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas terhadap masyarakat. Dengan memperkuat budaya inovasi, menggali berbagai sumber ide, dan melakukan evaluasi yang cermat, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berdampak positif bagi masyarakat.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah harus tersosialisasikan dengan baik dalam implementasi kebijakan, mau di tingkat pusat maupun daerah (Akib, 2012). Hal ini harus memastikan bahwa kebijakan tidak menimbulkan multitafsir dan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan

yang berlaku (Syaripudin dkk, 2020). Selanjutnya, jika kebijakan tersebut masih dianggap baru dan masyarakat belum terbiasa, maka diperlukan model komunikasi yang tepat untuk membantu masyarakat melaksanakan kebijakan tersebut sebagai bagian dari implementasinya (Pratamawaty et al., 2019). Pendapat lainnya mengacu kepada pentingnya komunikasi internal di dalam satu organisasi menjadikan kebijakan komunikasi sangat dibutuhkan. Disebutkan bahwa komunikasi dalam suatu organisasi memberikan pemahaman mendasar tentang bagaimana suatu organisasi berkomunikasi dengan cara mengirimkan dan menerima pesan, dengan melibatkan unsur-unsur yang berkomunikasi dalam organisasi: manajer, tim kerja, dan bawahan (Purnomo, 2018).

Selain kebijakan komunikasi internal, Mengelola suatu organisasi juga memerlukan tindakan kepemimpinan untuk menetapkan pedoman komunikasi dengan pihak-pihak di luar atau di luar organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan komunikasi yang aktif antara dua atau lebih organisasi yang berkomunikasi. Salah satu bentuk komunikasi eksternal suatu organisasi adalah komunikasi berbagai bentuk kepentingan dan kebutuhan suatu organisasi dengan organisasi lain. Pada dasarnya, organisasi secara aktif berkomunikasi dengan organisasi lain untuk bertukar informasi, menjalin hubungan kerja sama, dan melakukan dialog untuk memecahkan masalah bersama (Purnomo, 2018).

Pemerintah berperan memfasilitasi dialog antar berbagai instansi pemerintah yang terlibat dalam penyediaan pelayanan publik. Kepentingan masyarakat adalah mengetahui apa yang diinginkan, dilakukan dan dilakukan oleh pemerintah. Informasi ini harus dikomunikasikan dengan cepat agar tidak membingungkan masyarakat. Humas pemerintah juga memainkan peranan penting sebagai fasilitator komunikasi. Peran fasilitator komunikasi dalam kehumasan adalah sebagai titik tolak berbagai informasi yang masuk dan keluar masyarakat (Siswanto & Abraham, 2016).

Pemerintah menggunakan media massa dan media sosial sebagai sarana untuk menyampaikan informasi terkait program “Bupati Ngantor



BAGIAN II

DASAR-DASAR KEBIJAKAN KOMUNIKASI

Pengertian Kebijakan Komunikasi

Kebijakan merupakan instrument yang menjadi bagian dari kekuasaan atau pemerintahan, baik dalam arti *governance* yang mengacu pada pengelolaan sumber daya publik, maupun pemerintahan hanya mengacu pada lembaga-lembaga negara. Kebijakan adalah suatu keputusan atau pilihan tindakan yang secara langsung mengendalikan bagaimana sumber daya alam, keuangan, dan manusia dikelola dan didistribusikan untuk kepentingan publik. Pada kepentingan umat, penduduk, komunitas dan warga negara. Berbagai ide, ideologi, teori dan kepentingan yang membentuk sistem pemerintahan suatu negara berkolaborasi, berkompromi dan bahkan bersaing untuk membentuk kebijakan (Anisya. 2024).

Sebagaimana dijelaskan Koontz dan Donnell (1987), banyak ahli dan cendekiawan juga mempunyai pendapat berbeda mengenai politik sebagai proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini menyatakan bahwa kebijakan merupakan suatu pernyataan atau pemahaman umum yang memuat pedoman dan gagasan dalam proses pengambilan keputusan. Mengikat batasan-batasan tertentu pada pengambilan keputusan pada intinya. Anderson (2006) dalam Taufiqurokhman (2014) menyatakan tujuan kebijakan *a purposive course of action followed by an actor (set of actors) in dealing with a problem (matter of concern)*. Fokus kebijakan *attention in what actually done againts what is purposed (intended)*, dan *kebijakan berbeda dengan keputusan*. Kebijakan adalah serangkaian tindakan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dan dilaksanakan oleh

seorang aktor atau sekelompok aktor lain untuk memecahkan masalah yang menjadi perhatian banyak pemangku kepentingan.

Para ahli lainnya berpendapat bahwa kebijakan adalah serangkaian keputusan mengenai biaya, personel, dan jadwal untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh sekelompok aktor yang terdiri dari manajer, bawahan, dan lembaga pemerintah atau swasta yang dilakukan dalam bidang atau kegiatan tertentu bagian dari rencana untuk menyiapkan keputusan. Maskuri (2017) juga menyatakan bahwa kebijakan adalah prinsip atau metode yang dipilih dalam proses pengambilan keputusan.

Implementasi kebijakan merupakan perwujudan (isi/tujuan) kebijakan publik dalam bentuk program kegiatan yang terstruktur dan terencana. kegiatan implementasi harus dilakukan secara hati-hati. Oleh karena itu, memang ada kebijakan yang bersifat *self executed*, yakni yang dapat langsung dilaksanakan namun tidak berpengaruh dalam menyusun proses implementasi, sebab dari hasil implementasi tersebut kinerja pemerintah dapat dinilai (Hupe & Hill, 2021).

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) Kebijakan adalah serangkaian tindakan atau tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan (kesulitan) dan kemungkinan (*opportunities*) bagi kebijakan tersebut untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan dengan tujuan tertentu yang dikejar dan dilaksanakan oleh individu atau kelompok pihak sehubungan dengan suatu isu atau keprihatinan. Politik juga dapat dilihat sebagai suatu sistem.

Kebijakan terdiri dari sekumpulan bagian-bagian yang saling berhubungan dan saling bergantung yang disusun menurut aturan-aturan tertentu sehingga membentuk suatu kesatuan. Menurut Dunn (1994), sistem kebijakan melibatkan interaksi antara tiga elemen: kebijakan publik, aktor kebijakan dan lingkungan kebijakan. Ketimpangan mengurangi efektivitas kebijakan, dan ketimpangan ini juga dapat menyebabkan

kegagalan kebijakan. Aspek pemerintahan yang relevan dengan tindakan yang sebaiknya diambil adalah kebijakan publik.

Kebijakan adalah pernyataan atau dokumen tertulis yang memberikan pedoman dan instruksi umum untuk menentukan ruang lingkup. Dari sudut pandang etimologis, kata “*policy*” dapat diterjemahkan sebagai “seperangkat konsep dan prinsip yang membentuk pekerjaan, kepemimpinan, dan perilaku. Kebijakan juga merupakan terjemahan dari “*policy*”. Kebijakan mungkin merupakan keputusan yang dibuat oleh pengambil keputusan, bukan kegiatan rutin yang telah diprogram sebelumnya atau keputusan berdasarkan aturan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini ditujukan untuk mencapai atau mencapai tujuan tertentu yang spesifik dan menyediakan sarana untuk memecahkan masalah melalui penggunaan peralatan tertentu dan kepatuhan terhadap tenggat waktu yang telah ditetapkan (Anisya, 2024).

Kebijakan adalah serangkaian kegiatan, tindakan, sikap, rencana program, dan keputusan yang dilakukan oleh para aktor (*stakeholder*) untuk menyelesaikan permasalahan (Herdiana, 2018). Kebijakan penting untuk mencapai tujuan organisasi. Kebijakan terdiri dari dua aspek yaitu kebijakan merupakan bentuk respon terhadap peristiwa yang terjadi guna mewujudkan harmonisasi para pemangku kepentingan, sehingga mengakibatkan meningkatnya perilaku pihak-pihak yang diperlakukan tidak rasional terhadap kolaborasinya dan kebijakan adalah praktik sosial.

Komunikasi kebijakan publik memegang peranan penting dalam menjamin terlaksananya kebijakan publik. Komunikasi yang efektif membantu mengatasi hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan publik serta meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat. Selain itu, komunikasi kebijakan publik juga membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sazali, H. 2021).

Pemerintah juga perlu memilih metode komunikasi yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan khalayaknya. Berbagai pendekatan

dapat digunakan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas dan beragam, mulai dari pertemuan tatap muka, penjangkauan media massa, hingga penggunaan teknologi informasi seperti media sosial. Perencanaan komunikasi publik akan dilaksanakan dengan mengutamakan komunikasi langsung berupa kinerja bisnis dan sosialisasi sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat. Rencana tersebut mencakup langkah-langkah strategis dan teknis untuk mendorong koordinasi dan kerja sama antara berbagai pemangku kepentingan. Rencana komunikasi kebijakan publik memegang peranan penting dalam menjamin terlaksananya kebijakan publik. Komunikasi yang efektif membantu mengatasi hambatan dan tantangan dalam implementasi kebijakan publik serta meningkatkan partisipasi dan dukungan masyarakat. Selain itu, komunikasi kebijakan publik juga membantu memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan publik, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Sazali, H. 2021).

Kebijakan harus dituangkan kedalam peraturan perundangan-perundangan (Safira, 2018). Hal ini karena peraturan hukum mempunyai rezim yang wajib dan mengikat. Oleh karena itu, kebijakan yang dikembangkan harus dimasukkan ke dalam sistem hukum dan dilaksanakan oleh semua orang tanpa kecuali. Diperlukan proses legislasi oleh badan yang berwenang sebelum Petunjuk ini mulai berlaku. Implementasi kebijakan merupakan kelanjutan dari perumusan dan ratifikasi kebijakan (Mutiasari et al, 2016). Maka dari itu, implementasi kebijakan publik dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mencapai tujuan berdasarkan kebijakan yang diambil. Dampak implementasi kebijakan adalah terjadinya hasil akibat implementasi kebijakan tersebut. Hasil pelaksanaan kebijakan yang dievaluasi akan mendapatkan hasil yang diharapkan (*intended*) atau juga hasil yang tidak diharapkan (*spillover negative effect*).

Kebijakan publik adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pada konsep Thomas Dye masih sangat luas. Hal ini disebabkan karena kebijakan publik tidak hanya mencakup apa yang

dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan publik, namun juga apa yang tidak dilakukan pemerintah (Mahaputra & Saputra, 2022). Kebijakan publik merupakan kebijakan pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang mengatur apa yang harus dilakukan oleh kelompok berkepentingan untuk mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat (Haitao & Ali, 2022). Dimensi, indikator, sintesis atau faktor kebijakan publik meliputi:

1. Kebijakan yang menunjukkan apakah tujuan kebijakan yang diharapkan telah tercapai. Hal ini memerlukan pengenalan permasalahan yang ada, penetapan tujuan yang tepat dan pencapaian hasil yang diinginkan
2. Efisiensi, menentukan bagaimana efisiensi atau pemborosan dapat dihindari dan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan digunakan seefisien mungkin
3. Keadilan, menekankan keterlibatan kebijakan tersebut memperlakukan semua pihak secara setara dan adil
4. Dampak sosial dan ekonomi, menunjukkan bagaimana kebijakan mempengaruhi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan perubahan dalam pertumbuhan ekonomi, kesetaraan dan tingkat kemiskinan
5. Partisipasi masyarakat dapat menentukan tingkat keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kebijakan
6. Keberlanjutan dapat menunjukkan kebijakan tersebut dapat dipertahankan dan dipertahankan dari waktu ke waktu tanpa menimbulkan dampak negatif yang besar (Saputro et al., 2022).

Kebijakan bersifat *problem solving* dan proaktif, beda dengan peraturan (*regulation*) dan hukum (*law*) serta kebijakan bisa lebih adaptif dan interpretatif, mengatur apa yang boleh dan tidak boleh. Kebijakan harus bersifat umum, tanpa mengesampingkan karakteristik lokal tertentu. Oleh karena itu, kebijakan dapat memberikan peluang untuk ditafsirkan sesuai dengan keadaan yang ada. Asumsi tentang politik mendapat tempat khusus dalam model rasional karena elemennya relatif tahan terhadap uji konsistensi. Jadi bisa berbicara tentang kebijakan luar negeri, kebijakan

sosial, kebijakan pemasaran, kebijakan pendidikan. Istilah ini merujuk pada penggunaan kebijakan regional dengan tema universal, metode manipulasi lingkungan eksternal suatu organisasi, dan kebijakan spesifik yang ditargetkan tindakan balasan (Arwildayanto et al., 2018).

Pendapat lain yang menekankan pentingnya komunikasi internal dalam suatu organisasi, oleh karena itu pedoman komunikasi sangat diperlukan. Pengertian komunikasi dalam suatu organisasi pada dasarnya melibatkan unsur-unsur yang berkomunikasi dalam organisasi: manajer, tim kerja, bawahan, dan bagaimana organisasi berkomunikasi melalui pengiriman dan penerimaan pesan (Purnomo, 2018).

Selain kebijakan komunikasi internal, menjalankan suatu organisasi juga memerlukan tindakan dari pihak pemimpin untuk mengambil kebijakan mengenai komunikasi dengan pihak eksternal atau eksternal organisasi. Hal ini dimaksudkan untuk menjalin hubungan komunikasi yang aktif antara dua atau lebih organisasi yang berkomunikasi. Salah satu bentuk komunikasi eksternal suatu organisasi adalah komunikasi berbagai bentuk kepentingan dan kebutuhan suatu organisasi dengan organisasi lain. Pada dasarnya, organisasi secara aktif berkomunikasi dengan organisasi lain untuk bertukar informasi, menjalin hubungan kerja sama, dan melakukan dialog untuk memecahkan masalah bersama (Purnomo, 2018).

Menurut Abrar (2008:12) Kebijakan komunikasi adalah studi tentang keputusan dan tindakan pemerintah yang berkaitan dengan masalah komunikasi. Penelitian kebijakan komunikasi bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menganalisis kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan komunikasi dan menarik kesimpulan tentang keberadaan kebijakan tersebut. Di sisi lainnya, kebijakan komunikasi menurut Mc Braid (dalam Cangara 2013) merupakan prinsip-prinsip, aturan-aturan atau pedoman di mana sistem komunikasi dibangun sehingga menjadi kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengoordinasikan kegiatan, memilih pendekatan dengan melihat kemungkinan alokasi dana, keputusan-keputusan struktural yang berpengaruh terhadap aktivitas

komunikasi, serta berusaha menyetimbangkan ketidakseimbangan faktor-faktor eksternal dan internal serta menetapkan prioritas yang diambil.

Suatu kebijakan komunikasi setidaknya terdiri dari tiga bagian penting. Bagian-bagian ini disebut konteks, domain, dan paradigma. Konteks adalah hubungan antara kebijakan komunikasi dan lingkungannya, seperti ekonomi politik atau kebijakan komunikasi. Ruang lingkup suatu kebijakan komunikasi mengacu pada isi nilai-nilai yang terkandung dalam kebijakan komunikasi tersebut. salah satu contohnya seperti, globalisasi, perekonomian dunia, dan lain-lain, namun paradigma lebih seperti kerangka ideal yang menjadi tujuan kebijakan komunikasi (Abrar, 2008:4). Dalam konteks paradigma ini, pedoman yang dikeluarkan pemerintah mengenai keterbukaan informasi dan transaksi elektronik serta informasi publik ditujukan untuk masyarakat informasi. Kebijakan komunikasi setidaknya memiliki 5 kriteria. Menurut Abrar, kriteria ini berkaitan dengan bentuk kebijakan komunikasi sebagai sebuah kebijakan publik. Kriteria tersebut yaitu:

1. Memiliki Tujuan Tertentu

Peraturan dan arahan selalu mempunyai tujuan. Seperti disebutkan sebelumnya, kebijakan komunikasi diciptakan untuk memfasilitasi pengoperasian sistem komunikasi. Secara spesifik, setiap kebijakan komunikasi memiliki tujuan.

2. Berisi Tindakan Pejabat Pemerintah

Kebijakan komunikasi dibuat oleh lembaga pemerintah. Misalnya, pedoman komunikasi di tingkat legislatif dikeluarkan oleh DPR setelah berkonsultasi dengan pemerintah. Secara teknis, diperlukan regulasi yang lebih rendah agar undang-undang ini dapat berfungsi lebih optimal. Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres) dan Keputusan Menteri (KepMen) merupakan bagian dari pemerintahan. Artinya semua produk politik dihasilkan melalui instrumen negara dan karenanya merupakan hasil tindakan negara.

3. **Memperlihatkan apa yang dilakukan Pemerintah**
Kebijakan yang dibuat oleh pejabat pemerintah menghasilkan pedoman mengenai apa yang akan dilakukan pemerintah. Namun, penting untuk dicatat bahwa kebijakan komunikasi tidak mencerminkan niat pemerintah mengenai bagaimana proses komunikasi seharusnya dijalankan. Dalam konteks ini, pemerintah berperan sebagai perantara ketika ada keinginan untuk mengembangkan peraturan dan kebijakan antar kelompok daerah.
4. **Bersifat Positif atau Negatif**
Kebijakan komunikasi dapat mempunyai nilai positif atau negatif. Suatu kebijakan komunikasi dianggap baik jika dapat mengatasi permasalahan yang timbul, meskipun kebijakan tersebut dapat memprediksi perubahan di masa depan dan mudah diterapkan. Namun, karena politik juga melibatkan tarik-menarik antar kepentingan, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kebijakan komunikasi akan berdampak negatif. Setiap kebijakan mempunyai pro dan kontra
5. **Bersifat Memaksa**
Kebijakan komunikasi sebagai kebijakan publik diwujudkan oleh lembaga-lembaga negara. Ciri khas negara adalah kekuasaan yang bersifat memaksa. Artinya, setiap keputusan yang diambil negara harus dilaksanakan. Jika Anda melanggar keputusan pemerintah, Anda berisiko dikenakan sanksi yang mengikat, terutama sanksi hukum, atas pelanggarannya.

Tujuan Kebijakan Komunikasi

Sebelum membahas tujuan kebijakan komunikasi sebagai bagian inheren dari sistem komunikasi, terlebih dahulu dipaparkan tentang tujuan komunikasi itu sendiri. Pembahasan tujuan komunikasi dianggap penting dan relevan dalam penelitian ini sebab adanya kebijakan komunikasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari tujuan akhir komunikasi yang diinginkan.

Tujuannya adalah agar informasi dan pesan dari komunikator dapat dipahami oleh lawan bicaranya (komunikator). Oleh karena itu, komunikator harus menyampaikan pesan utama kepada komunikan se jelas-jelasnya. Hal kedua adalah mengenal orang lain. Tujuannya adalah untuk mengenal orang lain. Melalui interaksi dan komunikasi, setiap orang dapat saling mengenal dan memahami. Kemampuan mendengarkan, membaca, dan menafsirkan pesan orang lain merupakan hal yang penting dalam kegiatan komunikasi. Hal ketiga adalah mampu memasukkan pendapat orang lain. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pendapat yang dikemukakan dapat diterima oleh orang lain. Komunikasi persuasif sering kali adalah tentang menyampaikan pemikiran dan ide Anda kepada orang lain dan membuat mereka menerimanya (Aditya, 2021). Stanton mengungkapkan sekurang-kurangnya ada 5 (lima) hal yang menjadi tujuan manusia melakukan komunikasi dalam kehidupannya, yaitu:

1. Dapat mempengaruhi orang lain.
2. Membangun atau mengelola hubungan antar individu.
3. Terdapat adanya perbedaan dari jenis kemampuan masing-masing manusia.
4. Membantu meringankan beban atau tugas orang lain.
5. Bermain atau sekedar bergurau. (Liliweri, 2010).

Kebijakan komunikasi tidak dapat dipisahkan dari kebijakan publik. Sebab, kebijakan komunikasi juga merupakan bagian dari kebijakan public. Kebijakan publik dapat dipahami secara sederhana sebagai apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Ada yang berpendapat bahwa konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik tidak hanya mencakup apa yang dilakukan pemerintah terhadap isu-isu publik, namun juga apa yang tidak dilakukan pemerintah. Definisi sederhana ini berarti bahwa kebijakan publik dibuat oleh lembaga pemerintah, bukan organisasi swasta, dan kebijakan publik adalah mengenai keputusan yang dibuat dan tidak dibuat oleh lembaga pemerintah (Subarsono, 2005: 2).

Perlu dipahami bahwa pada prinsip tujuan adanya kebijakan komunikasi tidak terlepas dari adanya pengaturan tentang komunikasi



BAGIAN III

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOMUNIKASI

Prinsip-Prinsip Kebijakan Komunikasi

Prinsip-prinsip Kebijakan Komunikasi pada dasarnya menegaskan komitmen organisasi terhadap transparansi, keterbukaan, dan integritas dalam semua aspek komunikasi. Hal ini mencerminkan pengakuan akan pentingnya menjaga kepercayaan dan keyakinan serta kemampuan untuk merespons secara tepat waktu dan bijaksana terhadap dinamika yang berkembang di lingkungan internal dan eksternal. Di sisi lainnya, Pedoman para pembuat kebijakan komunikasi sangat menentukan dalam perancangan kebijakan komunikasi. Pedoman dalam merancang suatu kebijakan komunikasi adalah nilai-nilai yang mendasari penciptaannya. Setidaknya ada empat nilai yang biasa dianut oleh para pengambil kebijakan komunikasi (Abrar, 2008).

Pertama ialah nilai politik. Kepentingan politik dapat menjadi dasar dalam pembuatan kebijakan komunikasi publik. Para pembuatnya tidak peduli dengan kondisi lain, seperti dalam RPP tentang penyadapan ini walaupun banyak pihak menyatakan bahwa RPP ini bertentangan dengan UU KPK, tapi tetap saja pemerintah dalam hal ini Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) tetap melanjutkan proses pembuatan RPP ini.

Kedua merupakan nilai organisasi. Dalam hal ini yang dimaksud organisasi adalah organisasi yang eksis dalam pemerintahan. Contohnya seperti pembuat kebijakan RPP tentang penyadapan, kebijakan ini

dibuat untuk memperkuat KPK. RPP Penyadapan itu, selain amanah Permenkominfo Nomor 11 Tahun 2006, juga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Landasan hukum penyadapan yang dipakai KPK baru Peraturan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi (Permenkominfo) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Teknis Penyadapan terhadap Informasi. Oleh sebab itu, RPP Penyadapan yang kini tengah disiapkan pemerintah dapat dinilai akan memberikan landasan hukum yang lebih kuat.

Ketiga ialah nilai ideologis yaitu pilihan nilai yang diyakini oleh pembuat kebijakan komunikasi public sebagai nilai dalam membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Pembuatan RPP Tentang Penyadapan ini menurut Menkominfo Tifatul Sembiring berguna untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini tidak adil jika seseorang diam-diam tanpa belum adanya proses penyidikan tiba-tiba direkam atau disadap pembicaraan melalui telepon.

Keempat merupakan nilai pribadi yang maksudnya ialah menjadikan keinginan sendiri sebagai dasar pembuatan kebijakan komunikasi. Terdapat kecurigaan berbagai pihak bahwa Depkominfo ingin mengatur segala proses komunikasi di Indonesia.

Kelima ialah nilai kebijaksanaan. Nilai yang dimaksud ialah menyangkut persepsi pembuat kebijakan komunikasi terkait makna kebaikan yang dikandung kebijakan komunikasi. Maksud dari nilai tersebut ialah persepsi pembuat kebijakan komunikasi tentang kebaikan yang mewarnai makna terkandung dalam kebijakan komunikasi. Dalam RPP tentang penyadapan ini, Depkominfo berharap ada efisiensi dan efektifitas setelah dibentuknya Pusat Intersepsi Nasional (PIN), dibentuknya PIN diharapkan dapat menyatukan banyak alat sadap yang berserakan sehingga memudahkan kerja penyadapan (Abrar, 2008). Di sisi lainnya, jika kebijakan komunikasi jika dikaitkan komunikasi pemerintahan, maka terdapat beberapa prinsip sebagai kerangka dasar pemikirannya, yaitu prinsip:

1. Keterbukaan.
2. Komunikasi publik dapat dilakukan secara langsung.
3. Keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari pembentukan kebijakan dan pengiriman.
4. Presentasi positif dari kebijakan komunikasi pemerintah dan prestasi yang sudah dicapai.
5. Menggunakan seluruh saluran komunikasi yang ada dapat dianggap relevan, tidak hanya terbatas pada media massa nasional.
6. Melakukan komunikasi lintas departemen yang terkoordinasi mengenai suatu isu, bukan menciptakan konflik atau duplikasi pesan.
7. Mendorong kenetralan posisi politik dari aparatur pemerintah.

Sementara itu, menurut Joel Netshitenzhe dalam *Government Communicators' Handbook* yang dikutip oleh Ambar menyatakan bahwa prinsi-prinsip dasar komunikasi pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Kerja pemerintah ialah sebuah kegiatan publik.
2. Sebuah pusat layanan komunikasi harus memiliki kewenangan untuk melaksanakan kegiatan publik.
3. Para pejabat politik sebagai komunikator utama dalam komunikasi pemerintahan.
4. Setiap orang dalam pemerintahan merupakan seorang komunikator.
5. Komunikasi pemerintahan harus didasarkan dari program dan strategi komunikasi terpadu.
6. Struktur komunikasi tidaklah mencerminkan kebijakan.
7. Komunikasi lebih dari sekedar media perantara.
8. Bentuk komunikasi yang paling efektif ialah komunikasi langsung dan pertukaran bersama mengenai suatu pandangan dengan publik.
9. Saat mengerjakan kampanye dan program, diperlukan usaha dalam memahami lingkungan komunikasi.
10. Kampanye kebijakan komunikasi dapat berjalan dengan baik ketika bekerja sama dengan pihak lain di luar dari pemerintah. (Ambar, 2017).

Komponen-Komponen Kebijakan Komunikasi

Kebijakan komunikasi adalah dokumen strategis yang mengartikulasikan prinsip, tujuan, dan pedoman untuk mengelola komunikasi organisasi. Saat merancang kebijakan komunikasi yang efektif, beberapa komponen utama harus dipertimbangkan secara cermat. Salah satu komponen utamanya adalah tujuan komunikasi. Hal ini memberikan indikasi yang jelas tentang apa yang ingin dicapai organisasi melalui aktivitas komunikasinya. Tujuan komunikasi dapat berkisar dari meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan reputasi perusahaan, hingga meningkatkan keterlibatan karyawan. Kebijakan komunikasi adalah alat yang efektif untuk mengendalikan dan mengelola semua komunikasi dalam perusahaan. Melalui kebijakan komunikasi yang kuat, organisasi dapat memastikan konsistensi, transparansi, dan efektivitas dalam mengelola hubungan dengan berbagai pemangku kepentingan.

UNESCO mendefinisikan kebijakan komunikasi sebagai seperangkat prinsip dan norma yang sengaja dibuat untuk tujuan mengatur keseluruhan operasi sistem komunikasi. Kebijakan komunikasi tidak ada hubungannya dengan kelancaran fungsi sistem komunikasi, tetapi dengan pembentukan masyarakat informasi. Kebijakan komunikasi ini berkaitan dengan tiga hal, yaitu: konteks, domain, dan paradigma. Penjelasan sebagai berikut:

1. Konteks

Konteks mempunyai makna yang mengacu pada sesuatu yang ada disekitar individu. Contohnya termasuk politik-ekonomi, politik-komunikasi, dll. Konteks ini sangat penting ketika menentukan cakupan kebijakan komunikasi publik. Bidang kebijakan komunikasi mengacu pada kandungan nilai yang terkandung dalam kebijakan komunikasi, seperti globalisasi dan perekonomian dunia. Menurut Richard West dan Lynn H. Turner dalam buku *Introducing Communication Theory: Analysis and Application* (2007), dalam komunikasi, konteks diartikan sebagai lingkungan tempat terjadinya proses komunikasi.

Konteks komunikasi tidak hanya mempermudah manusia dalam mempelajari proses komunikasi, namun juga menjadi latar belakang bagi para penulis serta teoretikus untuk menganalisis sebuah fenomena. Ada tujuh konteks komunikasi, yaitu komunikasi intrapersonal (intrapribadi), komunikasi interpersonal (antarpribadi), komunikasi kelompok kecil, komunikasi organisasi, komunikasi publik atau retorika, komunikasi massa, dan komunikasi lintas budaya.

Komunikasi intrapersonal (intrapribadi) dikutip dari buku Pengantar *Ilmu Komunikasi* (2016) karya Hafied Cangara, komunikasi intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri individu, atau proses komunikasi dengan diri sendiri. Contohnya, komunikasi intrapribadi saat mempertimbangkan suatu hal dan mengambil keputusan secara individu. Komunikasi Interpersonal (Interpersonal) Situasi komunikasi interpersonal adalah suatu proses komunikasi yang berlangsung secara langsung antara dua orang atau lebih. Contohnya termasuk komunikasi interpersonal antara pasien dan dokter, orang tua dan anak, saudara kandung, guru dan siswa, instruktur dan siswa, dll.

Komunikasi Kelompok Kecil adalah konteks komunikasi yang terjalin antara banyak orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Beberapa ahli mengatakan bahwa komunikasi kelompok kecil termasuk dalam konteks komunikasi interpersonal. Karena anggota berpartisipasi secara tatap muka dan semua orang sejajar. Misalnya komunikasi kelompok kecil dalam perkuliahan, diskusi, rapat, ceramah, kegiatan pembelajaran, kerja kelompok, dan lain-lain.

Komunikasi organisasional dalam konteks komunikasi organisasi lebih luas dibandingkan dengan komunikasi kelompok kecil. Komunikasi organisasi mencakup berbagai situasi komunikasi, mulai dari komunikasi interpersonal hingga komunikasi di ruang publik. Strategi dan Kemampuan Komunikasi Organisasi (2016) menurut Andre Hardjana mengartikan komunikasi organisasi sebagai proses

komunikasi yang memajukan aktivitas pegawai secara terkoordinasi untuk mencapai tujuan organisasi. Misalnya komunikasi organisasi antara atasan dan bawahan serta komunikasi lintas departemen.

Komunikasi publik adalah penyampaian informasi dari satu orang ke banyak orang. Konteks komunikasi ini menggambarkan proses dimana seorang pembicara menyampaikan pesan kepada khalayak yang lebih luas dalam suasana pribadi. Ketika berbicara di depan umum, setidaknya ada tiga tujuan utama yang ingin dicapai oleh pembicara. Fungsinya adalah memberi informasi, menghibur, dan membujuk atau membujuk

Komunikasi massa adalah proses komunikasi yang berlangsung antara komunikator yang melembaga dengan khalayak massal, lewat alat bersifat mekanis, seperti radio, televisi, koran dan film. Contohnya adalah komunikasi massa yang penyampaian menggunakan berita di televisi dan penyampaian pesan lewat film.

Komunikasi lintas budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok dengan latar belakang budaya berbeda-beda. Berbeda dengan konteks komunikasi sebelumnya, komunikasi lintas budaya menjadi satu-satunya konteks komunikasi yang membahas serta melibatkan budaya. Contohnya komunikasi lintas budaya antara orang Jawa dengan Manado, serta komunikasi antara orang Indonesia dengan orang Amerika. (Kompas.com/Skola, 2022).

2. Domain

Pengertian domain secara harfiah ialah sebuah bidang atau ruang kekuasaan, tempat di mana orang bebas beraktivitas secara otoritatif. Domain juga diartikan sebagai wilayah, daerah atau ranah (E. Setiawan, 2023). Domain layaknya sebuah rumah, cuman pemiliknya yang punya wewenang untuk mengelola. Domain kebijakan komunikasi memiliki arti muatan nilai yang mengandung pada kebijakan komunikasi. Misalnya adalah seperti globalisasi, ekonomi global dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian tersebut, domain dalam kaitannya dengan kebijakan komunikasi adalah bahwa komunikasi memiliki ranahnya sendiri, dan ia komunikasi itu sendiri memiliki nilai. Agar wilayahnya terjaga dan nilainya tetap lestari, maka perlu ditata sedemikian rupa. Penataan inilah yang dimaknai sebagai sebuah kebijakan.

3. Paradigma

Paradigma adalah kerangka ideal yang memperkuat masyarakat sipil. Paradigma ini berasumsi bahwa masyarakat mempunyai permasalahan yang harus diselesaikan. Paradigma dalam konteks lain, seperti komunikasi pemerintahan, merupakan nuansa pemikiran seseorang atau sekelompok orang dalam memandang dan bereaksi terhadap suatu objek atau topik tertentu. Terkait dengan komunikasi adalah pendekatan komunikasi pemerintah. Sains pada dasarnya bersifat relatif, dan kebenaran yang disampaikannya juga bersifat relative. Salah satu syarat ilmu pengetahuan adalah harus dapat diterima secara umum, namun ilmu eksakta pun berubah seiring berjalannya waktu karena pola pikir manusia cenderung tumbuh dan berkembang (Hasan, n.d.).

Komunikasi sebagai suatu ilmu mempunyai tradisi intelektual tersendiri yang membedakannya dengan ilmu-ilmu lainnya. Tradisi ilmiah ini mempengaruhi teori-teori yang berubah seiring berjalannya waktu dan itulah sebabnya para ilmuwan terkadang memiliki pandangan berbeda mengenai definisi suatu teori. Tradisi intelektual ini disebut dengan paradigma atau perspektif, atau dapat juga diartikan dengan cara pandang. Paradigma menjadi landasan dalam membangun suatu teori, dalam hal ini teori ilmu komunikasi. Paradigma ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu memberikan landasan bagi berkembangnya teori ilmu komunikasi itu sendiri.

Dengan demikian, Paradigma komunikasi pemerintah menciptakan lingkungan komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi, merencanakan, memilih, mengelola, memotivasi, dan

mencapai tingkat kesejahteraan bersama yang setinggi-tingginya bagi pemerintah dan masyarakat. Paradigma yang akan dibangun dalam kebijakan komunikasi adalah bagaimana menata komunikasi yang berlangsung secara lokal, regional, bahkan nasional dengan lebih baik, serta bagaimana menjaga dan mengamalkan nilai dan etika dalam masyarakat. Paradigma komunikasi pemerintah menciptakan lingkungan komunikasi untuk mencapai tujuan organisasi, merencanakan, memilih, mengelola, memotivasi, dan mencapai tingkat kesejahteraan bersama yang setinggi-tingginya bagi pemerintah dan masyarakat. Paradigma yang akan dibangun dalam kebijakan komunikasi adalah bagaimana menata komunikasi yang berlangsung secara lokal, regional, bahkan nasional dengan lebih baik, serta bagaimana menjaga dan mengamalkan nilai dan etika dalam masyarakat.

Implementasi instrumen kebijakan baru dimulai ketika tujuan dan sasaran ditetapkan atau ditetapkan melalui keputusan politik. Maka dari itu, implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh actor yang berbeda-beda sehingga pada akhirnya tercapai hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan itu sendiri. George C. Edward Edward III (dalam Subarsono, 2011) berpendapat bahwa implementasi kebijakan komunikasi dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

- a. Komunikasi yaitu keberhasilan dari implementasi kebijakan yang memiliki syarat agar implementor mengetahui apa yang dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan komunikasi harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (*targetgroup*), sehingga dapat mengurangi distorsi implementasi.
- b. Sumberdaya merupakan isi kebijakan yang telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten. Tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya dalam pelaksanaannya, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud

sumber daya manusia, seperti kompetensi implementor dan sumber daya finansial.

- c. Disposisi ialah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor. contohnya komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan komunikasi dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
- d. Struktur Birokrasi ialah pengimplementasikan kebijakan komunikasi dalam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure (SOP)* dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang dapat cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, salah satunya prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Merilee S. Grindle yang menyebutkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Penggunaan teori tersebut dapat membantu penulis untuk menganalisis implementasi Kebijakan publik secara lebih mendalam. Konsep Kebijakan Publik secara etimologis memiliki istilah kebijakan atau *policy* berasal dari Bahasa Yunani yaitu "*polis*" berarti negara, kota yang kemudian masuk ke dalam bahasa Latin menjadi "*politia*" yang berarti negara. Akhirnya masuk ke dalam bahasa Inggris "*policie*" yang memiliki arti berkenaan dengan pengendalian masalah publik atau administrasi pemerintahan. Istilah dari "kebijakan" atau "*policy*" dapat dipergunakan untuk melihat perilaku seorang aktor atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Pengertian kebijakan seperti memahami politik dengan cara ini, dan cara ini relatif cocok untuk diskusi biasa, namun kurang cocok untuk diskusi analisis kebijakan publik yang lebih ilmiah dan sistematis.

Budi Winarno (2008) Perlu diperhatikan bahwa istilah “kebijakan” atau “kebijakan” umumnya digunakan untuk merujuk pada suatu aktor (seperti pejabat, kelompok, atau lembaga pemerintah) atau kumpulan aktor dalam bidang kegiatan tertentu. Definisi kebijakan ini relatif cocok untuk diskusi seperti perdebatan biasa, namun kurang cocok untuk diskusi ilmiah dan sistematis dibandingkan analisis kebijakan publik, sehingga tidak cocok untuk batasan kebijakan publik yang lebih tepat. *Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn Menurut Meter dan Horn* (dalam Subarsono, 2011) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Menurut pandangan Edward III (Budi Winarno, 2008) proses komunikasi kebijakan dipengaruhi tiga hal penting, yaitu:

1. Faktor pertama berpengaruh terhadap komunikasi kebijakan adalah transmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu keputusan, ia harus menyadari bahwa keputusan yang telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan.
2. Faktor kedua adalah kejelasan, bila kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan sesuai dengan keinginan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi kebijakan juga harus jelas.
3. Faktor ketiga merupakan konsistensi, jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, maka perintah pelaksanaan harus bersifat konsisten dan jelas. Walaupun perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan dengan jelas. Jika perintah tersebut bertentangan, maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

Terdapat beberapa syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip (Solichin 1997) yaitu,

1. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
2. Pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
3. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
4. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
5. Hubungan yang bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
6. Hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Tugas yang diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Kesembilan komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
9. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Sebagian besar implementasi kebijakan berada pada model Top Down yang salah satunya dikemukakan oleh Van Meter dan Horn (1978) sebagaimana yang dikutip dalam Skripsi M. Aniqul Fahmi tahun 2010 mendefinisikan kebijakan publik sebagai berikut : “*policy implementation encompasses those by public and private individuals (and group) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions.*” Definisi tersebut memberikan makna bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (dan kelompok) pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Implementasi kebijakan publik biasanya dilakukan oleh negara melalui lembaga pemerintah. Sebab, implementasi kebijakan publik merupakan upaya pemenuhan salah satu misi utama pemerintah, yaitu penyediaan pelayanan publik (*public service*). Selain itu model implementasi *top down* yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam Nugroho (2009) membuat definisi yang lebih lengkap tentang implementasi kebijakan

publik: “Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi menyebutkan secara tegas tujuan/sasaran yang dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya.”

Ahli kebijakan yang lebih memfokuskan model kebijakan dalam perspektif *Bottom Up* adalah Adam Smith. Menurut Smith (1973) dalam Islamy (2001), Implementasi kebijakan dipandang sebagai suatu proses atau alur. Model Smith melihat proses implementasi kebijakan dari proses politik melalui kaca mata perubahan sosial dan politik. Tindakan pemerintah yang bertujuan untuk mewujudkan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai sasarannya. Menurut Smith, implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, sebagai berikut:

1. *Idealized policy*: Suatu pola interaksi yang diprakarsai oleh pengambil kebijakan dengan tujuan mendorong, mempengaruhi dan menstimulasi pelaksanaan kelompok sasaran. Kelompok sasaran yaitu kelompok aktor politik yang diharapkan mengadopsi pola interaksi yang diharapkan oleh pembuat kebijakan. Karena kelompok ini merupakan sasaran implementasi kebijakan, maka diharapkan mereka dapat menyesuaikan pola perilakunya dengan kebijakan yang dirumuskan.
2. *Implementing organization* yaitu badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan
3. *Environmental factors* merupakan unsur-unsur yang ada di dalam lingkungan dapat mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Kebijakan publik berbentuk apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Model implementasi kebijakan yang berada pada model Top Down yang dikemukakan oleh Hogwood dan Gunn (1986) dalam (Solichin, 2012;128) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy*

failure) ini dalam dua kategori besar, yaitu: *Non- implementation* (tidak terimplementasikan) dan *Unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikan mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana. Akibatnya, implementasi yang efektif sukar untuk dipenuhi.

Dengan demikian suatu kebijakan boleh jadi tidak dapat diimplementasikan secara efektif sehingga dinilai oleh para pembuat kebijakan publik sebagai pelaksanaan yang buruk atau baik pembuat kebijakan (*policymakers*) maupun mereka yang mendapat tugas untuk melaksanakannya (*implementing agencies/ implementing actors*) memiliki kesepakatan bahwa kondisi eksternal tidak menguntungkan bagi efektifitas implementasi, sehingga tidak seorang pun perlu dipersalahkan. Maka dari itu, kebijakan itu telah gagal karena bernasib buruk (Ilham, 2014).

Hambatan Kebijakan Komunikasi

Sebelum dikemukakan hambatan komunikasi, terlebih dahulu dikemukakan hambatan komunikasi secara umum. Hambatan dalam komunikasi merupakan tantangan umum yang dapat menghambat aliran informasi yang efektif dan menyebabkan ketidaksepahaman antara pihak-pihak yang terlibat. Salah satu hambatan utama adalah ketidakjelasan pesan, di mana pesan yang disampaikan tidak jelas atau ambigu, sehingga menyebabkan interpretasi yang beragam dari penerima pesan. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan bahasa yang tidak tepat, penyampaian informasi yang kurang terstruktur, atau ketidakjelasan tujuan komunikasi. Hambatan dalam komunikasi dapat dibedakan atas hambatan psikologis, hambatan sosio-kultural, hambatan mekanis, dan hambatan interaksi verbal.

1. Hambatan Psikologis

- a. Kepentingan (*interest*) yang berkaitan dengan sikap selektif dalam menanggapi dan menghayati pesan. Minat komunikasi mempengaruhi perhatiannya terhadap rangsangan, reaksi, emosi, pikiran, tindakan, dan sikap reaktif terhadap pesan. Ketertarikan seorang komunikasi ditentukan oleh apakah

pesan tersebut berguna baginya. Komunikator melakukan proses pemilihan media yang menarik minatnya dan sesuai minatnya. Komunikator dalam komunikasi massa saat ini mewakili sejumlah besar kelompok sasaran yang tersebar luas. Mereka mempunyai minat yang sangat berbeda dan unik. Pesan-pesan komunikasi yang umum menimbulkan perbedaan dalam perhatian dan ketertarikan khalayak terhadap pesan-pesan tersebut. Bagi produsen informasi dalam komunikasi massa, adanya gejala segmentasi khalayak menjadi pertimbangan tersendiri. Aspek isi media komunikasi yang dihasilkan harus memiliki daya tarik yang kuat agar program dan materi yang ditawarkan menarik perhatian semua kelompok sasaran, bahkan di luar kelompok sasaran utama

- b. Prasangka (*prejudice*) adalah Persepsi masyarakat terhadap orang dan kelompok lain serta sikap perilaku. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ditentukan oleh faktor pribadi (fungsional) dan situasional. Faktor pribadi berhubungan dengan kebutuhan, pengalaman masa lalu, peran, dan status. Persepsi ditentukan bukan oleh jenis atau bentuk stimulus, namun oleh ciri-ciri yang meresponsnya. Faktor situasional (struktural), sebaliknya, merujuk pada sifat fisik stimulus. Prasangka kelompok masyarakat tertentu terhadap kelompok lain dalam masyarakat umumnya disebabkan oleh perbedaan suku, ras, dan agama. Bias dalam komunikasi terjadi ketika komunikator menentang komunikator. Prasangka lebih bersifat emosional daripada rasional dan subyektif dan cenderung mencerminkan penilaian negatif. Mengingat dampak negatif dari bias negatif komunikator, maka komunikator dalam komunikasi massa harus netral, bereputasi, dapat diterima, kompeten dan dapat dipercaya
- c. Stereotip (*stereotype*) merupakan suatu gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat dan watak pribadi orang atau golongan

lain yang bersifat negatif. Stereotip berdasar dari keterangan yang kurang lengkap dan subjektif dan biasanya bersifat umum. Stereotip melihat dari gambaran mental yang menetap pada kelompok tertentu dianggap berlaku untuk setiap orang (anggota) dalam kelompok tersebut tanpa memperhatikan adanya ciri khas dari orang yang bersangkutan. Meskipun stereotip lebih dikenal pada dunia antropologi sosial, tetapi kemudian dalam bidang komunikasi dikenal lebih luas karena ia terkait dengan faktor yang dapat menghambat efektif atau tidaknya komunikasi, bahkan bisa mempengaruhi terjadi atau tidaknya komunikasi. Motivasi berkenaan dengan penggerak, alasan dan dorongan internal manusia untuk berbuat sesuatu. Motivasi berkaitan juga dengan seseorang yang mengetahui apa yang akan dilakukan, bagaimana melakukan dan mengapa melakukan. Motif ini berarti memberi tujuan dan arah pada tingkah laku manusia. Motif sesuai keinginan dan kebutuhan. Dengan motivasi yang berbeda dengan intensitas tanggapan terhadap pesan. Maka kesesuaian pesan komunikasi dengan motivasi seseorang akan makin besar kemungkinan komunikasi dapat diterima dengan baik oleh komunikan.

2. Hambatan Sosio Kultural

Perbedaan budaya menimbulkan perbedaan norma sosial. Sebaliknya tingkah laku, adat istiadat, tata tertib, dan adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun dapat menjadi pedoman berperilaku dan bertingkah laku dalam masyarakat. Hambatan sosiokultural dapat dikategorikan menjadi faktor normatif sosial dan hambatan semantic. Norma sosial merupakan alat yang digunakan anggota masyarakat untuk menyesuaikan perilakunya dengan lingkungan sosialnya agar dapat diketahui, diakui, dihargai, dan diikuti. Faktor semantik berhubungan dengan hambatan Bahasa. Hal ini dapat terjadi ketika komunikator salah mengucapkan atau mempunyai arti atau pemahaman yang berbeda terhadap kata atau istilah yang sama. Gangguan semantik mempengaruhi pemahaman pesan



BAGIAN IV

KOMUNIKASI ISLAM

Etika Komunikasi Islam

Perspektif komunikasi dalam Islam mencakup pandangan dan prinsip yang berasal dari ajaran dan nilai-nilai Islam, yang ditafsirkan dalam konteks komunikasi manusia. Dalam Islam, komunikasi bukan sekedar pertukaran kata-kata, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, etika, dan keadilan sosial. Salah satu aspek kunci dari perspektif komunikasi Islam adalah pentingnya komunikasi yang jujur, penuh hormat dan bertanggung jawab. Al-Qur'an, kitab suci umat Islam, menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya komunikasi yang bermanfaat dan berbuat baik dalam berinteraksi dengan sesama. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 83, Allah SWT mengingatkan umat manusia untuk berkata-kata dengan baik kepada orang lain. Hal ini menekankan pentingnya menjaga kebenaran, kejujuran, dan etika dalam setiap bentuk komunikasi baik verbal maupun non-verbal.

Dari berbagai literatur tentang komunikasi Islam, dapat ditemukan setidaknya 6 (enam) jenis komunikasi, gaya bicara atau pembicaraan (*qaulan*) yang dikategorikan sebagai kaidah, prinsip atau etika komunikasi Islam. Prinsip komunikasi Islam ini bersumberkan Al-Quran karena disebut "Ayat-Ayat Komunikasi". Yang dimaksud Komunikasi Islam adalah komunikasi berdasarkan ajaran Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad Saw. Komunikasi Islam memiliki makna pada penyampaian pesan-pesan keislaman dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi Islam.

Ajaran Islam memberikan pedoman komunikasi seperti dalam 6 prinsip yang dikutip dari ayat-ayat tentang komunikasi. Menurut Harjani Hefni dalam buku *Komunikasi Islam* (2017) dalam Al-Qur'an dan Hadis ditemukan cukup banyak istilah yang terkait dengan komunikasi. Di antara istilah tersebut ialah *lafadz*, *qaul*, *kalarn*, *nuthq*, *naba*, *khobar*, *hiwar*, *jidal*, *bayan*, *tadzkir*, *tabsyir*, *indzar*, *tahridh*, *waadz*, *dakwah*, *taaruf*, *tawashi*, *tabligh*, dan *irsad*. Menurut Harjani, komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip Islam yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Istilah untuk komunikasi dalam bahasa Arab adalah *tawashul*. *Tawashul* berasal dari kata “*washala*” yang berarti “sampai”. Dengan demikian *tawashul* ialah proses dari pertukaran informasi yang dilakukan oleh dua pihak sehingga pesan disampaikan dipahami oleh kedua belah pihak yang melakukan komunikasi.

Istilah lain dalam bahasa Arab merujuk pada istilah komunikasi ialah *ittishal* lebih menekankan pada makna “ketersambungan pesan”. Dalam *ittishal* jika pesan yang dikirimkan oleh komunikator berlanjut dan bersambung pada komunikan, maka itulah yang disebut komunikasi. Allah Swt juga berkomunikasi kepada umat manusia melalui Al-Qur'an. Sebaliknya, manusia dapat berkomunikasi dengan-Nya melalui ibadah, khususnya dapat dilakukan dengan doa.

Perspektif komunikasi Islam juga menekankan pentingnya mendengarkan dengan penuh perhatian dan empati terhadap pendapat dan perasaan orang lain. Prinsip musyawarah (konsultasi) dalam Islam menggarisbawahi pentingnya memberikan ruang bagi semua pihak untuk berbicara, mengemukakan pendapat, dan bersama-sama mencari solusi yang terbaik dalam setiap keputusan atau masalah yang dihadapi. Dalam konteks komunikasi organisasi, prinsip-prinsip komunikasi Islam juga dapat diterapkan dalam membangun budaya kerja yang inklusif, berorientasi pada keadilan, dan menghargai keragaman. Komunikasi yang didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, keadilan, dan sikap hormat akan membantu menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif.

Prinsip-Prinsip Komunikasi Islam

Prinsip-prinsip komunikasi dalam Islam memiliki kedalaman filosofis dan implikasi praktis yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi dalam konteks Islam bukan sekadar transmisi informasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi serta memperkuat hubungan antara individu dan Tuhan, serta antara individu dengan sesamanya. Prinsip-prinsip ini mencakup segala aspek komunikasi, mulai dari ucapan hingga perilaku, dan berperan penting dalam membentuk interaksi sosial yang sehat dan harmonis.

Perspektif komunikasi dalam Islam memegang peranan yang sangat penting bagi seorang pemimpin, karena mereka tidak hanya menjadi teladan dalam tindakan dan perkataan mereka, tetapi juga bertanggung jawab atas membangun hubungan yang baik dengan orang-orang yang dipimpinnya. Sebagai seorang pemimpin, mereka harus memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi Islam sebagai pedoman dalam menjalankan tugasnya. Ada 6 prinsip komunikasi dalam perspektif Islam:

1. *Qaulan Sadida*: perkataan benar alias tidak dusta
2. *Qaulan Baligha*: ucapan yang lugas, efektif dan tidak berbelit-belit
3. *Qulan Ma'rufa*: perkataan yang baik, santun, dan tidak kasar
4. *Qaulan Karima*: kata-kata yang mulia dan penuh penghormatan
5. *Qaulan Layina*: ucapan lemah-lembut menyentuh hati
6. *Qaulan Maysura*: ucapan dapat mudah dipahami dengan menyenangkan dan tidak menyinggung perasaan (Noname, 2020; Hefni, 2015; Kholil, 2015; Ritonga, 2021; Zakaria, 2016).

Qaulan Sadida. *Qaulan Sadida* artinya perkataan yang benar. Prinsip ini terdapat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa: 9. Artinya: *“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Qaulan Sadida –perkataan yang benar”* (Q.S. 4: 9).

Qaulan Sadidan berarti pembicaraan, ucapan atau perkataan yang benar, baik dari segi substansi (materi, isi dan pesan) maupun redaksi (tata bahasa). Dari segi substansi, komunikasi Islam harus menginformasikan atau menyampaikan kebenaran, faktual, hal yang benar saja, jujur, tidak berbohong, juga tidak merekayasa atau memanipulasi fakta. “*Dan jauhilah perkataan-perkataan dusta*” (Q. S. Al-Hajj: 30). Dari segi redaksi, komunikasi Islam harus menggunakan kata-kata yang baik dan benar, baku, sesuai kaidah bahasa yang berlaku.

Qaulan Baligha. Kata *baligha* berarti tepat, lugas, fasih dan jelas maknanya. *Qaulan Baligha* artinya menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, langsung ke pokok masalah (*to the point*) dan tidak berbelit-belit. Agar komunikasi lebih tepat sasaran, gaya bicara dan pesan yang disampaikan harus disesuaikan dengan intelektualitas komunikan dan menggunakan bahasa yang dimengerti oleh mereka. Artinya: “*Mereka itu adalah orang-orang yang Allah mengetahui apa yang di dalam hati mereka. Karena itu, berpalinglah kamu dari mereka, dan berilah mereka pelajaran, dan katakanlah kepada mereka Qaulan Baligha – perkataan yang berbekas pada jiwa mereka*”. (Q.S. An-Nisa’: 63).

Qaulan Ma’rufa. *Qaulan Ma’rufa* artinya perkataan baik, ungkapan yang pantas, santun, tidak kasar dan tidak menyakitkan atau menyinggung perasaan orang lain. *Qaulan Ma’rufa* juga bermakna pembicaraan yang bermanfaat dan menimbulkan kebaikan. Kata *Qaulan Ma’rufan* disebutkan Allah dalam Q.S An-Nissa: 5 dan 8, Q.S. Al-Baqarah: 235 dan 263, serta Q.S. Al-Ahzab: 32. “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata baik.” (Q.S. An-Nisa:5). “Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (Q.S. An-Nisa:8). “Dan tidak ada dosa bagi kamu memininang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu.

Allah mengetahui bahwa kamu akan mengatakan mereka, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'rif (Q.S. Al-Baqarah: 235). "Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima)" (Q. S Al-Baqarah: 263). "Hai isteri-isteri nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik" (Q.S Al-Ahzab: 32).

Qaulan Karima. *Qaulan Karima* artinya perkataan yang mulia yaitu komunikasi dengan sopan santun disertai rasa hormat kepada orang lain, khususnya pada saat melakukan komunikasi dengan orang tua. "Dan Tuhanmu Telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia" (Q.S. Al – Isra: 23). Dalam konteks komunikasi jurnalistik dan penyiaran, *Qaulan Karima* bermakna menggunakan kata-kata yang santun, tidak kasar, tidak vulgar, dan menghindari teks dan visual "bad taste" yang menimbulkan rasa jijik, muak, ngeri, dan sadis.

Qaulan Layina. *Qaulan Layina* berarti pembicaraan yang lembut dengan suara yang enak didengar dan penuh keramahan, sehingga dapat menyentuh hati. Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* disebutkan, dimaksud *layina* ialah kata-kata sindiran, bukan dengan kata yang terus terang atau lugas, apalagi kasar. "Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah-lembut, Mudah-mudahan ia ingat atau takut". (Q.S. Thaha: 44). Ayat di atas adalah perintah Allah Swt. kepada Nabi Musa dan Harun a.s. agar berbicara lemah-lembut, tidak kasar, kepada Fir'aun.



BAGIAN V

INOVASI KEBIJAKAN PUBLIK

Kebijakan Inovasi Publik

Kebijakan inovasi publik memberikan panduan kepada pemerintah, organisasi dan sektor swasta dalam mempromosikan dan mendukung kegiatan inovasi. Melalui kebijakan yang jelas, pemangku kepentingan memperoleh pemahaman terpadu tentang prioritas inovasi, alokasi sumber daya, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan inovasi yang ditetapkan. Selain itu, kebijakan inovasi dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekosistem inovasi. Hal ini mencakup pembangunan infrastruktur penelitian dan pengembangan, membina kolaborasi antara sektor publik, swasta dan akademisi, serta memberikan insentif dan dukungan bagi para inovator. Jangka panjang kebijakan inovasi berkontribusi dalam mendorong transfer pengetahuan, komersialisasi teknologi, dan penciptaan lapangan kerja.

Sebagaimana dikemukakan Edquist (2004, 2011), jawabannya mungkin berbeda jika kebijakan inovasi dipandang sebagai kebijakan yang mempunyai dampak penting terhadap inovasi. Meskipun istilah inovasi lebih sering digunakan saat ini dibandingkan beberapa dekade yang lalu, inovasi merupakan fenomena yang telah ada sejak zaman umat manusia. Dari perspektif ini, kebijakan inovasi (yaitu kebijakan yang mempengaruhi inovasi) mungkin telah ada selama berabad-abad. Joseph Schumpeter, pendiri teori inovasi, memperkenalkan perbedaan antara penemuan (ide baru tentang bagaimana melakukan sesuatu) dan inovasi (implementasi dalam praktik).

Perspektif ini menunjukkan dua aspek inovasi: kebaruan dan implementasi. Namun, kebaruan tidak selalu berarti “baru bagi dunia”, hal ini juga dapat merujuk pada sesuatu yang baru bagi orang yang menciptakan atau menggunakan inovasi tersebut. Selain itu, hal baru tidak harus inovatif, menyediakan fungsionalitas baru, atau mengganggu praktik yang sudah ada (misalnya mobil tanpa pengemudi). Bagi Schumpeter, alasan utama untuk membedakan penemuan dari inovasi adalah pengakuan bahwa yang penting secara ekonomi dan sosial bukanlah gagasan itu sendiri, namun eksploitasi gagasan tersebut dalam sistem ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, jika kita ingin memaksimalkan kontribusi inovasi terhadap perubahan ekonomi dan sosial, kita tidak cukup hanya fokus pada menjelaskan munculnya sesuatu yang baru, tetapi kita juga perlu memahami secara menyeluruh adopsi dan penggunaan inovasi.

Penekanan pada inovasi sebagai pendorong perubahan ekonomi dan sosial jelas berasal dari Schumpeter. Hal ini termasuk dengan pandangan terhadap inovasi sebagai sebuah fenomena sosial yang hasilnya tidak hanya bergantung dengan terjadi di dalam perusahaan namun juga pada kondisi sosial dan ekonomi lebih luas dari lingkungan (tempat inovasi diperkenalkan). Namun, Schumpeter cenderung memandang lingkungan sebagai hal yang sangat lambat dan menghambat inovasi. Terdapat beberapa orientasi kebijakan, sebagai berikut:

1. Politik berorientasi misi (Ergas, 1986) bertujuan untuk memberikan solusi baru terhadap tantangan spesifik dalam agenda politik yang berhasil dalam praktiknya. Persyaratan agar solusi yang diusulkan dapat dipraktikkan mengharuskan pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan seluruh tahapan proses inovasi ketika merancang dan menerapkan kebijakan (pendekatan luas). Para pembuat kebijakan telah mengadopsi kebijakan-kebijakan tersebut selama beberapa tahun, misalnya untuk tujuan pertahanan, jauh sebelum kebijakan inovasi, atau bahkan penggunaan berbagai terminologi inovasi, menjadi bagian dari kosa kata standar. Langkah-langkah yang

berorientasi pada penemuan lebih terfokus dalam arti berkonsentrasi pada tahap penelitian dan pengembangan/penemuan, sehingga membuka kemungkinan eksploitasi dan penyebaran penemuan di pasar. Langkah-langkah tersebut menjadi populer di banyak negara pada awal periode pasca-Perang Dunia II, didorong oleh keyakinan para pembuat kebijakan pada saat itu terhadap potensi manfaat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat secara keseluruhan (Bush, 1945).

2. Kebijakan berorientasi sistem merupakan kebijakan yang lebih baru dan, seperti istilahnya, fokus pada karakteristik tingkat sistem seperti tingkat interaksi antara berbagai bagian sistem. Se jauh mana beberapa komponen penting dari sistem memerlukan perbaikan atau keterampilan. Perkembangan kebijakan tingkat sistem tersebut dikaitkan dengan munculnya apa yang disebut pendekatan 'sistem inovasi nasional' (NIS) sekitar tahun 1990 dan penerapannya selanjutnya dalam saran kebijakan dan kebijakan oleh Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Evaluasi kebijakan (lihat bagian berikutnya untuk rinciannya). Kebijakan inovasi, dalam arti kebijakan yang mempengaruhi inovasi, terdiri dari berbagai kebijakan (dan instrumen kebijakan) yang diperkenalkan pada waktu berbeda, dengan motif berbeda, dan menggunakan label berbeda.
3. Kebijakan yang berorientasi pada penemuan memiliki fokus yang lebih sempit, dalam artian berkonsentrasi pada tahap penelitian dan pengembangan/penemuan dan membiarkan kemungkinan eksploitasi dan penyebaran penemuan ke pasar. Langkah-langkah tersebut menjadi populer di banyak negara pada tahun-tahun awal setelah Perang Dunia II, didorong oleh keyakinan di antara para pembuat kebijakan pada saat itu bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai potensi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan (Bush, 1945)

Ilmu ekonomi evolusioner, yang mendasari literatur tentang sistem inovasi, menekankan pentingnya peran keseimbangan antara penciptaan

variasi baru. Penemuan/Inovasi dan Pilihan untuk Pembangunan Ekonomi Jangka Panjang (Metcalf, 1998). Meskipun menciptakan variasi adalah sumber pertumbuhan jangka panjang, proses seleksi berkontribusi terhadap efisiensi yang sangat dibutuhkan dengan menghilangkan solusi yang paling tidak menjanjikan. Namun, jika karena alasan tertentu penciptaan keberagaman menurun, sistem perekonomian mungkin akan mengalami stagnasi. Dari perspektif ini, menjaga keseimbangan yang tepat antara penciptaan dan seleksi keanekaragaman muncul sebagai tujuan penting dari kebijakan inovasi.

Sistem inovasi nasional bukan sekadar kerangka pertukaran, namun juga merupakan gudang berbagai sumber daya yang digunakan perusahaan untuk kegiatan inovasi dan menampung berbagai institusi yang mempengaruhi perusahaan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi bergantung pada berbagai faktor, termasuk pengetahuan, keterampilan, sumber daya keuangan, dan permintaan, yang sebagian besar diyakini disediakan oleh negara, oleh karena itu istilah 'negara' digunakan dalam sistem inovasi. Selain itu, penyediaan elemen-elemen yang berbeda ini sering dianggap saling melengkapi dan selalu disebut sebagai fungsi, proses, atau aktivitas dalam literatur sistem inovasi.

Model Proses Keputusan Inovasi

Model proses keputusan inovasi merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana individu atau organisasi membuat keputusan untuk mengadopsi atau menolak suatu inovasi. Model proses keputusan inovasi seperti ini penting bagi pengembangan strategi pemasaran dan komunikasi yang efektif untuk mempromosikan adopsi inovasi oleh pasar atau organisasi target. Dengan memahami tahapan-tahapan dalam proses keputusan ini, produsen atau pengembang inovasi dapat merancang pendekatan yang lebih terarah dan efektif untuk memengaruhi sikap dan perilaku calon pengguna inovasi tersebut. Menurut Roger, proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu:

1. Tahap pengetahuan

Proses pengambilan keputusan inovasi dimulai dari fase pengetahuan, dimana seseorang menyadari akan adanya suatu inovasi dan ingin mengetahui cara kerjanya. Pentingnya pengetahuan dalam hal ini bukan berarti memahami, namun menerima pengetahuan tentang inovasi. Mereka yang mengakui dan menerima inovasi tentunya melakukannya secara proaktif, bukan pasif. Ketika masyarakat sadar akan adanya inovasi dan terbukanya pengetahuan tentang inovasi, aktivitas yang memuaskan keinginan akan pengetahuan tentang inovasi terjadi tidak hanya pada tahap pengetahuan tetapi juga pada tahap-tahap yang lain, dan masih ada hingga tahap konfirmasi. Keinginan untuk belajar tentang aspek spesifik inovasi.

2. Tahap Persuasi

Selama tahap persuasi dalam proses pengambilan keputusan inovasi, masyarakat mengembangkan sikap positif atau negatif terhadap inovasi. Jika pada tahap pengetahuan proses utama aktivitas mental adalah ranah kognitif, maka pada tahap keyakinan ranah afektif atau afektif memegang peranan utama. Orang tidak dapat menikmati inovasi sebelum mereka mempelajarinya terlebih dahulu. Lebih banyak aktivitas mental berperan dalam tahap persuasi ini. Seseorang akan mencoba mempelajari lebih lanjut tentang inovasi dan mencoba menafsirkan informasi yang diterima. Pada tahap ini, informasi dipilih sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik individu. Di sini, karakteristik inovasi berperan dalam mempengaruhi proses pengambilan keputusan inovasi.

Kemampuan untuk memprediksi kemungkinan penerapan inovasi di masa depan juga sangat penting pada tahap persiapan ini. Harus mampu merencanakan penerapan inovasi dalam berpikir berdasarkan kondisi dan situasi yang ada. Untuk memfasilitasi proses mental ini, Anda perlu memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana inovasi akan diterapkan dan, jika mungkin, apa hasil dari inovasi tersebut. Hasil utama dari fase persuasi adalah

memutuskan apakah Anda menyukai inovasi tersebut atau tidak. Hasil tahap persuasi diharapkan dapat menjadi pedoman dalam proses pengambilan keputusan inovasi, dengan kata lain preferensi inovasi dan implementasi inovasi cenderung serasi. Namun kita harus menyadari bahwa masih ada jarak antara sikap dan aktivitas. Orang yang menyukai inovasi belum tentu melakukan inovasi. Ada jarak atau kesenjangan antara sikap terhadap pengetahuan dan penerapannya (praktik).

3. Tahap Keputusan

Tahap keputusan pada proses inovasi terjadi ketika seseorang melakukan suatu aktivitas yang mengarah pada keputusan untuk menerima atau menolak suatu inovasi. Merangkul suatu inovasi berarti menerapkannya sepenuhnya. Menolak berinovasi berarti tidak berinovasi. Orang sering kali menerima suatu inovasi setelah seseorang mencobanya terlebih dahulu. Anda juga dapat mencoba sebagian kecil terlebih dahulu dan melanjutkan secara keseluruhan jika terbukti berhasil sesuai harapan Anda. Namun tidak semua inovasi dapat dipecah menjadi beberapa bagian dan dicoba. Inovasi yang bisa dicoba satu per satu akan lebih cepat diterima. Bisa juga suatu percobaan dilakukan oleh beberapa orang dan yang lain sangat puas dengan hasil percobaan temannya.

Perlu dilihat pada kenyataannya setiap tahap dalam proses keputusan inovasi dapat terjadi penolakan inovasi. Misalnya penolakan dapat terjadi pada awal tahap pengetahuan, dapat juga terjadi pada tahap persuasi, mungkin terjadi setelah konfirmasi, dan tahap lainnya. Ada dua macam penolakan inovasi yaitu: (a) *penolakan aktif* artinya penolakan inovasi setelah melalui proses mempertimbangkan untuk menerima inovasi atau mungkin sudah mencoba lebih dahulu, tetapi keputusan akhir menolak inovasi, dan (2) *penolakan pasif* artinya penolakan inovasi dengan tanpa pertimbangan sama sekali. Dalam pelaksanaan difusi inovasi antara: pengetahuan, persuasi, dan keputusan inovasi sering berjalan bersamaan. Satu dengan yang



BAGIAN VI

KOMUNIKASI ORGANISASI

Komunikasi Organisasi

Organisasi adalah instrumen manajemen yang mengkoordinasikan sumber daya manusia melalui pola struktur formal tugas dan wewenang. Organisasi mengikat, mengarahkan, dan mengoordinasikan hubungan antara bidang wewenang dan tanggung jawab. Sebagai komunikator, manajer mempunyai inisiatif untuk memajukan seluruh aktivitas organisasi perusahaan dagang. Inisiatif diimplementasikan dalam bentuk pesan. Setelah karyawan menerima pesan dari manajemen, mereka diharapkan untuk bertindak berdasarkan isi pesan tersebut. Peserta bervariasi dalam tingkat keterampilan dan keahlian yang mereka bawa ke organisasi. Oleh karena itu, penataan struktur dalam suatu organisasi harus disesuaikan dengan tingkat kompetensi yang hampir selalu disertai dengan perbedaan kekuasaan dan tuntutan ekonomi (Sugeng Widiarto, 2018).

Komunikasi organisasi merupakan hal mendasar bagi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan strategisnya. Ini adalah pertukaran informasi, ide, dan pandangan antara berbagai anggota organisasi, mulai dari pemimpin hingga karyawan tingkat bawah. Komunikasi yang efektif dalam suatu organisasi berperan penting dalam membangun budaya kerja yang inklusif, transparan, dan fokus pada tujuan bersama. Salah satu aspek penting dalam komunikasi korporat adalah kelancaran dan keterbukaan arus informasi. Hal ini memastikan bahwa semua anggota organisasi memiliki pemahaman yang jelas tentang visi, misi, tujuan, dan tanggung jawab organisasi. Oleh karena itu, komunikasi yang

efektif dapat mengurangi ambiguitas, mencegah kesalahpahaman, dan meningkatkan koordinasi antar departemen dalam suatu organisasi. Selain itu, komunikasi organisasi juga berfungsi untuk membangun hubungan yang kuat antara manajemen dan karyawan. Ketika karyawan merasa didengarkan dan dihargai, mereka cenderung lebih termotivasi dan proaktif dalam mencapai tujuan perusahaan, penting bagi pimpinan organisasi untuk memastikan jalur komunikasi terbuka baik dari atas ke bawah maupun sebaliknya.

Komunikasi organisasi adalah jenis komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi tertentu. Penting untuk dicatat bahwa untuk organisasi dengan struktur formal dan informal, elemen ketiga dalam rantai komunikasi adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi organisasi melibatkan berbagai proses pengiriman dan penerimaan pesan yang terjadi dalam kelompok formal dan informal dalam suatu organisasi. Komunikasi formal merupakan jenis komunikasi yang menitikberatkan pada kepentingan organisasi dan disetujui oleh organisasi itu sendiri. Ini berisi informasi tentang fungsi, produktivitas, dan tugas yang perlu dilakukan dalam perusahaan. Contohnya ialah konferensi pers dan surat seperti memo, pedoman, dan pernyataan. Komunikasi informal adalah bentuk komunikasi yang dapat diterima secara sosial di mana anggota individu diberi prioritas di atas organisasi secara keseluruhan. Proses komunikasi terjadi terus menerus setiap hari, baik dalam interaksi antar individu maupun dalam kelompok dan organisasi. Ketika perusahaan dan organisasi terlibat dalam proses komunikasi, mereka juga harus fokus pada pertimbangan konsekuensi dan kemungkinan hasil.

Dampak organisasi mencakup dampak perilaku seperti perubahan tindakan, langkah, dan kinerja individu. Beberapa ahli mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai ekspresi dan interpretasi pesan antar unit komunikasi yang merupakan bagian integral dari suatu organisasi. Teori komunikasi menyatakan bahwa anggota organisasi melaksanakan tugasnya secara efektif, setia pada nilai-nilai organisasi, meningkatkan semangat kerja dalam organisasi, bekerja secara kreatif, dan memunculkan

ide-ide inovatif untuk memajukan organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dipengaruhi oleh proses komunikasi (Kartini et al, 2024). Komunikasi yang efektif menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan transparan di dalam instansi pemerintah. Hal ini sangat penting untuk memfokuskan kreativitas dan keterlibatan staf kantor. Oleh karena itu, organisasi memerlukan komunikasi yang efektif. Komunikasi organisasi sangat penting dalam organisasi.

Demikian pula komunikasi organisasi mempengaruhi perilaku individu dalam kehidupan, termasuk dengan siapa mereka berbicara, siapa yang mereka sukai, bagaimana perasaan mereka, apa yang ingin mereka capai, dan bagaimana mereka beradaptasi dengan lingkungan organisasi. Sementara itu, tentu saja perusahaan mempunyai insentif untuk mendapatkan keuntungan dari bisnisnya. Berdasarkan hal tersebut, perusahaan membangun unit bisnis dan menetapkan tujuan. Pada saat ini, prinsip etika dalam operasional bisnis dituntut untuk diterapkan sepenuhnya di dalam perusahaan, dalam menentukan tujuan bisnis perusahaan, membangun jaringan dengan mitra, dan dalam upaya ekspansi pengelola perusahaan itu sendiri (Slamet Bambang Riono et al., 2020).

Mendapatkan pemahaman nyata tentang apa yang sedang terjadi, para pemimpin perlu berkomunikasi dengan bawahannya untuk memastikan bahwa lembaga tersebut tidak terkesan formal dan untuk mencegah munculnya pola hubungan yang bergantung pada kekuasaan dengan karyawan. Kerja sama dalam bekerja sangat diperlukan, dan untuk menghindari suasana yang menakutkan maka perlu diciptakan lingkungan yang membuat seluruh karyawan merasa percaya diri, mampu bekerja secara profesional, menunjukkan semangat kerja karyawan. Anda harus berusaha mengembangkan karyawan Anda dan tidak menyalahkan mereka, namun Anda harus bisa membenarkan (memperbaiki) kesalahan mereka. Selain itu, terdapat kesadaran dan kemauan kolektif untuk berubah melalui perubahan pola pikir (*mind set*), pola sikap (*attitude set*), dan pola perilaku (*behavioral set*), dan pada akhirnya perubahan

budaya (*cultural change*). Budaya organisasi memegang peranan penting dalam menentukan tumbuh kembang suatu organisasi.

Organisasi dapat tumbuh dan berkembang karena budaya organisasi yang ada dalam organisasi dapat merangsang semangat kerja sumber daya manusia para anggotanya dan semakin mengembangkan kerja organisasi (Slamet Bambang Riono et al., 2020). Hasil kerja belahan otak kiri adalah keterampilan berpikir analitis dan verbal, dan hasil kerja belahan otak kanan adalah keterampilan berpikir nonverbal yang holistic. Robert Ornstein (1988) dalam (Kuswarno, 2001) menjelaskan cara kerja belahan otak kiri pada umumnya bersifat kognitif dengan penekanan pada pemikiran analitis, rasional, logis dan linguistic. proses pemrosesan informasi yang bersifat linguistik, linier, temporal dan berurutan. Sedangkan fungsi otak kanan umumnya bersifat emosional, irasional, intuitif, artistik, global, konkrit, dan relasional merupakan proses pengolahan informasi nonverbal, spasial dan simultan.

Secara umum dapat dikatakan bahwa belahan otak kiri membagi (mendiversifikasi) dunia, sedangkan belahan otak kanan membagi dunia menjadi unit-unit relasional. Atas dasar ini, realitas dunia terbagi menjadi dua bagian. Salah satunya adalah pandangan dunia atomistik (mempelajari cara kerja otak kiri) yang selanjutnya disebut Tipe 1 Yang lainnya adalah pandangan dunia holistik (mempelajari cara kerja otak kanan). Tipe 2 (tipe 1 adalah fungsi otak belahan kanan), selanjutnya disebut tipe 1.

Hubungan antar individu dalam suatu organisasi berdasarkan perjanjian kontrak. Pandangan holistik mengasumsikan dunia ialah suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dan saling berinteraksi, dan bahwa setiap individu merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem. Fungsi individu tidak dapat diidentifikasi berdasarkan independensinya, namun harus dikaitkan dengan prinsip-prinsip organisasi secara keseluruhan. Pandangan holistik ini mengabaikan perbedaan individu dan menekankan kesadaran kelompok. Timbal balik dan saling ketergantungan adalah kuncinya (Kuswarno, 2001).

Komunikasi organisasi bisa dimaknai sebagai penyajian dan interpretasi pesan antar unit komunikasi menjadi bagian suatu organisasi tertentu. Komunikasi organisasi merupakan proses menciptakan makna dari interaksi yang menciptakan, mempertahankan, dan mengubah organisasi. Struktur organisasi cenderung mempengaruhi komunikasi, sehingga komunikasi antara bawahan dan manajer sangat berbeda dengan komunikasi antar rekan kerja. Dalam organisasi, pemimpin adalah komunikator.

Pemimpin yang efektif umumnya memiliki keterampilan komunikasi efektif yang memungkinkan mereka melibatkan, pada tingkat yang lebih besar atau lebih kecil, orang-orang yang dipimpinnya. Komunikasi verbal yang baik dapat dicapai melalui bahasa yang ramah, sopan, dan baik hati. Komunikasi nonverbal terjadi melalui komunikasi nonverbal konsep-konsep abstrak seperti kebenaran, keadilan, etika, agama, dan lain-lain, misalnya melalui bahasa tubuh

Gaya Kepemimpinan

Pengaruh gaya kepemimpinan dan budaya organisasi dalam suatu perusahaan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kepemimpinan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain melalui komunikasi langsung maupun tidak langsung. Hal ini dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang tersebut agar memahami sepenuhnya, mengenali dan bersedia mengikuti keinginannya. Pemimpin diharapkan memiliki keterampilan tersebut dan menggunakannya dengan baik. Di perusahaan, gaya kepemimpinan dicari dan diadopsi untuk memungkinkan manajer berinovasi dan menyesuaikan semua fungsi perusahaan secara tepat dan akurat. Oleh karena itu, administrator (misalnya manajer) dituntut untuk mencapai tingkat integrasi yang tinggi dan membangkitkan semangat kerja di kalangan karyawan. Pemimpin yang efektif mampu membangun hubungan yang langgeng. Gaya kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku orang lain. Pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang sesuai dengan keterampilan dan kepribadiannya (Marzuki, 2002).

Gaya kepemimpinan yang efektif adalah gaya yang memungkinkan karyawan bekerja secara efektif dan efisien, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan karyawan terhadap kinerja kerjanya dan membantu organisasi mencapai tujuan yang diinginkan. Peran seorang pemimpin sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan suatu organisasi. Setiap manajer berupaya memaksimalkan, menggerakkan, dan membimbing potensi karyawan di lingkungannya, meskipun polanya berbeda-beda pada setiap orang. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan gaya kepemimpinan masing-masing pemimpin (Vahera, 2021).

Berbeda dengan definisi lainnya, kepemimpinan mengacu pada koordinasi pemikiran dan kerja masing-masing anggota agar masing-masing anggota bertindak mandiri dalam pekerjaannya terutama dalam pengambilan keputusan, serta mempercepat tujuan-tujuan sebelumnya untuk mencapai tujuan. metode menggerakkan, mengarahkan, dan mempengaruhi. Wahyudi (2017) menetapkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan proses, kemampuan mempengaruhi aktivitas kelompok untuk mencapai tujuan bersama Ansory (2018).

1. Fungsi Kepemimpinan Menurut Zainal, Hadad, & Ramly, (2017) secara operasional dikelompokkan ke dalam lima fungsi pokok kepemimpinan, yaitu:
2. Fungsi intruksi Komunikasi satu arah, pemimpin sebagai komunitaor merupakan penentu kebijakan agar keputusan dilakukan secara efektif dan mampu momotivasi orang lain untuk mengikuti perintah.
3. Fungsi konsultasi Komunikasi dua arah, dimana penetapan keputusan pemimpin perlu mempertimbangkan kepada pegawainya untuk memperoleh masukan berupa umpan balik (feedback) sehingga keputusan yang diambil akan lebih mudah mendapatkan dukungan.
4. Fungsi partisipasi Pemimpin harus berusaha mengaktifkan keikutsertaan pegawainya baik dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaannya. Partisipasi bukan berarti bertindak bebas tetapi lebih terarah dalam kerja sama dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain.

5. Fungsi delegasi Memberikan limpahan wewenang atau menetapkan keputusan baik dalam konteks persetujuan ataupun tidak dari pimpinan. Sedangkan orang yang di percaya penerima delegasi diyakini merupakan tangan kanan pimpinan.
6. Fungsi pengendalian Kepemimpinan yang efektif drhingga mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah untuk tercapainya tujuan bersama.

Menurut (Kartono, 2008), konsep syarat kepemimpinan hendaknya selalu berkaitan dengan tiga hal penting: (1) Kepemimpinan adalah mempengaruhi bawahan dan menyuruh mereka melakukan sesuatu; (2) Kewenangan adalah keunggulan, keunggulan, dan prioritas. Artinya, orang dapat memimpin orang lain, sehingga orang tersebut mengikuti pemimpinnya dan bersedia melakukan tindakan tertentu, (3) Kompetensi berarti segala daya, kesanggupan, kekuatan, keterampilan atau kemampuan teknis atau sosial yang melebihi kemampuan anggota biasa.

Gaya kepemimpinan manajer adalah cara seorang pemimpin mengarahkan bawahannya dengan tujuan mempengaruhi anggota dan bawahannya untuk mencapai tujuan. Menurut (Supardo, 2006), kepemimpinan adalah proses mempengaruhi pemimpin dan pengikutnya untuk mencapai tujuan suatu kelompok, organisasi, atau masyarakat. Berdasarkan definisi tersebut, kepemimpinan adalah suatu istilah yang cocok untuk mempengaruhi aktivitas individu atau kelompok agar orang-orang bekerja secara efektif dan efisien dalam situasi tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Semua pemimpin dapat mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, dan tidak perlu satu gaya kepemimpinan lebih baik atau lebih buruk dari yang lain. Kriteria yang sering digunakan untuk mengkategorikan gaya kepemimpinan yang ada mencakup tugas-tugas yang dianggap perlu oleh seorang pemimpin dan tugas-tugas yang diinginkan oleh seorang pemimpin untuk dimiliki oleh bawahannya. Menurut (Hasibuan, 2007), terdapat beberapa gaya kepemimpinan, yaitu:

1. kepemimpinan otoriter; Kepemimpinan otoriter terjadi ketika mayoritas mutlak kekuasaan atau wewenang tetap berada di tangan pemimpin, atau ketika pemimpin tunduk pada sistem otoritas terpusat. Keputusan dan kebijakan hanya ditentukan oleh pemimpin sendiri, dan bawahan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan ketika memberikan saran, inspirasi, dan pertimbangan.
2. Kepemimpinan Partisipatif, Kepemimpinan partisipatif berarti menunjukkan kepemimpinan secara persuasif, menciptakan kerja sama yang harmonis, dan mengedepankan loyalitas dan partisipasi di antara bawahan. Pemimpin memotivasi bawahannya untuk merasa bahwa merekalah pemilik perusahaan.
3. Kepemimpinan delegatif, yaitu pemimpin mendelegasikan seluruh wewenang kepada bawahan. Dengan cara ini, bawahan bebas mengambil keputusan dan menerapkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan terkait pekerjaan mereka. Manajer tidak peduli tentang bagaimana bawahannya mengambil keputusan atau melakukan pekerjaannya; semuanya terserah pada mereka.

Iklim Organisasi

Komunikasi organisasi dilatarbelakangi oleh tujuan-tujuan komunikator yang disampaikan secara sadar dan melibatkan banyak kepentingan tergantung dari penggunaan media komunikasi yang efektif, sehingga terciptalah komunikasi organisasi yang efektif, tidak lepas dari adanya komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal terjadi secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi eksternal kemudian terjadi melalui pemberian informasi, diskusi, dan kolaborasi. Hal ini termasuk berbicara dalam pesan yang dapat dimengerti (Reardon, 2007).

Komunikasi dalam suatu organisasi mencakup kegiatan penyampaian dan penerimaan pesan dari atasan kepada bawahan dan lain-lain, serta mencakup komunikasi internal vertikal, horizontal, dan diagonal. Untuk mencapai komunikasi organisasi yang efektif, bentuk komunikasi berbeda-beda tergantung pada sifat kegiatan organisasi. Naisbitt (2004) menyatakan bahwa komunikasi organisasi vertikal adalah tindakan komunikasi yang

berupa perintah, peringatan, pujian, dan petunjuk atas seluruh aktivitas yang dikomunikasikan untuk mencapai tujuan organisasi.

Komunikasi internal organisasi horizontal merupakan kegiatan komunikasi yang dimediasi antara manajer, pegawai, dan unit kerja dalam membahas kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Komunikasi organisasi internal yang horizontal. Artinya, komunikasi antara atasan dan bawahan serta unit kerja untuk memahami pesan yang dikirim dan diterima. Pahami pentingnya komunikasi dalam organisasi Anda. Hal ini mencakup unsur pimpinan, bawahan, dan unit kerja sebagai bagian integral dalam komunikasi organisasi. Efektivitas unsur-unsur komunikasi dalam suatu organisasi dalam mengkomunikasikan permasalahan organisasi memudahkan organisasi dalam memecahkan permasalahan dalam mencapai tujuan organisasi (Rossy, 2008). Selain itu, komunikasi di luar organisasi dapat dipandang sebagai komunikasi antar organisasi, seperti kegiatan umpan balik untuk memberikan informasi, kegiatan kolaboratif, dan dialog antar organisasi.

Nuhui (2005) menyatakan bahwa bentuk komunikasi organisasi eksternal antar organisasi dalam berbagai bentuk umpan balik informasi biasanya adalah bahwa masing-masing organisasi saling menyediakan materi dan materi yang diperlukan untuk mendorong kegiatan organisasi. Selain itu, sebagai bagian dari komunikasi eksternal, diperlukan kerjasama antar berbagai kepentingan untuk saling meningkatkan dan melengkapi kegiatan organisasi, dan setiap organisasi mendorong penyelesaian permasalahan organisasi dan berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikannya.

Aspek komunikasi organisasi pertama-tama adalah komunikasi eksternal yang digunakan oleh anggota organisasi untuk berinteraksi dengan orang-orang di luar organisasi. Komunikasi eksternal menyampaikan pesan lingkungan organisasi dan organisasi yang terlibat. Sistem pesan eksternal digunakan untuk mengkomunikasikan informasi dari lingkungan organisasi dan memberikan informasi lingkungan kepada organisasi. Dan kedua, komunikasi internal adalah pesan-pesan yang

dipertukarkan antar anggota organisasi dan pola interaksi manusia yang terjadi di dalam dan di antara anggota organisasi. Seiring pertumbuhan ukuran dan kompleksitas organisasi Anda, atau berkembang melintasi geografi dan zona waktu, Anda memerlukan program komunikasi internal untuk membantu Anda membangun tim. Artinya komunikasi internal dan eksternal suatu organisasi penting untuk mengetahui bagaimana komunikasi tercipta dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi.

Budaya organisasi merupakan salah satu hal yang memegang peranan penting dalam kelangsungan suatu organisasi. Iklim organisasi terdiri dari persepsi unsur-unsur organisasi dan pengaruh unsur-unsur tersebut terhadap organisasi. Redding (1972) menyatakan bahwa lingkungan komunikasi organisasi adalah kualitas pengalaman obyektif organisasi terhadap lingkungan internalnya, termasuk persepsi anggota organisasi terhadap pesan dan hubungan antara pesan dan peristiwa yang terjadi dalam organisasi.

Menurut Suminar (1999:85), lingkungan komunikasi organisasi adalah lingkungan di mana organisasi mempunyai kepercayaan, memberikan dan mendorong kebebasan mengambil risiko, serta menjaga akuntabilitas anggota organisasi dalam melaksanakan tugasnya secara terbuka dan penuh. Pada prinsipnya lingkungan komunikasi suatu organisasi merupakan suatu bentuk kegiatan semua orang yang berkomunikasi dalam organisasi tersebut. Biasanya komunikasi antara manajer dengan bawahan, komunikasi antara bawahan dengan rekan kerjanya, dan komunikasi antara organisasi dengan organisasi lain (Lesmana, 2006).

Iklim komunikasi dalam suatu organisasi diartikan sebagai sekelompok orang yang berkomunikasi dengan cara mengirimkan pesan, mengirim dan menerima informasi, memberikan saran, dan memimpin diskusi untuk menghasilkan umpan balik guna mencapai kesamaan pemahaman dan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu, iklim komunikasi suatu organisasi tidak lepas dari komunikasi interpersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok kecil, perilaku terbuka manajer dan bawahan, serta komunikasi massa. Iklim komunikasi organisasi adalah

keadaan keterkaitan evolusi berbagai pesan yang dikirim melalui saluran dari sumber pesan ke penerima pesan. Biasanya, organisasi memiliki pemangku kepentingan sebagai penerima informasi dan penyedia informasi untuk mengembangkan kemampuan organisasi yang efektif dalam memproses pesan dan saluran sebagai umpan balik dan feedforward dari dampak komunikasi terhadap perkembangan organisasi lebih lanjut (Spitzberg dan Cupach, 2009).

Komunikasi suatu organisasi merupakan suatu kondisi tujuan dari mereka yang berkomunikasi dan secara sadar diungkapkan dalam penggunaan media komunikasi yang efektif, yang mengandung banyak manfaat. Hasilnya adalah lingkungan komunikasi organisasi yang efektif. Hal ini tidak lepas dari adanya komunikasi internal dan komunikasi eksternal dimungkinkan.

Komunikasi internal terjadi secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi eksternal kemudian terjadi melalui pemberian informasi, diskusi, dan kolaborasi. Hal ini mencakup percakapan dengan pesan yang jelas (Reardon, 2007). Menurut Higgins (1994: 477-478), ada empat faktor yang mendukung dan menghambat lingkungan komunikasi organisasi: kepemimpinan, perilaku staf, kelompok kerja, dan organisasi eksternal. Kepemimpinan, pada dasarnya setiap tindakan yang diambil oleh kepemimpinan, berdampak pada lingkungan komunikasi suatu organisasi dalam berbagai cara, termasuk aturan organisasi, kebijakan dan prosedur mengenai masalah kepegawaian, pembagian kompensasi, gaya komunikasi, metode motivasi, teknik, dan masalah disiplin. Interaksi antara manajemen dan kelompok, interaksi antar kelompok, perhatian terhadap permasalahan yang dihadapi departemen HR dari waktu ke waktu, dan kebutuhan kepuasan dan kesejahteraan departemen SDM.

Menciptakan budaya organisasi penting untuk mengatasi hubungan organisasi. Budaya organisasi yang berbeda ini dapat mempengaruhi perilaku karyawan dalam organisasi. Perilaku karyawan dalam suatu organisasi berbeda-beda. Motivasi Kerja, Keterikatan Kerja, Keterlibatan Kerja, Disiplin Kerja, Kepuasan Kerja, Stres Kerja, Sikap Kerja, Semangat

Kerja, Perilaku Konflik. Budaya perusahaan merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai faktor, termasuk budaya tempat kerja, kepemimpinan, komunikasi, dan keseimbangan kehidupan kerja. Membangun budaya organisasi yang sehat dan produktif memerlukan partisipasi aktif seluruh anggota organisasi serta perhatian terus-menerus dari manajemen dan pimpinan organisasi.

Aspek iklim organisasi yang mempengaruhi perilaku pegawai dalam suatu organisasi biasanya dibagi menjadi dua bidang, fisik dan non fisik. Aspek fisik meliputi kondisi lingkungan fisik tempat kerja, sedangkan aspek non fisik meliputi kondisi lingkungan sosial, penerapan sistem manajemen, produk, konsumen, pelanggan dan pelanggan yang dilayani, serta fisik dan psikologis yang memuat konteks. Status anggota organisasi dan budaya organisasi. Dimensi iklim organisasi menurut Litwin dan Stringer (1968) ada 6 (enam) dimensi yang diperlukan yakni:

1. Struktur. Struktur merefleksikan perasaan bahwa karyawan diorganisasi dengan baik dan mempunyai definisi yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab mereka. Meliputi posisi karyawan dalam perusahaan.
2. Standar-standar. Mengukur perasaan tekanan untuk memperbaiki kinerja dan derajat kebanggaan yang dimiliki karyawan dalam melakukan pekerjaannya dengan baik. Meliputi kondisi kerja yang dialami karyawan dalam perusahaan.
3. Tanggung jawab. Merefleksikan perasaan karyawan bahwa mereka menjadi pimpinan diri sendiri dan tidak pernah meminta pendapat mengenai keputusannya dari orang lain. Meliputi kemandirian dalam menyelesaikan pekerjaan.
4. Pengakuan. Perasaan karyawan diberi imbalan yang layak setelah menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Meliputi imbalan atau upah yang terima karyawan setelah menyelesaikan pekerjaan.
5. Dukungan. Merefleksikan perasaan karyawan mengenai kepercayaan dan saling mendukung yang berlaku dikelompok kerja. Meliputi hubungan dengan rekan kerja yang lain.

6. **Komitmen.** Merefleksikan perasaan kebanggaan dan komitmen sebagai anggota organisasi. Meliputi pemahaman karyawan mengenai tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.

Iklim organisasi merujuk pada kondisi atau atmosfera psikologis yang ada di dalam suatu organisasi. Ini mencakup berbagai aspek seperti budaya, nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, dan sikap yang mendominasi lingkungan kerja. Sebagaimana alam iklim yang dapat berubah-ubah, iklim organisasi juga dapat mengalami perubahan seiring waktu, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Salah satu komponen penting dari iklim organisasi adalah budaya kerja. Budaya kerja mencakup norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku yang diterima dan dipraktikkan oleh anggota organisasi. Budaya kerja yang positif, misalnya yang didasarkan pada kejujuran, kerjasama, dan inovasi, dapat menciptakan iklim yang mendukung kinerja yang baik dan kesejahteraan karyawan.

Komunikasi Vertikal

Komunikasi vertikal dalam konteks organisasi merujuk pada aliran informasi, arahan, atau umpan balik antara berbagai tingkat hierarki dalam struktur organisasi. Ini mencakup komunikasi dari manajemen tingkat atas ke bawah untuk memberikan arahan, kebijakan, atau informasi kepada karyawan tingkat bawah, serta komunikasi dari karyawan tingkat bawah ke manajemen tingkat atas untuk menyampaikan laporan, masukan, atau pertanyaan. Komunikasi vertikal memainkan peran krusial dalam menjaga koordinasi, efektivitas, dan kohesi dalam operasi organisasi.

Komunikasi vertikal juga memainkan peran penting dalam membangun hubungan yang kuat antara manajemen dan karyawan. Ketika karyawan merasa didengar, dihargai, dan memiliki saluran untuk menyampaikan masukan atau kekhawatiran mereka, mereka cenderung lebih terlibat secara positif dalam pekerjaan mereka. Ini dapat mengarah pada peningkatan produktivitas, retensi karyawan, dan kepuasan kerja secara keseluruhan. Komunikasi vertikal membantu memastikan keselarasan dan konsistensi dalam arah dan prioritas organisasi. Melalui

komunikasi vertikal, manajemen tingkat atas dapat menyampaikan arahan strategis dan kebijakan kepada karyawan, memastikan bahwa semua anggota organisasi memahami tujuan dan tanggung jawab mereka dalam mencapai tujuan tersebut. Ini membantu menciptakan budaya kerja yang terorganisir dan terfokus pada pencapaian hasil yang diinginkan.

Komunikasi vertikal juga berperan dalam memfasilitasi implementasi kebijakan dan inisiatif baru dalam organisasi. Dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada karyawan tentang bagaimana melaksanakan tugas-tugas mereka dengan efektif, manajemen tingkat atas dapat memastikan bahwa kebijakan dan program organisasi dijalankan dengan baik dan sesuai dengan visi dan nilai-nilai organisasi. Yang membedakan komunikasi organisasi dengan komunikasi ekstra organisasi adalah struktur hierarki yang menjadi ciri khas masing-masing organisasi. Misalnya, sebagai presiden sebuah perusahaan tekstil, saya memerintahkan seorang pedagang sayur keliling untuk mengisi faktur penjualan barang ketika barang tersebut dilepaskan. Mungkin saudagar itu akan menuduhku sebagai orang asing. Berbeda jika permintaan dikirimkan ke manajer penjualan saya dengan instruksi agar pengeluaran barang untuk perusahaan tekstil harus dicantumkan dalam faktur penjualan. Secara tradisional, struktur organisasi dipandang sebagai jaringan yang melaluinya informasi mengalir. Oleh karena itu, isi komunikasi (informasi) yang berkaitan sebagai berikut (Kuswarno, 2001):

1. Informasi yang berisi instruksi, perintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan selalu dikomunikasikan ke bawah melalui rantai komando dari seseorang kepada orang lain yang berada di bawah hierarkinya langsung.
2. Informasi yang berisi laporan, pertanyaan, permohonan, selalu dikomunikasikan ke atas melalui rantai komando dari seseorang kepada atasannya langsung.

Kedua bentuk informasi tersebut termasuk dalam dimensi vertical. Mengacu pada aspek komunikasi antara atasan dan bawahan, dan mewakili struktur organisasi melalui hubungan kerja antara atasan dan



BAGIAN VII

TELAAH KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK

Kajian ini membahas implementasi program “Bupati Ngantor di Desa” sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dalam mewujudkan Labura Hebat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian dapat mendalami persepsi dan pengalaman berbagai pihak yang terlibat, termasuk petugas pemerintah desa, warga masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) memiliki peran yang sangat penting dalam mengarahkan pembangunan daerah menuju visi dan misi yang telah ditetapkan. Dalam konteks Labuhanbatu Utara, RPJMD menjadi landasan strategis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan program-program prioritas yang akan dilaksanakan selama periode tertentu.

Program “Bupati Ngantor di Desa” menjadi bagian integral dari strategi pembangunan Labuhanbatu Utara Hebat yang tercantum dalam RPJMD. Melalui program ini, pemerintah daerah bertujuan untuk mendekatkan diri kepada masyarakat pedesaan, meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan publik, serta memperkuat partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, program “Bupati Ngantor di Desa” merupakan wujud nyata dari komitmen pemerintah daerah untuk melaksanakan visi dan misi yang tercantum dalam RPJMD.

Pembuatan dokumen RPJMD untuk menjembatani Visi dan Misi yang ditawarkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Utara terpilih terhadap permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah yang

berpedoman pada regulasi terkait, kinerja masa lalu dan kemampuan keuangan daerah. Adapun tujuannya adalah (RPJMD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026):

1. Mengimplementasikan RPJPD Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2005-2025 dalam mempercepat pembangunan Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan karakteristik dan kemampuan keuangan daerah;
2. Menjabarkan Visi, Misi dan program kerja Bupati/Wakil Bupati Labuhanbatu Utara ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan daerah yang lebih rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026;
3. Menyediakan acuan baku bagi seluruh Perangkat Daerah (Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan Kabupaten yang akan dilaksanakan dengan sumber dana APBD Kabupaten Labuhanbatu Utara, APBN dan sumber dana lainnya;
4. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi pembangunan baik antar Perangkat Daerah, antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lain, antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, serta antara Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan Pemerintah;
5. Sebagai tolok ukur untuk menilai kinerja dan mengevaluasi kinerja setiap Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
6. Menciptakan iklim pemerintahan daerah yang partisipatif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan Kabupaten yang berkelanjutan.

Pengaitan antara RPJMD dengan program “Bupati Ngantor di Desa” juga tercermin dalam keselarasan antara prioritas pembangunan yang diidentifikasi dalam RPJMD dengan kebutuhan nyata masyarakat pedesaan. Melalui program ini, pemerintah daerah tidak hanya mengikuti arahan

RPJMD, tetapi juga merespons secara langsung aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tingkat desa. Hal ini menunjukkan bahwa program “Bupati Ngantor di Desa” bukan hanya sekadar implementasi formal dari RPJMD, tetapi juga merupakan upaya konkret untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, program “Bupati Ngantor di Desa” dapat dipandang sebagai instrumen penting dalam mewujudkan visi Labuhanbatu Utara Hebat yang tertuang dalam RPJMD.

Melalui program “Bupati Ngantor di Desa”, pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target yang terukur, tetapi juga pada pemenuhan hak-hak dasar dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Sebagai implementasi langsung dari arahan dalam RPJMD, program “Bupati Ngantor di Desa” menjadi salah satu pilar utama dalam membangun Labuhanbatu Utara yang lebih baik, inklusif, dan berdaya saing.

Selain itu, penelitian dapat mengeksplorasi bagaimana pemerintah setempat di Labura mengelola komunikasi publik terkait kebijakan-kebijakan yang mereka terapkan. Hal ini sekaligus dapat mendapatkan hasil langsung dari masyarakat terkait pelayanan yang diberikan kepada mereka. Penulis memiliki fokus pada penelitian mengenai kebijakan komunikasi di Labura lebih tepatnya kebijakan komunikasi dari program “Bupati Ngantor di Desa” dalam mewujudkan Labuhanbatu Utara Hebat. Penelitian ini lebih menarik dikarenakan mengaitkan perspektif komunikasi islam dalam penyampaian pesan serta informasi yang disampaikan oleh Bupati dan OPD mengenai pelaksanaan kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” (Bung Desa).

Pemilihan desa di Labuhanbatu Utara untuk Program “Bupati Ngantor di Desa” merupakan langkah yang strategis dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan memperluas cakupan pembangunan di wilayah tersebut. Dalam pemilihan desa, beberapa faktor menjadi pertimbangan utama, termasuk potensi dan tantangan yang dimiliki oleh setiap desa.

Pemilihan desa juga mempertimbangkan aspek geografis. Desa-desanya yang tersebar di berbagai kecamatan dan memiliki keragaman kondisi geografis, seperti desa di dataran rendah, pegunungan, atau pinggir sungai, dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang dampak program ini terhadap berbagai konteks lokal. Faktor-faktor ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan lokasi yang tepat untuk implementasi program “Bupati Ngantor di Desa”.

Pertimbangan geografis seperti letak desa, kondisi topografi, dan aksesibilitas menjadi faktor utama. Misalnya, desa-desa yang berada di daerah terpencil atau sulit dijangkau oleh sarana transportasi umum seringkali mengalami tantangan dalam akses terhadap layanan pemerintah. Dengan memilih desa-desa semacam itu sebagai lokasi program, pemerintah dapat memberikan solusi konkret terhadap kendala geografis tersebut. Dengan kehadiran “Bupati Ngantor di Desa”, diharapkan akses terhadap layanan publik bisa diperluas dan ditingkatkan. Program ini dapat memberikan solusi yang tepat dan relevan untuk memperbaiki akses layanan publik di desa-desa Labuhanbatu Utara. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh wilayah kabupaten, serta menjadikan Labura sebagai daerah yang lebih inklusif dan berdaya.

Pemilihan desa untuk program “Bupati Ngantor di Desa” tidak didasarkan pada alasan khusus tertentu yang bersifat subjektif, melainkan lebih kepada upaya untuk memastikan bahwa setiap kecamatan memiliki perwakilan yang setara dalam kegiatan tersebut. Dalam konteks ini, setiap desa yang dipilih menjadi tempat kunjungan Bupati merupakan representasi dari keragaman geografis, demografis dan kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Setiap kecamatan yang ada di Labuhanbatu Utara memiliki peran dan karakteristiknya sendiri dalam struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, memilih minimal satu desa dari setiap kecamatan merupakan langkah yang strategis untuk memastikan bahwa program ini merangkul semua lapisan masyarakat dan mendengarkan beragam suara dan aspirasi.

Selain itu, pemilihan desa yang mewakili masing-masing kecamatan juga memastikan kegiatan Kabupaten Ngantor di desa-desa tersebut merata di wilayah Labuhanbatu Utara. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dan pemerataan pembangunan, dimana setiap daerah mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian dan pelayanan dari pemerintah daerah. Mempertimbangkan keberagaman dan kebutuhan di setiap kecamatan, program ini lebih mampu mengatasi permasalahan dan tantangan masyarakat. Melalui pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” dapat membantu memperkuat kedekatan antara pemerintah daerah dan masyarakat luas, karena setiap kunjungan Bupati memberikan peluang interaksi langsung dan dialog bermakna.

Program “Bupati Ngantor di Desa” (Bung Desa) juga melibatkan OPD sebagai bagian dari upaya memperkuat kolaborasi antarlembaga dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat. Kerja sama ini bertujuan untuk mencari solusi konkrit yang menjawab kebutuhan dan tuntutan masyarakat desa. Hadirnya Bupati dan OPD di tingkat desa, masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengkomunikasikan secara langsung berbagai permasalahan yang mereka hadapi, memberikan masukan dan mendiskusikan berbagai program pembangunan yang dilaksanakan di desanya. Hal ini menciptakan suasana partisipatif dan transparan dalam pengambilan keputusan, sehingga kebijakan yang dikembangkan menjadi lebih tepat dan mampu memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa.

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian dan analisis terkait penerapan program “Bupati Ngantor di Desa” (Bung Desa) di Labuhanbatu Utara dalam mewujudkan Labuhanbatu Utara Hebat sesuai dengan visi misi yang telah diusung oleh Bupati saat ini. Berikut visi misi Bupati dan Wakil Bupati Labura untuk mewujudkan Labura Hebat dengan sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan religious. Sedangkan misinya ialah:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia Masyarakat Labuhanbatu Utara berbasiskan pada pendidikan dan pelatihan formal maupun non-formal.
2. Melanjutkan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, partisipatif dan bertanggung jawab berbasis pengembangan teknologi.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pembangunan infrastruktur berbasis perencanaan yang sesuai dengan kondisi geografis kewilayahan.
4. Membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang produktif dan berkelanjutan. Menghadirkan nilai-nilai keagamaan dalam seluruh kegiatan sosial kemasyarakatan.

Kabupaten Labuhanbatu Utara menjadi subjek penelitian karena merupakan salah satu pelopor terutama terkait dengan pelaksanaan program atau regulasi “Bupati Ngantor di Desa”. Program ini menghadirkan serangkaian inovasi dalam tata kelola pemerintahan daerah yang menjadikan Labuhanbatu Utara sebagai sasaran penelitian yang menarik bagi para akademisi dan praktisi kebijakan.

Penelitian tentang implementasi program ini dapat memberikan wawasan mendalam tentang dinamika politik lokal, partisipasi masyarakat, dan efektivitas pelayanan publik di tingkat desa. Penulis dapat menggali berbagai aspek terkait dengan pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa”, mulai dari proses perencanaan dan implementasi hingga dampak yang dirasakan oleh masyarakat setempat. Analisis mendalam tentang regulasi yang mendasari program ini juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kerangka kerja yang mengatur pelaksanaannya dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilannya.

Penelitian ini juga dapat memperkaya literatur akademik terkait dengan tata kelola pemerintahan daerah, partisipasi masyarakat dan inovasi kebijakan di tingkat lokal. Temuan dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam merumuskan rekomendasi

kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program “Bupati Ngantor di Desa”, baik di Labuhanbatu Utara maupun di berbagai daerah lainnya.

Bab ini akan membahas beberapa aspek yang relevan dengan program “Bupati Ngantor di Desa”, yang telah menjadi inisiatif penting dalam pelayanan publik di Labuhanbatu Utara. Adapun bab ini diawali dengan tujuan dan sasaran dari program “Bupati Ngantor di Desa” dalam kaitannya untuk mewujudkan Labuhanbatu Utara Hebat. Tujuan dan sasaran program dilihat berdasarkan regulasi atau peraturan yang telah dibuat oleh Bupati dan disesuaikan dengan peraturan terkait dalam penerapan program “Bupati Ngantor di Desa”. Program ini diinisiasi dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap layanan pemerintah, serta untuk lebih memahami kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh penduduk desa.

Mengeksplorasi faktor-faktor pendukung yang memainkan peran penting dalam merangsang keberhasilan program tersebut. Hal ini mungkin meliputi dukungan penuh dari pemerintah daerah. Pengidentifikasian dan pemahaman terhadap faktor-faktor ini penting untuk menghadapi tantangan dan merencanakan strategi mitigasi yang tepat.

Mengulas berbagai model komunikasi yang diterapkan dalam pelaksanaan program ini mungkin mencakup komunikasi langsung antara Bupati dan masyarakat desa, penggunaan media sosial atau teknologi informasi lainnya, serta keterlibatan aktif dari perangkat desa dalam menyampaikan pesan-pesan program. Pemilihan model komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan pesan-pesan program dapat disampaikan dengan jelas dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Analisis mendalam tentang hasil program terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat, peningkatan akses terhadap layanan publik, serta perubahan sosial dan ekonomi yang mungkin timbul sebagai akibat dari program ini, serta bagaimana program “Bupati Ngantor di Desa” dapat diperkuat dan ditingkatkan sebagai langkah-langkah yang

dapat diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan berkelanjutan dan keberlanjutan program tersebut dalam jangka panjang.

Sasaran Daerah Birokrasi

Penyelenggaraan pelayanan publik melalui kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” (Bung Desa) membawa dimensi baru dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat. Kegiatan ini memberikan pelayanan langsung dari pusat pemerintahan hingga tingkat desa serta memfasilitasi warga untuk berinteraksi langsung dengan Bupati dan OPD. Sebagai bagian dari kegiatan ini, masyarakat desa memiliki akses langsung terhadap berbagai layanan publik seperti pengelolaan kependudukan, kesehatan, pendidikan dan perencanaan pembangunan. Penempatan Bupati Ngantor di suatu desa dapat membuat proses pengendalian penduduk menjadi lebih efisien dan cepat. Masyarakat desa akan mempunyai kesempatan untuk mendaftar, memperoleh informasi terkait identitas, atau memproses dokumen administrasi tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke kantor pusat pemerintah. Hal ini tidak hanya mengurangi upaya logistik bagi masyarakat desa tetapi juga mempercepat keseluruhan proses pengelolaan.

Program “Bupati Ngantor di Desa” dinilai efektif dalam mempermudah masyarakat mengenai pelaksanaan pelayanan publik. Lebih dari sekadar layanan-layanan dasar, kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” juga membuka pintu untuk mendengarkan aspirasi masyarakat dan membuka pintu untuk menggali potensi lokal. Interaksi langsung ini menciptakan ruang partisipatif dimana warga desa dapat berkontribusi dalam proses perencanaan pembangunan.

Keberlanjutan kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat desa. Melalui kegiatan “Bupati Ngantor di Desa”, pelayanan publik menjadi tidak hanya melibatkan secara fisik namun juga menjadi sarana membangun keakraban emosional dan partisipatif antara pemerintah daerah dan masyarakat desa. Mempertahankan dan mengembangkan kegiatan tersebut dapat memperkuat landasan

pemerintahan yang kerakyatan dan mendukung kepentingan rakyat. Selain itu, dengan pelaksanaan program tersebut Bupati dalam melihat potensi-potensi dari sumber daya secara langsung baik sumber daya manusia maupun alam yang terdapat di Desa. Pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” bermanfaat dan berguna bagi masyarakat untuk mempermudah admisitrası masyarakat itu sendiri disampaikan oleh Sekda Labuhanbatu Utara melalui wawancara, “Untuk mempermudah masyarakat dalam administrasi, kebijakan dan perizinan. Selanjutnya untuk melihat secara langsung Pak Bupati terkait permasalahan-permasalahan di desa, serta potensi dasar dari sumber daya yang ada,” Sekda Labuhanbatu Utara, Muhamad Suaib (Wawancara, 12 September 2023).

Sasaran dari pelaksanaan program Bung Desa dinilai tepat terutama bagi masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara, hal ini dikarenakan dengan adanya program tersebut banyak dari elemen masyarakat yang terbantu dalam berbagai urusan pelayanan publik seperti pengurusan administrasi kependudukan, layanan kesehatan dan lainnya. Maka dari itu, Bupati Labuhanbatu Utara merumuskan kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” dengan membuat surat keputusan dan peraturan untuk membuat pelaksanaan “Bupati Ngantor di Desa” (Bung Desa) lebih struktur dan terarah saat pelaksanaanya.

Penataan struktur dalam suatu organisasi harus disesuaikan dengan tingkat kompetensi yang hampir selalu disertai dengan perbedaan kekuasaan dan tuntutan ekonomi (Sugeng Widiarto, 2018). Maka dari itu, Bupati Labuhanbatu Utara memainkan peran sentral dalam pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa”. Salah satu langkah penting yang diambil oleh bupati adalah pembentukan panitia pelaksanaan untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan lancar dan efektif.

Pembentukan panita untuk pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” untuk Kabupaten Labuhanbatu Utara dibentuk pada tahun 2021 melalui Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 414/227/DPMD/2021 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” Kabupaten Labuhanbatu Utara. Surat keputusan ini

menetapkan Bupati dan Wakil Bupati sebagai pengarah dan setiap OPD harus merencanakan, mempersiapkan dan membuka stand pelayanan publik ditempat pelaksanaan kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” baik pelayanan teknis maupun pembinaan.

Bupati memberikan landasan hukum dan kelembagaan yang kuat untuk pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa”. Selanjutnya pada tahun 2022 melalui Peraturan Bupati Labuhan Batu Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pelayanan publik melalui program “Bupati Ngantor di Desa”, pelaksanaan kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” lebih terarah karena kejelasan pelaksanaan kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” di Labuhan Batu Utara (Labura) tercermin dalam serangkaian peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten dan daerah setempat. Tujuan dari pelaksanaan ini sesuai dengan peraturan tersebut ialah (Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 28, 2022):

1. Memberikan pelayanan dan informasi langsung kepada masyarakat terkait dengan pelayanan yang diperlukan;
2. Memberikan pelayanan prima yang cepat, efisien dan transparan, dan tidak dipungut biaya; dan
3. Mendekatkan Pemerintah Daerah dengan masyarakat dan memperpendek rentang kendali.

Program “Bupati Ngantor di Desa” dilaksanakan sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan dengan mengikutsertakan SKPD yang menyelenggarakan urusan terkait pelayanan. Sasaran dari Peraturan Bupati adalah terwujudnya sinergi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan publik. Peraturan ini juga dapat mengidentifikasi jenis-jenis pelayanan yang akan ditawarkan, termasuk administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, atau sektor-sektor lainnya. Dengan demikian, peraturan ini menjadi panduan bagi pemerintah desa dan aparatur pemerintahan dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan tersebut. Pemilihan sasaran pada program “Bupati Ngantor di Desa” sudah tepat dikarenakan banyak masyarakat yang terbantu dengan program tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Desa Simpang 4, Erwin Perdamean “Sasaran dari program bungdesa sangat tepat, karena dengan

adanya bungdesa banyak masyarakat yang terbantu seperti pengurusan administrasi kependudukan, layanan kesehatan dan lain sebagainya yang prosesnya terbilang cepat dan tanggap dari pada langsung ke tempat layanan masyarakat di kabupaten,” kata Kepala Desa Simpang 4, Erwin Perdamean (Wawancara, 7 Oktober 2023).

Pada dasarnya Bupati membuat peraturan terkait pelaksanaan “Bupati Ngantor di Desa” berlandaskan beberapa peraturan. Berikut merupakan beberapa peraturan yang menjadi landasan dalam pembuatan peraturan tentang pelaksanaan pelayanan publik melalui program “Bupati Ngantor di Desa”, ialah (Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 28, 2022):

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123
 11. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1715);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara 115);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 111);
17. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 464);
18. Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 469).

Ditetapkannya beberapa peraturan untuk perencanaan dan tujuan dari program “Bupati Ngantor di Desa” akan menjadi lebih jelas dan tepat sasaran. Peraturan-peraturan tersebut menciptakan kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek pelaksanaan kegiatan, sehingga memberikan landasan yang kokoh bagi pelaksanaan program-program tersebut oleh pemerintah daerah.

Peraturan yang mengatur jenis layanan publik yang diberikan selama pelaksanaannya memberikan panduan yang jelas bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Desa. Hal ini mencakup pelayanan administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan sektor-sektor lain yang dapat diakses langsung oleh masyarakat desa. Dengan begitu, kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” bukan hanya menjadi acara seremonial, tetapi juga membawa manfaat konkret bagi masyarakat.

Pentingnya peraturan yang dibuat Bupati ini juga tercermin dalam mekanisme partisipasi warga dalam mengikuti pelaksanaan “Bupati Ngantor di Desa”. Landasan hukum tersebut memberikan panduan bagaimana masyarakat dapat terlibat secara aktif dan efektif dalam memanfaatkan pelayanan yang diberikan serta dapat bertemu langsung dengan Bupati untuk menyampaikan aspirasinya. Maka dari itu, Partisipasi masyarakat yang terstruktur dapat memberikan ruang bagi masyarakat desa untuk menyampaikan aspirasinya, berkontribusi, dan menyampaikan kebutuhannya yang sebenarnya.

Landasan peraturan tidak hanya menjamin kejelasan hukum, namun juga menciptakan fokus dan tujuan program “Bupati Ngantor di Desa”. Dibuatnya Peraturan Bupati sebagai panduan, program ini dapat dilaksanakan dengan lebih efisien dalam menanggapi kebutuhan masyarakat dan memberikan dampak positif yang lebih besar di tingkat desa. Dengan peraturan untuk program “Bupati Ngantor di Desa” dapat berjalan dengan lancar dan mendapatkan dukungan yang kuat dari masyarakat. Sosialisasi yang efektif, partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan yang inklusif, serta tindak lanjut yang transparan dan konsisten akan memastikan antusiasme masyarakat sebanding dengan upaya persiapan dan pelaksanaan program tersebut. Antusiasme masyarakat mengenai program “Bupati Ngantor di Desa” disampaikan oleh Muhammad Asril terutama untuk layanan pembuatan KTP dan kesehatan. “Masyarakat sangat antusias menanti acara bungdesa, mengingat banyaknya pelayanan masyarakat yang bisa diakses oleh masyarakat, terutama pembuatan KTP

dan Cek kesehatan,” Asisten II Pemkab Labuhanbatu Utara, Muhammad Asril mengungkapkan (Wawancara, 12 September 2023).

Antusiasme masyarakat juga tercermin dari dukungannya terhadap tujuan program untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat. Masyarakat merasa dihargai dan didengarkan oleh pemerintah daerah sehingga menciptakan hubungan yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan program ini tidak hanya terletak pada partisipasi fisik masyarakat, namun juga pada rasa kepemilikan dan keterlibatan emosional dalam proses tata Kelola.

Kesuksesan dan antusiasme masyarakat terhadap program “Bupati Ngantor di Desa” dapat diukur dari semakin besarnya tuntutan terhadap keterlibatan Bupati dalam kegiatan desa. Masyarakat berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi kegiatan sehari-hari dan memberikan ruang interaksi langsung, pemecahan masalah dan pertukaran ide antara pemerintah daerah dan masyarakat desa.

Tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan dan mendukung upaya pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di tingkat desa. Antusias masyarakat pada program “Bupati Ngantor di Desa” didukung oleh pernyataan informan 4 yang mengatakan bahwa pada saat pelaksanaan Bung Desa di Desa Simpang Empat masyarakat yang hadir sangat banyak. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa masyarakat desa datang dengan berbagai keperluan, baik untuk mendapatkan layanan administrasi kependudukan, kesehatan, maupun pendidikan.

Kehadiran yang begitu masif ini menciptakan suasana keramaian yang positif dan penuh semangat di seluruh area kegiatan. Banyaknya masyarakat yang hadir dalam pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” menunjukkan bahwa kegiatan ini bukan sekedar pelayanan publik, tetapi suatu kegiatan komprehensif yang memerlukan keterlibatan aktif yang mendorong warga dalam pembangunan daerah. Situasi ini menciptakan kesan bahwa pemerintah daerah adalah jantung dari

masyarakatnya, mendengarkan dan memberikan tanggapan langsung terhadap kebutuhan dan keinginan mereka, dibandingkan hanya duduk di belakang meja. melainkan hadir di tengah-tengah masyarakat, mendengarkan, dan memberikan tanggapan langsung terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka. “Pas pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” atau Bung Desa kemarin rame kali yang datang, disitu keliatan antusias masyarakat untuk bertemu dengan Bupati sama nikmati pelayanan yang ada,” Kepala Bapeda Labuhanbatu utara, Muhammad Ihkwan lubis (Wawancara, 12 September 2023).

Pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” telah berhasil mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan baik. Program ini tidak hanya menjadi serangkaian acara seremonial, tetapi lebih merupakan inisiatif nyata untuk membawa pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat desa. Salah satu tujuan utama dari program ini adalah menciptakan aksesibilitas yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengakses layanan publik dan berinteraksi langsung dengan Bupati.

Surat Ash-Shaff (Surah 61) Ayat 4 berbicara tentang pentingnya solidaritas dan persatuan dalam masyarakat. Ayat tersebut menyatakan: “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka adalah bangunan yang disusun kokoh”. Ayat ini menggambarkan umat Muslim yang bersatu padu dan berperang di jalan Allah dengan tertib dan teratur, sebagaimana bangunan yang disusun rapi dan kokoh. Dari sini, kita dapat memahami pentingnya kerjasama, disiplin dan koordinasi dalam menjalankan tugas dan misi yang diemban. Dalam konteks program “Bupati Ngantor di Desa”, Ayat 4 Surat Ash-Shaff mengajarkan pentingnya kesatuan dan kerjasama dalam menjalankan program tersebut.

Ayat ini juga mengandung pesan tentang pentingnya kekompakan dan kerja sama dalam menghadapi tantangan, yang juga merupakan prinsip yang mendasari teori difusi inovasi. Teori Difusi Inovasi yang dikembangkan oleh Everett M Rogers menjelaskan bagaimana berbagai inovasi muncul di berbagai bidang dari waktu ke waktu dan bagaimana

inovasi tersebut ada karena diterima oleh komunitas yang lebih luas. Inovasi sendiri diartikan oleh Rogers (2003) sebagai suatu ide, aktivitas atau objek yang mengandung unsur kebaruan. Kebaruan yang disebutkan di sini dilihat berdasarkan tanggapan individu. Jika suatu ide tampak baru bagi seseorang, maka ide tersebut dapat digolongkan sebagai inovasi.

Pada ayat ini, menjelaskan konsep barisan yang teratur digambarkan dengan difusi inovasi, di mana inovasi atau perubahan baru diterima dan diterapkan secara sistematis dan terorganisir. Barisan yang teratur dalam ayat tersebut mencerminkan prinsip-prinsip penting dalam teori difusi inovasi, seperti keberlanjutan, komunikasi efektif dan pengorganisasian yang baik, serta penting untuk memiliki kelompok dan komunitas yang terorganisir dan berkomitmen untuk bersama-sama merangkul perubahan. Sedangkan, konsep berjuang di jalan Allah juga dapat diartikan sebagai semangat atau tekad yang kuat untuk memperjuangkan kebaikan dan kebenaran. Semangat yang dimaksud dapat mewakili tekad dan keberanian untuk melaksanakan perubahan meskipun ada tantangan dan hambatan.

Pada penyelenggaraan program ini, tujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di desa dicapai dengan baik. Masyarakat desa memiliki kesempatan untuk mengurus dokumen-dokumen administratif, menerima informasi terkait identitas dan mendapatkan layanan lainnya tanpa harus bepergian jauh ke pusat pemerintahan. Hal ini tidak hanya mengurangi beban logistik bagi masyarakat, tetapi juga mempercepat dan meningkatkan efisiensi proses administratif.

Kegiatan ini telah dilaksanakan di berbagai desa yang mewakili setiap kecamatan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah untuk mendekatkan diri dengan seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” sudah dimulai tahun 2021 hingga 2023, seperti yang sudah penulis paparkan pada sub bab sebelumnya. Implementasi program “Bupati Ngantor di Desa” di berbagai lokasi menunjukkan bahwa kegiatan ini bukan sekedar konsep namun efektif

dilaksanakan. Dampak positifnya terlihat dari tingginya antusiasme dan partisipasi masyarakat di setiap lokasi sehingga tercipta pola hubungan yang erat antara pemerintah daerah dengan masyarakat desa. Keseragaman implementasi ini menjadi bukti nyata

Program ini sudah terlaksana sebanyak 19 kali di Kabupaten Labura, dimana pelaksanaannya dimulai pada tanggal 18 Januari 2021 di Kecamatan Marbau tepatnya di Desa Simpang Empat. Penerapan Program “Bupati Ngantor di Desa” merupakan salah satu kegiatan berkelanjutan untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat pedesaan. Program tersebut telah dilaksanakan sebanyak 19 kali dan terbukti menjadi wadah bagi bupati dan OPD (organisasi perangkat masyarakat) untuk menjawab langsung keinginan, kebutuhan dan permasalahan masyarakat desa. Pada tahun 2023, program ini akan dikembangkan lebih lanjut dan mengunjungi empat desa lagi. Penambahan ini menandakan komitmen yang lebih kuat dari pemerintah daerah untuk mencakup lebih banyak wilayah dan memastikan bahwa semua desa memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam program ini.

Pada setiap kunjungannya, Bupati dan rombongan tidak hanya berinteraksi langsung dengan masyarakat, namun juga memberikan pelayanan publik secara langsung, diantaranya berbagai kegiatan seperti pencatatan pengelolaan kependudukan, pelayanan kesehatan, distribusi kebutuhan pokok dan berbagai pelayanan sosial ekonomi lainnya. Implementasi program ini juga akan memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat pedesaan. Masyarakat merasa dihargai dan didengarkan oleh pemerintah setempat sehingga menimbulkan rasa percaya dan kedekatan antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu, hadirnya layanan langsung di pedesaan membuat masyarakat mudah mengakses layanan publik tanpa harus menempuh jarak jauh ke kota.

Penerapan Program “Bupati Ngantor di Desa” berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan hubungan pemerintah-masyarakat, dan mendorong pembangunan kawasan pedesaan Labuan Batu Utara yang inklusif dan berkelanjutan. Komitmen

dari Pemerintah Labuhanbatu Utara untuk memberikan pelayanan yang terbaik melalui program “Bupati Ngantor di Desa” sejalan dengan visi misi Bupati dalam visi mewujudkan Labura Hebat, program ini merupakan salah satu kegiatan konkrit untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat desa dan membangun hubungan yang lebih erat dan saling mendukung.

Program ini bukan sekadar rangkaian acara seremonial, melainkan upaya tulus mendekatkan pemerintah kepada masyarakat desa. Salah satu tujuan utama program ini adalah memberikan kemudahan akses masyarakat terhadap layanan publik dan berinteraksi langsung dengan para bupati. Pelaksanaan program ini memiliki tujuan untuk peningkatan pelayanan pengelolaan kependudukan di Desa dapat tercapai sepenuhnya. Masyarakat desa mempunyai kesempatan untuk mengurus dokumen administrasi, memperoleh informasi terkait identitas, dan menerima layanan lainnya tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke kantor pusat pemerintahan. Hal ini tidak hanya mengurangi beban logistik masyarakat, tetapi juga mempercepat proses pengelolaan dan meningkatkan efisiensi.

Penerapan Program “Bupati Ngantor di Desa” dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan strategis yaitu mendukung pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif di tingkat desa. Program ini merupakan contoh bagus bagaimana tindakan pemerintah dapat merespons dan secara langsung memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat. Program “Bupati Ngantor di Desa” ini juga sejalan dengan cita-cita “Labura Hebat” dengan sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan religious.

Antusias masyarakat yang hadir telah berhasil mewujudkan visi Labura yang lebih inklusif melalui pelibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Dialog langsung antara Bupati dan masyarakat desa menciptakan ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat lokal mengomunikasikan keinginan dan kontribusi mereka secara langsung kepada pemimpin lokal. Oleh karena itu, program tidak hanya memberikan pelayanan publik tetapi juga menjadi sarana meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan di daerah. Program ini juga memungkinkan Bupati dan OPD melihat sumber daya yang mungkin dikembangkan di setiap Daerah. Selain itu, tujuan program “Bupati Ngantor di Desa” untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik menciptakan fondasi yang kuat untuk mewujudkan Labura sebagai daerah yang unggul.

Penyediaan layanan administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan langsung di Desa membantu masyarakat mendapatkan akses yang lebih mudah dan cepat terhadap pelayanan dasar. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah aspek kunci dalam mewujudkan Labura hebat.

Pentingnya program ini juga terlihat dalam upaya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Melalui dialog dan koordinasi yang erat, program ini menciptakan landasan kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat desa. Keselarasan ini memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian target-target pembangunan yang diinginkan untuk mewujudkan Labura sebagai daerah yang tangguh dan berkembang. Dengan demikian, pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” bukan hanya mencapai tujuan operasional sehari-hari, tetapi juga menjadi salah satu instrumen yang mendukung visi besar “Labura Hebat”.

Program “Bupati Ngantor di Desa” ini bukan hanya menyatukan pemerintah daerah dan masyarakat desa, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan menjadi langkah progresif dalam memastikan bahwa pelayanan publik dan reformasi birokrasi tidak hanya menjadi retorika, melainkan nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di tingkat desa. Sesuai dengan apa yang disampaikan Ergas (1986) mengenai kebijakan yang berorientasi pada misi memiliki tujuan untuk memberikan solusi baru terhadap tantangan spesifik dalam agenda politik yang berhasil dalam praktiknya. Persyaratan agar solusi yang diusulkan dapat dipraktikkan mengharuskan pembuat kebijakan untuk

mempertimbangkan seluruh tahapan proses inovasi ketika merancang dan menerapkan kebijakan (pendekatan luas).

Program “Bupati Ngantor di Desa” merupakan salah satu kebijakan yang inovatif dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan ini menandai perubahan paradigma dalam cara pemerintah berinteraksi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di tingkat desa. Program “Bupati Ngantor di Desa” bertujuan untuk memberikan solusi baru terhadap tantangan spesifik yang dihadapi masyarakat di tingkat desa. Salah satu tujuan utama program ini adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik di pedesaan.

Memberikan layanan pemerintah secara langsung di desa-desa, program ini bertujuan untuk mengurangi jarak fisik dan emosional antara pemerintah dan masyarakat sehingga memudahkan dalam mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan daerah. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keinginan, kebutuhan dan kontribusinya secara langsung kepada pemerintah daerah melalui dialog dan diskusi langsung antara bupati dan pemangku kepentingan desa. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan aktual masyarakat mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Inovasi dalam program ini juga terlihat dari pendekatannya yang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan. Dibandingkan dengan model pelayanan publik konvensional yang seringkali bersifat sentralistik dan kurang responsif terhadap kebutuhan lokal, program “Bupati Ngantor di Desa” menawarkan pendekatan yang lebih terdesentralisasi dan responsif. Hal ini memungkinkan pemerintah untuk lebih cepat merespons dan mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat di tingkat desa.

Pendukung dan Penghambat Kebijakan Publik

Program “Bupati Ngantor di Desa” merupakan salah satu inisiatif utama pemerintah daerah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Namun sebagaimana halnya program pembangunan, pelaksanaannya tidak terlepas dari sejumlah faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami faktor-faktor ini secara mendalam guna mengoptimalkan pelaksanaan dan dampak positif program tersebut.

Faktor pendukung adalah faktor-faktor yang turut menyukseskan Program “Bupati Ngantor di desa”. Dukungan penuh dari pemerintah daerah, khususnya bupati dan pengurus Organisasi Perangkat Daerah (OPD), menjadi landasan kuat bagi kelancaran pelaksanaan program ini. Selain itu, partisipasi aktif dan dukungan masyarakat desa juga merupakan kunci keberhasilan program ini, sehingga memastikan penerimaan yang luas dan penyerapan yang positif. Namun di sisi lain, Program “Bupati Ngantor di Desa” juga menghadapi beberapa faktor penghambat yang mungkin menghambat tercapainya tujuan.

Keterbatasan sumber daya keuangan dan infrastruktur dapat menimbulkan hambatan besar terhadap penyediaan layanan yang komprehensif dan berkualitas bagi masyarakat desa. Selain itu, faktor budaya dan kebutuhan masyarakat juga dapat mempengaruhi pelaksanaan program ini. Program “Bupati Desa Ngantor” mempunyai potensi besar dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik di desa-desa Labuhanbatu Utara. Namun banyak kendala infrastruktur dan aksesibilitas yang masih menjadi kendala utama dalam pelaksanaan program ini, dan salah satu kendala terbesar yang sering dihadapi adalah terkait transportasi.

Desa-desa yang ada di Labuhanbatu Utara sulit diakses oleh transportasi umum seringkali menyulitkan tim pelaksana program untuk mencapai tujuannya. Infrastruktur jalan yang buruk di beberapa daerah dapat memperlambat perjalanan dan menyulitkan menjangkau desa-desa

terpencil. Seperti yang diungkapkan oleh Sekda Labura (Wawancara, 12 September 2023) “Untuk saat ini daerah-daerah yang jauh terjangkau, karena labura tidak memiliki daerah tertinggal. Tetapi lebih kepada daerah yang susah dijangkau. Transport kurang, prasarana yang ga ada”. Hasil wawancara dengan Sekda Labura terkait aksesibilitas Labuhanbatu Utara dari Kabupaten di Sumatera Utara yang tidak terdapat wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), Labuhanbatu Utara memiliki beberapa wilayah yang tergolong paling jauh. Daerah-daerah ini mungkin menghadapi banyak hambatan dalam hal aksesibilitas, infrastruktur, dan layanan publik. Namun perbedaan kondisi tersebut tidak sebesar wilayah 3T lainnya di Indonesia yang mungkin menghadapi tantangan lebih besar dalam hal pembangunan dan pelayanan publik. Meskipun secara umum tidak ada wilayah di Labuan Batu Utara yang berstatus 3T, namun beberapa wilayah terjauh mungkin akan menghadapi banyak tantangan terkait aksesibilitas dan pembangunan. Penting bagi pemerintah daerah untuk terus memperhatikan dan meningkatkan akses dan layanan publik di bidang tersebut untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat merasakan manfaat pembangunan berkelanjutan.

Kurangnya sarana dan prasarana merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh sebagian masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam mengakses pelayanan publik. Terutama di daerah-daerah yang terpencil atau terjauh dari pusat pemerintahan, sarana dan prasarana yang minim seringkali menjadi penghalang utama bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan publik. Informan 1, Sekda Labuhanbatu Utara mengungkapkan faktor penghambat dalam Implementasi program seringkali terkendala di desa-desa selain kendala jarak, di beberapa desa masih belum memiliki fasilitas dasar seperti perkantoran, akses listrik yang memadai, dan fasilitas komunikasi yang memadai. Hal ini dapat berdampak pada efisiensi dan efektivitas tim pelaksana dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat desa. Di banyak desa, jaringan internet tidak stabil atau tidak tersedia sama sekali. Hal ini menyulitkan tim pelaksana program untuk mengakses informasi, berkomunikasi dengan otoritas terkait, dan melakukan berbagai aktivitas yang memerlukan

konektivitas internet. Kurangnya akses terhadap teknologi informasi juga dapat menghambat implementasi program digital dan penggunaan inovasi teknologi untuk meningkatkan efisiensi layanan.

Sebagian masyarakat masih menghadapi hambatan besar terkait jarak dan transportasi. Desa-desa terpencil yang jauh dari pusat pemerintahan seringkali sulit dijangkau dengan transportasi umum. Jalan yang sulit dijangkau dapat membuat perjalanan menjadi sulit dan melelahkan, terutama bagi mereka yang harus melakukan perjalanan jauh setiap harinya. Jika kendala jarak dan transportasi tidak diatasi dengan baik, beberapa desa mungkin akan terpinggirkan atau kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Untuk itu dapat semakin memperlebar kesenjangan akses terhadap layanan publik antara desa-desa yang lebih mudah diakses dan desa-desa terpencil. Masyarakat di desa-desa terpencil mungkin akan lebih sulit menerima layanan pemerintah yang sama dibandingkan masyarakat di desa-desa yang lebih mudah diakses. Hal ini dipertegas dengan kutipan dari hasil wawancara, “Penghambatnya yaitu, konektivitas. Termasuk transportasi, sarana dan prasarana pendukung untuk di kantor-kantor, jaringan, internet,” kata Sekda Labura (Wawancara, 12 September 2023).

Maka dari itu, program “Bupati Ngantor di Desa” hadir untuk mengatasi beberapa kendala yang dihadapi masyarakat. Program “Bupati Ngantor di Desa” dirancang sebagai upaya mengatasi hambatan transportasi, jarak, dan faktor lain yang membatasi akses pelayanan publik di pedesaan. Desa-desa yang terjauh atau paling terpencil dari pusat pemerintahan seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan pemerintah yang memadai. Program ini merupakan solusi inovatif yang melibatkan pemerintah secara langsung dengan masyarakat dan mengurangi hambatan geografis dan jarak yang sering menghambat akses.

Program “Bupati Ngantor di Desa” dengan “memindahkan” sementara kantor bupati di desa-desa sehingga masyarakat dapat mengakses layanan pemerintah tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke kota atau pusat

layanan lainnya. Hal ini tidak hanya mengurangi waktu dan biaya perjalanan, namun juga beban fisik dan psikologis yang seringkali harus ditanggung oleh masyarakat pedesaan ketika mengakses layanan publik di luar wilayahnya. Selain itu, kehadiran bupati dan OPD di desa juga memberikan kesempatan masyarakat untuk berinteraksi langsung dengan pemerintah setempat.

Masyarakat dapat mengkomunikasikan permasalahan, keinginan dan kebutuhan mereka secara langsung kepada pihak berwenang terkait, sehingga memungkinkan mereka untuk merespon kebutuhan masyarakat desa dengan lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, program ini tidak hanya untuk menyediakan layanan publik yang lebih mudah diakses, tetapi juga untuk meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Program “Bupati Ngantor di Desa” merupakan instrumen penting untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan publik di pedesaan. Dengan menempatkan pemerintah secara langsung di mata masyarakat lokal, program ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan geografis dan sosial serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

Selain faktor penghambat yang dapat menjadi tantangan dalam pelaksanaan Program Bupati Ngantor di desa, terdapat pula beberapa faktor pendukung yang turut menunjang keberhasilan. Salah satu faktor pendukungnya adalah tingginya komitmen pemerintah daerah, khususnya para bupati dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan besarnya antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan program Bupati Ngantor di Desa.

Antusiasme masyarakat terhadap program “Bupati Ngantor di Desa” tercermin dari partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan tersebut. Masyarakat tidak hanya hadir sebagai pengunjung saja, namun juga sebagai partisipan dan pelaku aktif yang terlibat dalam berbagai aspek kegiatan. Melalui partisipasi aktif dan dukungan luas dari masyarakat, program ini dapat terus berkembang dan terus memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan desa-desa di Kecamatan

Labuhanbatu Utara. Faktor pendukung inilah yang berperan penting dalam mensukseskan program Bupati Ngantor di desa. Keterlibatan pemerintah daerah, partisipasi aktif masyarakat setempat, kerjasama antar pemangku kepentingan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, maka program ini akan terus berkembang dan membawa manfaat nyata dalam peningkatan kesejahteraan dan kemajuan desa-desa di Kecamatan Labuhanbatu Utara. Asisten II Pemkab Labuhanbatu Utara, Muhammad Asril mengungkapkan “Faktor pendukung nya adalah masyarakat sangat antusias dengan bungdesa, jika bungdesa dilakukan di desa tersebut masyarakat menyambut dengan senang hati”. (Wawancara, 12 September 2023).

Partisipasi aktif masyarakat dalam memberikan masukan terhadap Program Bupati Ngantor di desa-desa berperan penting dalam memperkuat keberhasilan dan relevansi program. Masyarakat memiliki pengetahuan luas mengenai situasi dan tantangan yang dihadapi desa. Oleh karena itu, pendapat yang mereka berikan dapat menjadi sumber informasi berharga bagi pemerintah dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat.

Mendengarkan keinginan dan saran masyarakat desa, pemerintah dapat memastikan bahwa program yang dilaksanakan dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Walaupun pelaksanaan program Bupati Ngantor di Desa dirasa oleh Kepala Desa Simpang 4 sudah sangat baik dan mendapatkan banyak manfaat bagi masyarakat, namun pelaksanaan program ini tidak lepas dari masukan oleh kalangan masyarakat. “Acara bungdesa sangat baik dan banyak sekali manfaat bagi masyarakat, tentu bungdesa harus berkelanjutan. Masukan untuk bungdesa adalah supaya kedepannya, acara ini dapat dilakukan disetiap desa tidak memilih-milih desa mana yang akan dilakukan bungdesa,” Kepala Desa Simpang 4 (Wawancara, 7 Oktober 2023).

Memberikan masukan untuk pelaksanaan Program “Bupati Ngantor di Desa” tanpa memilih-milih merupakan langkah progresif yang dapat

meningkatkan keterjangkauan pelayanan pemerintah dan pelayanan publik secara keseluruhan. Diadakannya acara ini di setiap desa, pemerintah dapat memastikan tidak ada desa yang merasa tertinggal atau terabaikan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan daerah. Hal ini menjamin kesetaraan dan peluang bagi seluruh masyarakat desa untuk mendapatkan manfaat dari program ini.

Penyelenggaraan program “Bupati Ngantor di Desa” juga dapat meningkatkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dapat merasakan langsung manfaat kehadiran pemerintah di desa, masyarakat menjadi lebih bersedia berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah dan memberikan kontribusi yang lebih berharga dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Namun ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai juga harus diperhatikan dalam implementasi usulan ini. Pemerintah harus memastikan pelaksanaan Program “Bupati Ngantor di Desa” dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif di seluruh desa, tanpa mengurangi kualitas pelayanan atau mengabaikan kebutuhan masyarakat desa lainnya.

Program “Bupati Ngantor di Desa” menjadi bukti nyata bahwa pemimpin yang efektif memerlukan kemampuan mendengarkan yang baik. Kehadiran langsung bupati dan aparat pemerintah daerah di masyarakat desa menunjukkan kesediaan mereka untuk mendengarkan langsung suara dan kebutuhan warga. Bupati dan OPD memposisikan diri mereka sebagai pendengar aktif, para pemimpin dapat memahami permasalahan masyarakat dengan lebih baik dan memberikan respons yang lebih efektif terhadap kebutuhan mereka. Hal ini dapat menjadi sarana bagi para pemimpin untuk merespon langsung kebutuhan dan keinginan masyarakatnya. Mendengarkan secara aktif memungkinkan para pemimpin untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat desa dan menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan tersebut. Pendekatan ini menciptakan hubungan yang erat antara pemimpin dan bawahan, menciptakan kepercayaan dan rasa memiliki yang kuat di masyarakat dan pemimpin daerah.

Model Komunikasi Birokrasi

Program “Bupati Ngantor di Desa” merupakan kebijakan yang dikembangkan dengan tujuan utama memberikan pelayanan yang lebih baik dan mendekatkan masyarakat pedesaan. Kebijakan program “Bupati Ngantor di Desa” merupakan keputusan atau peraturan yang dibuat Pemerintah Daerah Labuhanbatu Utara untuk memberikan aksesibilitas dan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat pedesaan. Pedoman ini merupakan peraturan tertulis yang mengikat dan memberikan arahan yang jelas dalam pelaksanaannya.

Pada hakikatnya, kebijakan mengenai peraturan tertulis yang dibuat dan mengikat untuk mengatur tindakan individu dan pemangku kepentingan, termasuk pejabat pemerintah dan masyarakat desa, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan memberi kerangka dasar sebelum perencanaan diimplementasikan. Perencanaan harus selalu berpedoman pada kebijakan komunikasi, bila tidak sinkron maka upaya yang dilakukan dalam perencanaan komunikasi merupakan pekerjaan yang sia-sia, pemborosan baik dari segi biaya, tenaga maupun waktu. (Cangara, 2013).

Kebijakan yang mendasari Program “Bupati Ngantor di Desa” adalah kebijakan yang kuat dan terstruktur yang meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat respon pemerintah, dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan di tingkat desa dalam mewujudkan cita-cita Labura Hebat. Penggunaan sistem komunikasi yang efektif dan terkoordinasi, program ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa di Kecamatan Labuhanbatu Utara.

Kebijakan ini lahir dari pemahaman mendalam terhadap tantangan yang dihadapi masyarakat desa dalam mengakses layanan pemerintah seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan pemerintahan. Program ini merupakan solusi yang tepat untuk memastikan desa tidak semakin terpinggirkan dalam proses pembangunan. Melalui Program “Bupati Ngantor di Desa”, pemerintah berkomitmen untuk mendekatkan diri

dengan masyarakat dan merespon langsung kebutuhan dan tuntutan mereka. Kebijakan ini bukan sekedar memberikan pelayanan administratif, melainkan wujud nyata partisipasi aktif pemerintah dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik masyarakat desa. Kehadiran Bupati dan OPD di desa-desa diharapkan dapat menciptakan interaksi yang lebih erat antara pemerintah dan masyarakat sehingga proses pembangunan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

Kebijakan program “Bupati Ngantor di Desa” tidak hanya berfungsi sebagai sarana formal dalam mengatur pelaksanaan program, namun juga membawa perubahan nilai dan budaya kerja yang lebih luas pada institusi pemerintah. Kebijakan yang berfokus pada pelayanan yang lebih baik dan peningkatan kedekatan dengan masyarakat lokal ini merupakan tonggak penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan kawasan pedesaan di Kabupaten Labuanbatu Utara. Kebijakan Program “Bupati Ngantor di Desa” memerlukan saluran komunikasi yang efektif dan terbuka antara pemerintah dan masyarakat sebagai landasan utama keberhasilannya.

Saluran komunikasi yang baik memungkinkan pertukaran informasi yang lancar, dialog yang konstruktif, dan pemahaman yang mendalam antara kedua belah pihak. Dalam konteks ini, saluran komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi dari pemerintah kepada masyarakat, tetapi juga sarana masyarakat untuk menyampaikan keinginan, kontribusi, dan kebutuhannya kepada pemerintah Labuhanbatu Utara. Senada dengan yang disampaikan oleh Menurut Abrar (2008:12) kebijakan komunikasi merupakan studi tentang keputusan dan tindakan yang dilakukan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan komunikasi. Kajian kebijakan komunikasi bertujuan untuk mengidentifikasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan komunikasi, membedah, menganalisis dan mengambil kesimpulan tentang keberadaan kebijakan tersebut.

Komunikasi internal terjadi secara vertikal, horizontal, dan diagonal. Komunikasi eksternal kemudian terjadi melalui pemberian informasi, diskusi, dan kolaborasi. Hal ini mencakup percakapan dengan pesan

yang jelas (Reardon, 2007). Keterlibatan Bupati dan dinas terkait dalam menginformasikan program “Bupati Ngantor di Desa” merupakan langkah strategis untuk memperluas jangkauan dan visibilitas program ini di masyarakat. Sebagai pimpinan tertinggi di tingkat kabupaten, Bupati mempunyai peranan penting sebagai juru bicara dan promotor utama dalam mendorong program “Bupati Ngantor di Desa”. Melalui komunikasi langsung, pidato atau penampilan di media massa, bupati dapat menyoroti pentingnya program ini bagi kemajuan desa-desa di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Komunikasi internal yang melibatkan berbagai arah seperti vertikal, horizontal, dan diagonal memegang peranan penting. Secara vertikal, komunikasi terjadi antara Bupati dan stafnya, serta dengan berbagai tingkatan struktural di pemerintahan desa. Bupati bertanggung jawab untuk menyampaikan visi, tujuan, dan arahan kepada stafnya, sementara staf di tingkat bawah dapat memberikan umpan balik dan laporan tentang perkembangan program di lapangan. Komunikasi horizontal, di sisi lain, memungkinkan kolaborasi antar berbagai departemen atau unit terkait dengan program ini.

Penyampaian pesan atau interaksi yang dilakukan oleh Bupati dan OPD pada program “Bupati Ngantor di Desa” berkaitan dengan Surat Al-Imran ayat 159 menyatakan, “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu.”

Ayat ini mengandung pesan tentang pentingnya komunikasi yang lembut dan penuh rahmat dalam berinteraksi dengan orang lain, yang juga relevan dengan teori komunikasi vertikal dan kebijakan komunikasi. Komunikasi melibatkan aliran informasi. Menurut De Vito (2011), arus informasi dalam komunikasi organisasi meliputi komunikasi ke atas dan ke bawah (sering disebut vertikal), komunikasi horizontal, serta informasi yang ambigu (rumor) dan informasi, yang terdiri dari kepadatan sebab dan

akibat. Komunikasi tingkat atas adalah pesan yang dikirim dari tingkat hierarki yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi.

Komunikasi vertikal mengacu pada aliran komunikasi dari pihak yang memiliki kekuasaan atau otoritas yang lebih tinggi ke pihak yang memiliki posisi yang lebih rendah dalam struktur hierarki. Ayat ini memiliki pesan tentang bersikap lemah lembut menggarisbawahi pentingnya komunikasi yang efektif dari pemimpin kepada yang dipimpinnya. Pentingnya komunikasi yang lemah lembut dalam ayat ini juga mencerminkan prinsip-prinsip kebijakan komunikasi yang efektif.

Komunikasi vertikal yang baik mencakup penggunaan bahasa yang santun, empati terhadap orang lain dan kesediaan untuk mendengarkan serta memahami perspektif orang lain. Menerapkan pesan yang terkandung dalam ayat ini, pemimpin dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antara pihak yang berwenang dan bawahan. Hal ini dapat memperkuat hubungan antara pemimpin dan pengikutnya, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa”.

OPD atau dinas terkait dan perangkat desa juga berperan penting dalam mempromosikan kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” kepada masyarakat. Sebagai garda terdepan dalam pemerintahan di tingkat desa, aparat desa memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan dan keinginan masyarakat serta mengetahui cara terbaik untuk memberikan informasi kepada mereka. Salah satu cara dalam mensosialisasikan dengan menggunakan media sosial dan platform digital lainnya, aparat desa dapat secara aktif mempromosikan program “Bupati Ngantor di Desa”, melibatkan masyarakat, dan memberikan informasi terkini secara berkala. Berikut merupakan kutipan langsung dari Informan 3 mengenai sosialisasi dalam pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” dengan menggunakan media sosial:

“Perangkat desa diperintahkan untuk mengumumkan di sosial media masing masing terkait akan dilaksanakannya program bungdesa, dijelaskan juga terkait apa saja yang ada di bungdesa, pelayanan apa

saja yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Tentu saja, bupati dan dinas terkait juga membantu dalam menginformasikan kegiatan bungdesa”. (Asisten II Pemkab Labuhanbatu Utara: Drs.Muhammad Asril, Wawancara, 12 September 2023).

Melibatkan Bupati, OPD dan perangkat desa untuk menginformasikan program “Bupati Ngantor di Desa” melalui media sosial dan saluran komunikasi lainnya merupakan strategi yang efektif untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap program tersebut. Diharapkan melalui kerja sama yang sinergis dari berbagai pemangku kepentingan, pesan-pesan terkait Bundesa dapat tersampaikan dengan lebih efisien, tujuan yang diharapkan dapat tercapai, dan program memberikan dampak positif bagi pembangunan desa-desa di Kecamatan Labuhanbatu Utara.

Aktivitas media sosial memiliki potensi besar untuk menjangkau khalayak luas, namun terdapat kendala yang membatasi efektivitasnya. Salah satu kendala utamanya adalah keterbatasan teknologi yang dihadapi sebagian masyarakat, khususnya di pedesaan. Tidak semua orang memiliki akses yang mudah dan konsisten terhadap perangkat teknologi yang diperlukan untuk mengakses internet dan media sosial secara rutin. Artinya, pesan-pesan yang disampaikan melalui media sosial tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dan potensi komunikasi dan sosialisasinya belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Walaupun demikian, antusiasme masyarakat yang mengikuti program “Bupati Ngantor di Desa” tetap tinggi dan tidak terpengaruh oleh keterbatasan teknologi.

Masyarakat terus menunjukkan minat yang besar untuk menghadiri dan berpartisipasi langsung dalam acara-acara yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, termasuk kegiatan sosialisasi desa. Meskipun media sosial berperan penting dalam menyebarkan informasi, interaksi langsung dan kehadiran fisik pemerintah di desa tetap menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan dan keterlibatan masyarakat.

Kendala teknis terhadap saluran komunikasi dapat berdampak pada partisipasi masyarakat. Salah satu kendala teknologi yang sering ditemui adalah desa-desa terpencil memiliki keterbatasan infrastruktur telekomunikasi. Banyak desa yang masih kekurangan jaringan internet, sehingga penyebaran informasi dan komunikasi efektif antara pemerintah dan masyarakat menjadi sulit. Hal ini dapat menghambat sosialisasi program dan mengakibatkan masyarakat kurang mendapat informasi mengenai tujuan dan manfaat BungDesa.

Rendahnya tingkat literasi digital di beberapa komunitas pedesaan juga menjadi hambatan dalam penggunaan saluran komunikasi modern. Meskipun beberapa desa mempunyai akses terhadap Internet, tidak semua penduduk desa mempunyai pengetahuan atau mampu menggunakan teknologi informasi. Dampak dari hal tersebut dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyebaran informasi, sehingga hanya sebagian kecil masyarakat yang dapat mengakses dan memahami informasi tentang program BungDesa. Dalam situasi ini, pemerintah perlu mengembangkan strategi komunikasi komprehensif yang tidak hanya mengandalkan teknologi digital, namun juga menggunakan metode tradisional seperti pengumuman di balai kota dan pertemuan masyarakat. Meski terdapat kendala teknis, partisipasi masyarakat dapat didorong melalui pendekatan kreatif dan adaptif. Salah satu pilihannya adalah dengan memanfaatkan peran perwakilan lokal yang mempunyai pengaruh besar dan dapat mengkomunikasikan informasi secara langsung kepada masyarakat. Pemerintah dapat melakukan kampanye kesadaran langsung di lokasi-lokasi strategis yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti pasar dan tempat ibadah. Dengan demikian, informasi mengenai program BungDesa dapat tersebar lebih merata dan masyarakat dapat berpartisipasi lebih aktif dalam kegiatan yang direncanakan.

Kendati memiliki keterbatasan teknis, partisipasi masyarakat dalam skala besar dalam kegiatan Bungdesa menunjukkan bahwa bantuan langsung masih efektif dalam meningkatkan kesadaran dan dukungan terhadap program pemerintah. Dengan menggunakan saluran

komunikasi yang berbeda dan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat yang berbeda, pemerintah dapat meningkatkan efektivitas hubungan masyarakat, mencapai tujuan yang diinginkan, dan memastikan bahwa program pembangunan mempunyai dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Partisipasi masyarakat dalam program “Bupati Ngantor di Desa” dilaporkan sangat tinggi, sebagaimana disampaikan Sekda Labura yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program ini. “Pada pelaksanaan kadang hampir 200 orang yang datang, hal ini juga membuat ekonomi bergerak dengan pesat utk desa”, (Wawancara, 12 September 2023). Menurutnya antusiasme warga untuk hadir dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diadakan selama kunjungan program terlaksana. Tingginya partisipasi ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan sosialisasi dan pendekatan langsung yang dilakukan oleh Bupati, tetapi juga menunjukkan bahwa masyarakat merasa program ini relevan dan bermanfaat bagi mereka. Keterlibatan yang signifikan dari masyarakat desa ini menjadi indikasi positif bahwa program BungDesa benar-benar diterima dan didukung oleh masyarakat, membuka peluang untuk perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan publik dan pembangunan desa.

Komunikasi secara langsung dalam sosialisasi program “Bupati Ngantor di Desa” (BungDesa) memiliki peran vital dalam memastikan kehadiran masyarakat yang tinggi dan memicu pergerakan ekonomi lokal. Dengan melakukan sosialisasi tatap muka, Bupati dan timnya dapat menjelaskan tujuan, manfaat dan detail pelaksanaan program secara jelas dan personal. Interaksi langsung ini memungkinkan masyarakat untuk mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, dan menyampaikan harapan mereka secara langsung kepada Bupati. Metode ini efektif dalam membangun kepercayaan dan antusiasme masyarakat terhadap program yang akan dilaksanakan.

Keuntungan lain dari komunikasi langsung adalah kemampuannya untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki akses atau keterampilan untuk menggunakan

media digital. Sosialisasi melalui pertemuan di balai desa, pasar atau tempat-tempat strategis lainnya memastikan bahwa informasi mengenai program BungDesa tersebar luas dan diterima oleh semua warga. Ketika masyarakat merasa dilibatkan dan didengar, mereka cenderung lebih bersemangat untuk berpartisipasi dalam kegiatan yang direncanakan. Antusiasme ini diterjemahkan ke dalam kehadiran yang tinggi saat pelaksanaan program, menciptakan momentum yang positif di desa.

Implementasi Program “Bupati Ngantor di Desa” dilakukan selama satu hari penuh merupakan inisiatif yang memberikan dampak signifikan terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Sesuai dengan semangat mendekatkan diri dengan masyarakat, acara diawali dengan safari pagi dimana Bupati dan rombongan turut serta bersama warga sekitar melakukan shalat subuh berjamaah. Kehadiran mereka di pagi hari tidak hanya memperkuat ikatan emosional antara pemerintah dan masyarakat, namun juga menunjukkan komitmen untuk mendengarkan dan merespons secara langsung kebutuhan dan keinginan masyarakat.

Beragam aktivitas berlangsung sepanjang hari, mulai dari safari subuh hingga malam hari. Kegiatan tersebut meliputi dialog, pertemuan dengan perangkat desa, pelayanan publik, dan kegiatan sosial lainnya yang bertujuan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Penerapan Program “Bupati Ngantor di Desa” juga memberikan peluang bagi UMKM untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam berbagai proyek dan program pembangunan. UMKM dapat berkontribusi aktif terhadap pertumbuhan perekonomian lokal dengan meningkatkan kapasitas dan memperluas cakupan operasinya.

Penerapan Program “Bupati Ngantor di Desa” tidak hanya memberikan manfaat ekonomi langsung kepada UMKM, namun juga berpotensi membangun ekosistem usaha yang lebih kuat dan berkelanjutan di tingkat desa. Dengan memperkuat UMKM sebagai tulang punggung perekonomian daerah, pemerintah daerah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha dan investasi di pedesaan. Hal ini membantu menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan Program “Bupati Ngantor di Desa” juga menjadi pendorong penting dilaksanakannya program pembangunan dan kebijakan pemerintah secara langsung kepada masyarakat desa.

Pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” yang dilakukan selama sehari penuh menawarkan berbagai kegiatan yang dirancang untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat desa serta mendorong perkembangan ekonomi lokal. Sepanjang hari, interaksi langsung antara Bupati dan masyarakat menciptakan suasana yang inklusif dan partisipatif, di mana setiap warga merasa diperhatikan dan didengar. Dengan agenda yang padat dan beragam, program ini tidak hanya memfasilitasi penyelesaian masalah administratif dan ekonomi, tetapi juga membangun semangat gotong royong dan kebersamaan di antara warga desa, memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pembangunan desa. Pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” dilaksanakan seharian penuh seperti yang disampaikan oleh Asisten II Pemkab Labuhanbatu Utara: Drs. Muhammad Asril “Pelaksanaan bungdesa dilaksanakan selama 1 hari penuh, mulai dari subuh sampai malam, dimulai dari acara safari subuh sampai sholat magrib berjamaah,” (Wawancara, 12 September 2023).

Pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” yang dilakukan seharian digunakan oleh Bupati Labuhanbatu Utara dengan tidak menggunakan protokol. Pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” BungDesa dengan pendekatan yang lebih informal, di mana Bupati melakukan kegiatan tanpa menggunakan protokol resmi, menciptakan suasana yang lebih akrab dan santai. Tanpa adanya prosedur protokoler yang kaku, interaksi antara Bupati dan masyarakat menjadi lebih natural dan terbuka. Suasana informal ini juga memperkuat ikatan emosional antara Bupati dan masyarakat desa. Ketika warga merasa bahwa mereka dapat berbicara langsung dengan Bupati tanpa perantara, rasa keterlibatan dan kepercayaan mereka terhadap pemerintah meningkat.

Penggunaan strategi komunikasi secara langsung tanpa harus melalui protokol yang kaku. Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memahami pentingnya terjalannya komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan masyarakat, sehingga mereka menciptakan cara yang lebih sederhana dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Program ini menghilangkan protokol yang terkadang membatasi akses masyarakat terhadap pimpinan dan pejabat pemerintah, sehingga memungkinkan Bupati dan OPD berinteraksi langsung dengan masyarakat desa, Hal ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan permintaan, keluhan, dan kontribusinya langsung kepada Bupati dan OPD.

Penggunaan strategi komunikasi langsung tanpa protokol merupakan salah satu inovasi yang berhasil diterapkan dalam program “Bupati Ngantor di Desa” yang dilakukan di Labuhanbatu Utara. Pendekatan ini membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan lokal, serta memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Sebenarnya inilah yang paling bagus, salah satu termasuk inovasi yang dibuat. Strategi yang dibuat Pak Bupati dan para OPD, termasuk komunikasi secara langsung dan pelaksanaannya tidak menggunakan protokol. Tidak ada sambutan dan lain-lain dalam pelaksanaannya,” Sekda Labura, Muhammad Suaib (Wawancara, 12 September 2023)

Kehadiran Bupati dalam program “Bupati Ngantor di Desa” dan komunikasi secara langsung dengan masyarakat merupakan wujud komunikasi vertikal, dimana instruksi dan kebijakan atau peraturan disampaikan dari pemerintah daerah kepada masyarakat penerima. Naisbitt (2004) menyatakan bahwa komunikasi organisasi vertikal adalah tindakan komunikasi yang berupa perintah, peringatan, pujian dan petunjuk atas seluruh aktivitas yang dikomunikasikan untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, bupati berperan penting dalam menyampaikan pesan-

pesan penting kepada masyarakat, membangun saling pengertian dan meningkatkan kesadaran terhadap program pemerintah.

Komunikasi dari atasan ke bawahan, yang disebut komunikasi ke bawah, mengacu pada aliran pesan dari atasan kepada bawahan. Menurut Lewis (1987), komunikasi ke bawah mengkomunikasikan tujuan, mengubah sikap, membentuk opini, mengurangi rasa takut dan ketidakpercayaan akibat kurangnya informasi, dan membantu anggota organisasi beradaptasi terhadap perubahan. Komunikasi ke bawah dalam organisasi mengacu pada aliran informasi dari posisi otoritas yang lebih tinggi ke posisi otoritas yang lebih rendah.

Kunjungan langsung ke desa memberikan kesempatan kepada Bupati untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat, mendengarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat, serta menjelaskan secara detail tujuan dan manfaat program “Bupati Ngantor di Desa” tersebut. Komunikasi top-down ini memungkinkan bupati memberikan instruksi yang jelas dan rinci kepada masyarakat lokal serta memperkuat pemahaman masyarakat desa terhadap upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

Melalui komunikasi vertikal tersebut, Bupati juga dapat memberikan gambaran yang lebih konkrit mengenai langkah-langkah yang dilakukan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat desa. Informasi yang diberikan langsung oleh Bupati tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan dan program pemerintah, namun juga meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap upaya pembangunan yang dilakukan. Kehadiran Bupati secara tatap muka juga memberikan kesan kuat kepada masyarakat mengenai komitmen dan kepentingan pemerintah daerah terhadap kebutuhan dan keinginan mereka. Melalui interaksi tatap muka ini, masyarakat merasa didengarkan dan diakui oleh pemerintah, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan dalam proses pembangunan daerah.

Sehubungan dengan pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa”, penting untuk menjaga netralitas dan independensi dalam menjalankan

tugasnya. Bupati dan OPD terkait bertanggung jawab untuk tidak melakukan campur tangan yang tidak perlu terhadap kegiatan di tingkat desa. Pendekatan ini memastikan bahwa proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program bersifat objektif dan didasarkan pada kebutuhan dan keinginan masyarakat. Pentingnya menjaga netralitas terkait dengan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, dimana kebijakan dan keputusan harus didasarkan pada kepentingan umum dan keadilan bagi semua pihak, tanpa melibatkan preferensi atau kepentingan individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut, Bupati dan OPD terkait akan memastikan setiap langkahnya bermanfaat bagi kebaikan bersama dan kemajuan seluruh daerah. Selain itu, sangat penting untuk menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam segala komunikasi dan interaksi dengan masyarakat.

Berbahasa santun mencerminkan sikap hormat dan penghargaan terhadap semua orang, tanpa memandang status sosial, budaya, atau latar belakang lainnya. setiap komunikasi, Bupati dan OPD terkait harus mengedepankan nilai-nilai kesopanan, kearifan lokal, dan menghormati norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Menurut buku Komunikasi Islami (2017) dalam Harjani Hefni, komunikasi Islami adalah komunikasi yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan menyampaikan semangat kedamaian, kebaikan, dan keamanan. Oleh karena itu, tidak melakukan intervensi dan menggunakan bahasa yang santun menjadi prinsip dasar yang harus diperhatikan oleh Bupati dan OPD dalam melaksanakan program Pemerintah Kabupaten Ngantor di Desa.

Perlakuan penuh hormat dan santun ini tidak hanya mencerminkan integritas dan profesionalisme pemerintah daerah, namun juga memperkuat hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat serta menciptakan kepercayaan yang kuat terhadap proses pembangunan daerah. Berikut pernyataan dari Informan 3 bahwa Bupati dan OPD dalam menyampaikan pesan menggunakan bahasa yang baik dan tidak melakukan intervensi. Hal ini disampaikan oleh Asisten II Pemkab

Labuhanbatu Utara: Drs.Muhammad Asril yang berada langsung pada saat pelaksanaan program “Tidak melakukan intervensi sama sekali. Bupati dan dinas menggunakan bahasa yang baik dan santun dalam menginformasikan kegiatan bungdesa,” (Wawancara, 12 September 2023).

Komunikasi Islam adalah komunikasi dilakukan untuk membangun hubungan dengan diri sendiri, dengan sang pencipta, serta dengan sesama untuk menciptakan kedamaian, keramahan, dan keselamatan buat diri dan lingkungan dengan cara mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya (Hefni: 2015, 14). Terdapat enam perspektif yang menjadi landasan utama dalam interaksi dan komunikasi antara individu, kelompok, maupun pemerintah dengan masyarakat ialah, *Qaulan Sadida*, *Qaulan Baligha*, *Qulan Ma'rufa*, *Qaulan Karima*, *Qaulan Layina* dan *Qaulan Maysura*. Memahami dan menerapkan keenam perspektif komunikasi Islam tersebut, Bupati Labuhanbatu Utara dapat membangun hubungan yang lebih baik, harmonis, dan bermakna, serta menciptakan lingkungan yang penuh dengan kedamaian, keadilan, dan kemajuan.

Qaulan sadida atau secara gamblang merupakan salah satu prinsip komunikasi Islam yang sangat penting dalam pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa”. Prinsip ini mengajarkan pentingnya berbicara jujur dan terbuka, tanpa menyembunyikan fakta atau menyampaikan informasi yang menyesatkan. Menerapkan prinsip *Qaulan Sadida*, Bupati dan OPD dapat memastikan seluruh informasi yang diberikan kepada masyarakat adalah benar dan akurat.

Bupati dan OPD berkomunikasi secara terbuka dan transparan tanpa menyembunyikan atau memanipulasi fakta, sehingga membangun kepercayaan dan integritas hubungan pemerintah daerah dan masyarakat. Prinsip *Qaulan Sadida* juga mengajarkan pentingnya berbicara secara langsung dan terbuka kepada masyarakat, tanpa menyembunyikan maksud atau tujuan. Bupati dan OPD harus menghindari penggunaan bahasa yang ambigu dan bertindak jujur dan berintegritas dalam segala komunikasi agar tidak menimbulkan kebingungan atau kecurigaan di kalangan masyarakat.

Prinsip kedua *Qaulan Baliga*, berbicara dengan jelas dan tegas, merupakan prinsip komunikasi Islam yang penting yang harus tercermin dalam program “Bupati Ngantor di Desa”. Prinsip ini menekankan pentingnya mengkomunikasikan pesan dan informasi secara langsung, jelas, dan persuasif, tanpa mengurangi kredibilitas atau kepastian penyampaian pesan. Prinsip *Qaulan Baligha* dalam program “Bupati Ngantor di Desa”, Bupati dan OPD dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan lebih efektif dengan masyarakat desa serta memastikan pesan dan informasi yang disampaikan maksimal untuk mencapai tujuan pembangunan dan kemajuan bersama.

Prinsip *Qaulan Ma'rufa*, yang mengandung arti berbicara dengan kata-kata yang baik dan memberi nasihat yang baik, merupakan salah satu perspektif penting dalam komunikasi Islam yang telah diterapkan oleh Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam program “Bupati Ngantor di Desa”. Salah satu wujud penerapan prinsip *Qaulan Ma'rufa* adalah dalam komunikasi yang dilakukan oleh Bupati dan OPD kepada masyarakat desa. Mereka selalu berusaha untuk menggunakan bahasa yang baik, sopan, dan menghormati dalam setiap interaksi, sehingga menciptakan lingkungan komunikasi yang positif dan membangun.

Bupati dan OPD selalu berbicara dengan penuh kelembutan dan kehangatan, serta memberikan respon yang positif terhadap setiap masukan atau keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Prinsip *Qaulan Karima* juga tercermin dalam penyampaian informasi dan pesan-pesan kebijakan kepada masyarakat. Bupati dan OPD selalu berupaya untuk menyampaikan pesan-pesan mereka dengan cara yang lemah-lembut, tanpa menimbulkan ketakutan atau kekhawatiran yang tidak perlu di kalangan masyarakat.

Prinsip *Qaulan Layina* ialah ucapan yang lemah dan lembut dan *Qaulan Maysura* ialah ucapan yang mudah dipahami dan tidak menyinggung perasaan juga tercermin dalam penyampaian informasi dan pesan-pesan kebijakan kepada masyarakat. Bupati dan OPD selalu berupaya untuk menyampaikan pesan-pesan mereka dengan cara yang

menarik dan mudah dipahami, sehingga membangun suasana komunikasi yang menyenangkan dan memperkuat ikatan antara pemerintah daerah dan masyarakat desa. Bupati dan OPD dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang penuh dengan kedamaian, kelembutan, dan kebersamaan. Prinsip ini membantu memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat, serta menciptakan iklim yang kondusif untuk kerjasama yang harmonis dalam rangka mencapai pembangunan dan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi semua pihak.

Program “Bupati Ngantor di Desa”, Bupati dan OPD dapat menciptakan lingkungan komunikasi yang positif dan produktif, serta memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat. Prinsip ini membantu membangun kepercayaan, saling pengertian, dan kerjasama yang erat dalam upaya mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama. Penerapan Enam prinsip komunikasi dalam Perspektif islam ini tidak hanya menjadi landasan moral dalam setiap interaksi, tetapi juga menjadi pedoman praktis dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah dengan keadilan, kebaikan, dan kesopanan.

Implementasi Komunikasi Birokrasi

Program “Bupati Ngantor di Desa” merupakan kebijakan yang dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat, khususnya Bupati Labuanbatu Utara (Labura). Kebijakan ini bukan sekedar seremonial, namun merupakan strategi nyata untuk membangun kedekatan antara pemerintah daerah dan masyarakat desa. Kebijakan menjadi bagian dari perencanaan guna mempersiapkan seperangkat keputusan yang berhubungan dengan biaya, personil, jadwal untuk mencapai tujuan (*goals*) yang dilakukan oleh sejumlah aktor terdiri pimpinan, bawahan, lembaga pemerintah atau swasta dalam suatu bidang atau kegiatan tertentu. Hal senada diungkapkan Maskuri (2017) kebijakan adalah sebuah prinsip atau cara yang digunakan untuk dipilih dalam proses mengarahkan pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut mencakup serangkaian langkah dan prosedur yang bertujuan untuk meningkatkan

aksesibilitas pelayanan publik dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Kebijakan Program “Bupati Ngantor di Desa” awalnya ditetapkan dengan tujuan utama untuk mendekatkan pemerintah daerah dengan masyarakat desa. Diterimanya Bupati di desa, kebijakan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk berinteraksi langsung, menyampaikan keinginan dan mendapatkan layanan publik yang diperlukan. Pemerintah daerah melihat hal ini sebagai langkah konkrit menuju pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tingkat desa.

Kebijakan tersebut juga mencakup dimensi partisipatif dengan mengatur mekanisme dialog antara bupati dan masyarakat desa. Memfasilitasi sesi tanya jawab, diskusi terbuka, dan dialog langsung, kebijakan ini menciptakan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan memberikan masukan langsung kepada para pemimpin daerah terutama Bupati dan OPD di Labuhanbatu Utara. Langkah ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah serius dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan partisipatif.

Program “Bupati Ngantor di Desa” memberikan pelayanan publik, sikap yang didasarkan pada takwa akan mendorong pemerintah daerah untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam dalam Ayat 8 dari Surat Al-Maidah (Surah 5) berbunyi, “Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena itu lebih dekat kepada takwa”. Pesan yang disampaikan pada ayat ini tentang pentingnya keadilan dalam berinteraksi dan bertindak terhadap orang lain. Ayat ini juga dapat diinterpretasikan sebagai landasan untuk pembentukan kebijakan yang adil dan inklusif.

Keragaman pemahaman dan makna kebijakan di atas juga ditopang dari perbedaan asal kata kebijakan di negara-negara di dunia, implikasinya juga pada artikulasi dan konsep yang bervariasi tentang kebijakan. Ada yang menyebut “*policy*” dalam sebutan kebijaksanaan, padahal maknanya berbeda dengan kebijakan. Dimana kebijaksanaan mencerminkan kearifan

seseorang, sedangkan kebijakan merupakan aturan tertulis hasil keputusan resmi organisasi (Arifin, 2011). Teori kebijakan menekankan perlunya kebijakan yang bersifat inklusif, yaitu kebijakan yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak.

Ayat ini mengajarkan bahwa kebencian terhadap suatu kelompok tidak boleh menghalangi seseorang untuk bertindak adil. Prinsip kebijakan tersebut menekankan pentingnya kesetaraan, non-diskriminasi dan perlakuan yang adil dalam setiap kebijakan yang dibuat. Pembentukan kebijakan yang adil dan inklusif membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam masyarakat.

Kebijakan yang dibuat mencakup beberapa strategi utama yang bertujuan untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat. Dengan kebijakan-kebijakan yang terfokus pada inklusivitas, aksesibilitas, dan transparansi, pelaksanaan program BungDesa diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat secara signifikan. Partisipasi aktif warga dalam setiap tahap program menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama dalam pembangunan desa. Akhirnya, program ini tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur atau layanan publik, tetapi juga untuk memperkuat demokrasi lokal, di mana masyarakat memiliki peran sentral dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan daerah mereka.

Partisipasi ini tidak hanya menjadi kunci untuk memastikan kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh komunitas, tetapi juga untuk memperkuat legitimasi kebijakan tersebut. Partisipasi masyarakat juga menciptakan kesempatan untuk membangun kemitraan antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta sektor swasta dan lembaga non-pemerintah lainnya. Kolaborasi ini dapat memperkuat kapasitas institusi untuk mengidentifikasi, merancang dan melaksanakan kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Perencanaan dengan pendekatan partisipatif sebagai strategi pembangunan dan proses pengambilan keputusan masyarakat sangat bergantung pada kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses

pembangunan. Namun demikian sebelumnya perlu diketahui mengapa masyarakat begitu esensial dalam proses penentu keputusan publik itu sendiri. Masyarakat yang merupakan elemen terbesar dalam institusi publik dan sistem kehidupan suatu negara seringkali mengalami konflik ketika berinteraksi dengan pemerintah yang dianggap sebagai perwujudan negara itu sendiri. Negara, dalam hal ini pemerintah, dengan legitimasi dan birokrasinya seringkali menjadi penerjemah dominan dalam proses pembangunan. Berkembangnya segala bentuk tatanan sosial di negeri ini sepenuhnya bergantung pada kebijakan negara atau nasional. Akibatnya, proses pembangunan yang dilakukan seringkali tidak efektif atau tidak mampu menjawab permasalahan sosial yang berkembang.

Upaya partisipasi masyarakat yang dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif dapat memberikan manfaat yang signifikan, karena keputusan publik menjadi lebih efektif dan menghasilkan rasa kepuasan dan dukungan masyarakat yang lebih kuat terhadap proses pembangunan. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam proses penetapan kebijakan publik yang memberikan nilai strategis bagi masyarakat itu sendiri merupakan prasyarat penting dalam melaksanakan inisiatif pembangunan.

Proses pengambilan keputusan kebijakan (inovasi) tidaklah berhenti ketika kebijakan sudah diadopsi, namun ada proses berikutnya yaitu tahap operasionalisasi kebijakan itu sendiri. Proses pengambilan keputusan kebijakan (inovasi) tidak berhenti ketika kebijakan telah diadopsi dalam program “Bupati Ngantor di Desa”. langkah selanjutnya dalam proses ini adalah operasionalisasi kebijakan, dimana keputusan yang diambil harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan. Operasionalisasi ini merupakan langkah penting untuk memastikan keberhasilan dan dampak nyata dari pedoman yang diadopsi.

Pertama-tama, operasionalisasi kebijakan melibatkan identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan dengan efektif. Ini mencakup penentuan anggaran yang memadai, alokasi personel, dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program. Penentuan sumber daya ini menjadi landasan bagi kelancaran

pelaksanaan kebijakan di lapangan. Selanjutnya, operasionalisasi kebijakan juga melibatkan pengembangan rencana aksi yang konkret dan terstruktur. Ini termasuk penugasan peran dan tanggung jawab yang jelas kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, serta pengaturan proses kerja yang efisien.

Penetapan tugas dan tanggung jawab yang jelas membantu memastikan koordinasi yang baik dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan. Untuk mengoperasionalkan suatu kebijakan, pertama-tama identifikasi sumber daya yang diperlukan untuk implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini termasuk menentukan anggaran, peran dan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program.

Identifikasi sumber daya ini menjadi dasar kelancaran implementasi pedoman di lapangan. Selain itu, implementasi kebijakan juga mencakup penyusunan rencana aksi yang konkret dan terstruktur. Hal ini mencakup penetapan peran dan tanggung jawab yang jelas kepada mereka yang terlibat dalam pelaksanaan program dan pengorganisasian proses kerja yang efisien. Menetapkan peran dan tanggung jawab yang jelas membantu memastikan koordinasi dan konsistensi yang tepat dalam implementasi kebijakan.

Kebijakan yang dibuat Bupati Labuhanbatu Utara melalui Surat Keputusan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 414/227/DPMD/2021 tentang pembentukan panitia pelaksana kegiatan “Bupati Ngantor di Desa” Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Peraturan Bupati Labuhan Batu Utara Nomor 28 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pelayanan publik melalui program “Bupati Ngantor di Desa” yang dibuat oleh pemerintah memiliki peran krusial dalam penyusunan rencana dan menetapkan tanggung jawab masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Kebijakan yang telah dibuat Bupati bertindak sebagai landasan hukum dalam mengatur proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan serta program yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya regulasi yang jelas, OPD dapat memiliki panduan yang terstandarisasi untuk mengelola dan menyusun rencana kerja yang sesuai dengan visi dan

misi pemerintah daerah. Peraturan tersebut juga menetapkan tanggung jawab masing-masing OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan tertentu. Pembagian peran dan tanggung jawab antar OPD yang berbeda dan mengoordinasikannya untuk mencapai tujuan bersama. Dengan penjabaran tanggung jawab yang jelas, peraturan ini akan membantu menghindari duplikasi dan konflik antar OPD serta menjamin sinergi dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.

Program “Bupati Ngantor di Desa” tidak hanya menjamin dialog antara bupati dan masyarakat desa, tetapi juga memberikan pelayanan publik yang langsung diberikan kepada masyarakat. Melalui upaya ini, tim bupati dan pemerintah daerah membawa layanan pengelolaan kependudukan, kesehatan dan pendidikan langsung ke masyarakat desa. Salah satu aspek dari program ini adalah penyediaan layanan pengelolaan kependudukan atau pembuatan dan perpanjangan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Masyarakat desa berkesempatan untuk memperbarui kartu identitas, mengurus dokumen administrasi dan menyelesaikan berbagai formalitas kependudukan tanpa harus menempuh perjalanan jauh ke kantor pemerintahan yang merupakan salah satu kendala yang terjadi di Labuhanbatu Utara. Hal ini tidak hanya memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan, namun juga meningkatkan efisiensi proses pengelolaan di tingkat desa.

Selain itu, program ini memberikan layanan medis langsung ke desa-desa. Tim medis yang mengikuti kegiatan ini melakukan pemeriksaan kesehatan, konsultasi, dan pelayanan vaksinasi kepada masyarakat pedesaan. Program ini meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan di pedesaan dengan memberikan layanan kesehatan langsung ke lokasi atau desa program “Bupati Ngantor di Desa”, terutama bagi masyarakat yang kesulitan mengakses fasilitas kesehatan secara rutin. Selain itu, memiliki dampak positif dari pelayanan kesehatan pada program “Bupati Ngantor di Desa” dapat menekan tingkat stunting di desa-desa Labuhanbatu Utara

dan berperan penting dalam membantu penanganan stunting di tingkat provinsi.

Pengawasan langsung oleh Bupati dan Ibu PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga) untuk sosialisasi program khususnya terkait pemberian makanan tambahan dalam memberikan informasi tentang pentingnya nutrisi yang tepat, terutama pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak. Pemantauan langsung terhadap Bupati dan ibu-ibu PKK memungkinkan terkait mengidentifikasi keluarga-keluarga yang memerlukan penatalaksanaan gizi khusus. Dengan melakukan pendekatan secara personal kepada masyarakat, masyarakat dapat menawarkan solusi dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

Pemberian tambahan pangan merupakan langkah nyata dalam mengatasi tantangan gizi di tingkat desa. Melalui program ini, Bupati dan Ibu PKK dapat memastikan bantuan ini benar-benar mencapai sasaran yang tepat. Oleh karena itu, pemberian makanan tambahan merupakan bagian penting dari upaya peningkatan status gizi desa-desa di Labuanbatu Utara. Pendekatan ini tidak hanya memberikan dukungan praktis kepada keluarga yang membutuhkan, namun juga memperkuat kapasitas masyarakat dalam merawat anak-anak dan ibu hamil, serta mendukung upaya jangka panjang untuk mengurangi stunting dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

“Sangat bagus hasil dari pelaksanaan BungDesa, seperti yang kita lihat seperti capaian penanganan stunting, untuk sumut itu 7 sekian tidak lepas dari pantauan bupati dan ibu pkk mensosialisasikan melalui beberapa program yang dibuat seperti pemberian makanan tambahan untuk anak-anak sekolah,” Sekda Labura, Muhammad Suaib (Wawancara, 12 September 2023)

Tim medis yang terlibat dalam program program “Bupati Ngantor di Desa” tidak hanya berdampak di Labuhanbatu Utara saja, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap perubahan yang lebih besar. Pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan program di berbagai desa dapat dijadikan model dan praktik terbaik dalam penanganan stunting di tingkat

provinsi. Berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, hasil dan pendekatan yang sukses dari program ini dapat diadaptasi dan diterapkan di wilayah-wilayah lain.

Terintegrasi dalam upaya penanganan stunting di tingkat provinsi. Dengan menjalankan program ini secara berkelanjutan dan melibatkan lebih banyak wilayah, pemerintah dapat memperluas dampak positifnya dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam menekan stunting di seluruh provinsi. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Utama (Sestama) Badan Kependudukan Keluarga Berencana (BKKBN) RI Tavip Agus Rayanto menyampaikan pihaknya mencatat ada 1.166.929 keluarga berisiko stunting di Sumatera Utara (Sumut). ada sebanyak 214.075 keluarga memiliki baduta (balita usia 0-23 bulan) 512.502 keluarga memiliki balita (usia 24-59 bulan), 199.412 keluarga tidak memiliki sumber air minum layak, 247.878 keluarga tidak memiliki jamban layak, ditambah dengan Pasangan Usia Subur (PUS) berdasarkan 4T (Terlalu Muda Menikah, Terlalu Tua Saat Hamil, Terlalu Banyak Anak, Terlalu Dekat Jarak Kehamilannya) (sumutprov.go.id, 2023).

Selain pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan juga memegang peranan yang sangat penting. Program yang mengintegrasikan kedua sektor tersebut terbukti berhasil mengatasi permasalahan gizi buruk dan stunting di masyarakat. Berfokus pada penguatan pendidikan gizi di sekolah dan masyarakat. Program-program tersebut juga mencakup pengajaran keterampilan praktis kepada masyarakat pedesaan. Program keterampilan seperti pertanian berkelanjutan dan pengelolaan sumber daya alam memberikan pendidikan yang memungkinkan masyarakat memproduksi dan mengonsumsi makanan bergizi secara mandiri. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya memberikan pengetahuan tetapi juga memungkinkan masyarakat melakukan tindakan untuk mengurangi stunting.

Melalui kampanye penyuluhan dan program-program interaktif, masyarakat diberikan informasi tentang pentingnya perawatan anak yang komprehensif, termasuk aspek-aspek gizi yang penting. Pendekatan ini

menciptakan kesadaran yang lebih besar tentang pentingnya nutrisi dalam menjaga kesehatan anak-anak dan mendorong perubahan perilaku yang positif di masyarakat. Selain integrasi antara pelayanan kesehatan dengan pendidikan dalam mengedukasi terkait gizi untuk menekan stunting, pelayanan pendidikan pada program “Bupati Ngantor di Desa” juga berfokus dalam pelayanan publik untuk memberikan informasi terkait program pendidikan, untuk melihat potensi masyarakat jika memerlukan bantuan pendidikan dan memberikan penyuluhan pendidikan kepada masyarakat desa.

Tidak hanya mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dan peningkatan literasi, namun juga merangsang minat dan partisipasi aktif terhadap pendidikan di tingkat desa. Dengan menggabungkan dialog langsung dan pelayanan publik, program “Bupati Ngantor di Desa” menciptakan pendekatan yang holistik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Keterlibatan langsung Bupati dalam memberikan pelayanan publik ini menciptakan suasana keakraban dan kepercayaan di antara masyarakat, memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakatnya, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif di tingkat desa. Menggabungkan interaksi langsung dan pelayanan publik, program “Bupati Ngantor di Desa” menciptakan pendekatan holistik dalam memenuhi kebutuhan masyarakat desa. Keterlibatan langsung bupati dalam penyelenggaraan pelayanan publik menciptakan suasana keakraban dan kepercayaan dalam masyarakat, memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan warga, serta memungkinkan pemerintahan yang lebih inklusif dan responsif di tingkat desa. Kepala Desa, Erwin Perdamean mengungkapkan bahwa penerapan “Bupati Ngantor di Desa” sudah baik dengan menyoroti kesuksesan acara bungdesa yang telah berjalan dengan baik. suksesnya acara tersebut merupakan indikasi kuat bahwa program “Bupati Ngantor di Desa” telah diterima dengan baik oleh masyarakat setempat. “Penerapan bungdesa di labura sudah baik dilihat dari suksesnya acara bungdesa yang telah berjalan dan kerap kali

mendapat respon yang positif dari masyarakat”. (Wawancara, 7 Oktober 2023).

Respon positif yang diterima dari acara bungdesa menjadi bukti bahwa pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Keberhasilan acara tersebut juga mencerminkan adanya upaya serius dari pemerintah daerah dalam mendekatkan diri kepada rakyat dan menjawab berbagai kebutuhan dan aspirasi mereka.

Kepala Desa Simpang 4, Erwin Perdamean memberikan gambaran yang optimis terkait dengan pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa”. Suksesnya acara “Bupati Ngantor di Desa” menjadi salah satu indikator penting bahwa program ini telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat.

Penting untuk mencatat bahwa pendapat dari Kepala Bapeda Labuhanbatu utara, Muhammad Ikhwan lubis sejalan dengan pandangan yang diungkapkan oleh Erwin Perdamean terkait dengan pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa”. Respon kedua informan tersebut, terlihat konsistensi dalam persepsi bahwa pelaksanaan program tersebut telah berlangsung dengan baik. seperti halnya Kepala Desa Simpang 4, Erwin Perdamean, juga menilai positif berbagai aspek dari program “Bupati Ngantor di Desa”. Salah satu hal yang ditekankan oleh Informan 4 adalah kesesuaian antara tujuan program dengan kenyataan di Lapangan. Keberhasilan program “Bupati Ngantor di Desa” dalam membangun hubungan kerja yang baik antara pemerintah daerah desa dan masyarakat desa. Para Informan juga menyoroti bahwa pelaksanaan program ini telah membawa manfaat nyata bagi masyarakat desa, seperti peningkatan akses terhadap layanan publik dan kesempatan untuk menyampaikan keinginan mereka secara langsung kepada pemerintah.

Kepala Bapeda Labuhanbatu utara, Muhammad Ikhwan lubis juga menunjukkan keyakinan bahwa pelaksanaan program ini telah melibatkan berbagai pihak secara merata. Para Informan menilai bahwa Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah berhasil mengkoordinasikan

berbagai kegiatan dengan baik, sehingga menghasilkan dampak yang signifikan bagi masyarakat desa. Hal ini tercermin dalam persepsi bahwa pelaksanaan program telah memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat secara luas. Dalam konteks ini, perspektif yang disampaikan oleh Kepala Bapeda Labuhanbatu utara, Muhammad Ikhwan lubis “Hasil keseluruhan bungdesa sangat baik bagi masyarakat, yang mana masyarakat merasa sangat dibantu dalam pengurusan administrasi dan kesehatan secara cepat dan mudah diakses,” (Wawancara, 12 September 2023).

Pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” telah memberikan kontribusi positif yang signifikan bagi masyarakat desa, serta mencerminkan kesuksesan dalam upaya pemerintah daerah untuk mendekatkan diri kepada rakyat. Dengan demikian, sudut pandang dari Muhammad Ikhwan lubis memperkuat keyakinan akan keberhasilan dan dampak positif dari pelaksanaan program tersebut. Maka dari itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa program “Bupati Ngantor di Desa” telah memberikan hasil yang positif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, kualitas pelayanan publik dan kesadaran akan pentingnya pembangunan desa. Hal ini dapat dikatakan positif karena antusias masyarakat yang hadir tinggi dan pelayanan yang diberikan dari pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Meskipun demikian, program “Bupati Ngantor di Desa” merupakan program baru bagi pemerintah ataupun masyarakat di Labuhanbatu Utara. Sehingga kebijakan ini merupakan suatu inovasi baru untuk mendekatkan masyarakat dengan pimpinan daerah serta memberikan pelayanan publik secara langsung. Maka dari itu, Penulis ingin menyoroti proses di mana inovasi atau ide baru diterima, diterapkan, dan menyebar di dalam suatu kelompok atau masyarakat.

Program “Bupati Ngantor di Desa” merupakan sebuah inovasi yang menawarkan pendekatan berbeda dalam interaksi antara pemerintah daerah dan masyarakat di tingkat desa. Salah satu aspek penting dari inovasi ini adalah pengenalan langsung oleh pemimpin daerah terhadap kondisi, kebutuhan, dan potensi desa yang sulit diakses oleh

birokrasi terpusat di kota-kota besar. Program “Bupati Ngantor di Desa” mencerminkan banyak aspek inovatif yang berbeda dengan pendekatan pemerintahan konvensional. Salah satu aspek utama dari inovasi ini adalah pendekatannya yang langsung dan terdesentralisasi. Dengan menghadirkan para pemimpin daerah dan pejabat pemerintah ke desa-desa, program ini menghilangkan hambatan geografis dan administratif yang menyulitkan masyarakat pedesaan untuk mengakses layanan publik. Selain itu, program ini juga akan menampilkan inovasi dalam cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakat.

Pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa” di Labuhanbatu Utara, kehadiran pimpinan daerah, termasuk Bupati, menjadi sorotan utama dan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan program. Pimpinan daerah yang hadir tidak hanya sebagai simbolis, tetapi juga sebagai motor penggerak yang memastikan semua rencana berjalan sesuai tujuan. Kehadiran langsung Bupati Labuhanbatu Utara memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dan berdiskusi mengenai berbagai isu yang mereka hadapi. Hal ini menciptakan suasana yang lebih akrab dan terbuka, di mana warga merasa lebih dihargai dan didengar oleh pemimpin mereka.

Bupati Labuhanbatu Utara yang hadir dalam program ini dikenal memiliki gaya kepemimpinan yang khas dan dinilai sangat efektif. Gaya kepemimpinan Bupati ini cenderung inklusif dan partisipatif, menggunakan pendekatan yang humanis dan empatik, Bupati berusaha memahami permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat desa dari dekat. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah, tetapi juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan desa.

Gaya kepemimpinan yang efektif adalah gaya yang memungkinkan karyawan bekerja secara efektif dan efisien, yang pada gilirannya meningkatkan kepuasan karyawan terhadap kinerja kerjanya dan membantu organisasi mencapai tujuan yang diinginkan. Peran seorang pemimpin sangat penting dalam mencapai tujuan yang diinginkan suatu

organisasi. Setiap pemimpin berupaya memaksimalkan, menggerakkan dan membimbing potensi karyawan di lingkungannya, meskipun polanya berbeda-beda pada setiap orang. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan gaya kepemimpinan masing-masing pemimpin (Vaheera, 2021).

Dibandingkan dengan model pelayanan publik tradisional yang cenderung formal dan jarak jauh, Program Bupati Desa Ngantor lebih menekankan pendekatan yang lebih intim dan interaktif. Melalui dialog langsung antara bupati dan masyarakat, program ini menciptakan ruang pertukaran ide, keinginan dan kontribusi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kualitas kebijakan dan program yang dilaksanakan.

Program “Bupati Ngantor di Desa” juga sebuah inovasi yang memperkenalkan pendekatan yang lebih informal dan akrab dalam interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dengan menghapuskan hambatan-hambatan ini, program ini menciptakan lingkungan yang lebih santai dan terbuka, memungkinkan komunikasi yang lebih mudah dan langsung antara bupati dan masyarakat.

Menghilangkan protokol juga membantu menciptakan suasana yang lebih inklusif dan adil di antara seluruh peserta acara. Hal ini akan membuat masyarakat merasa lebih nyaman dan percaya diri dalam berinteraksi dengan bupati dan pejabat pemerintah, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran ide dan kontribusi yang lebih terbuka dan produktif. Dengan cara ini, program ini tidak hanya memberikan kesan bahwa pemerintah tertarik dan mendengarkan, namun juga menciptakan suasana yang lebih akrab dan kolaboratif di antara semua pihak yang terlibat. Selain itu, dengan menghindari formalitas yang berlebihan, program ini juga menciptakan ruang untuk kesederhanaan.

Bupati dan pejabat pemerintah daerah dapat berinteraksi dengan masyarakat dalam suasana yang lebih intim dan otentik tanpa tekanan dan jarak yang mungkin timbul pada acara formal. Hal ini memungkinkan kami untuk lebih dekat dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta merespons kebutuhan lokal dengan lebih fleksibel.

Penulis mengaitkan antara inovasi dari kebijakan “Bupati Ngantor di Desa” dengan teori difusi inovasi, dimana teori Difusi Inovasi oleh Everett M Rogers menjelaskan bagaimana berbagai inovasi muncul di berbagai bidang dari waktu ke waktu dan kehadiran inovasi tersebut memerlukan difusi agar bisa diterima oleh masyarakat luas Inovasi sendiri diartikan oleh Everesst M. Rogers, (2009) sebagai suatu ide, aktivitas, atau objek yang mengandung unsur kebaruan.

Kebaruan yang disebutkan di sini dilihat berdasarkan tanggapan individu. Jika sebuah ide tampak baru bagi seseorang, maka ide tersebut dapat digolongkan sebagai inovasi. Sedangkan difusi saat ini digambarkan sebagai proses dimana suatu inovasi ditransmisikan ke anggota suatu sistem sosial selama periode waktu tertentu melalui berbagai saluran komunikasi. Difusi juga dapat dikatakan sebagai suatu jenis komunikasi khusus yang pesannya berupa gagasan baru (Rizal, 2012).

Inovasi partisipasi masyarakat dengan mengenalkan langsung bupati dan jajaran OPD ke desa-desa pada program “Bupati Ngantor di Desa” memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam mengkomunikasikan keinginan, permasalahan dan kebutuhannya kepada pemerintah daerah. Hal ini dapat menciptakan ruang dialog yang lebih terbuka antara pemerintah dan masyarakat, yang pada gilirannya dapat memperkuat legitimasi dan akuntabilitas pemerintah.

Edler and Fagerberg (2017) perbedaan antara penemuan (ide baru tentang bagaimana melakukan sesuatu) dan inovasi (implementasi dalam praktik). hal ini juga dapat merujuk pada sesuatu yang baru bagi orang yang menciptakan atau menggunakan inovasi tersebut. Selain itu, hal baru tidak harus inovatif, menyediakan fungsionalitas baru atau mengganggu praktik yang sudah ada. Program “Bupati Ngantor di Desa” juga merupakan sebuah inovasi dalam memberikan pelayanan publik yang lebih langsung dan responsif, dengan kehadiran Bupati Ngantor bersama tim di desa-desa untuk memberikan dukungan terhadap administrasi, kesehatan, pendidikan, pembangunan infrastruktur, dll. Akses masyarakat terhadap berbagai layanan pemerintah akan dipermudah dan disederhanakan.

Tidak hanya secara langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, namun juga membantu mempercepat pencapaian berbagai indikator pembangunan yang ditentukan.

Program “Bupati Ngantor di Desa” merupakan inovasi yang penting dalam konteks pembangunan lokal dengan menghadirkan pendekatan yang berbeda dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dan kolaborasi lintas sektor, program ini memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa dan mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Senada dengan yang disampaikan oleh Edler and Fagerberg (2017) Penekanan pada inovasi sebagai pendorong perubahan ekonomi dan sosial jelas berasal dari Schumpeter. Begitu pula dengan pandangan terhadap inovasi sebagai sebuah fenomena sosial, yang hasilnya tidak hanya bergantung pada apa yang terjadi, namun juga pada kondisi sosial dan ekonomi yang lebih luas dari lingkungan (tempat inovasi diperkenalkan).

Pada proses pengambilan keputusan untuk suatu inovasi dalam kebijakan “Bupati Ngantor di Desa” terdapat beberapa tahapan menurut Everesst M. Rogers (2009) menjelaskan bahwa pengukuran waktu dapat dilihat melalui beberapa faktor, diantaranya adalah melalui proses keputusan inovasi, yang terdiri dari lima tahap, yaitu *knowledge, persuasion, decision, implementation, confirmation*.

Pertama adalah tahap *kwonledge* atau pengetahuan, Salah satu cara agar masyarakat mengetahui keberadaan inovasi adalah dengan membangun kesadaran bahwa inovasi tersebut dapat mengarah atau menjadi sebuah kebutuhan, disinilah peran Bupati dan OPD dalam menyampaikan pesan mengenai pelaksanaan program “Bupati Ngantor di Desa”. Karena ini berkaitan dengan pengamatan masyarakat yang berdasarkan kebijakan program “Bupati Ngantor di Desa” sudah sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat. Menurut Informan 3 kebutuhan masyarakat Labuhanbatu Utara sudah sesuai dengan program “Bupati Ngantor di Desa”, karena kebutuhan masyarakat tidak lepas dengan pelayanan publik. Ketika masyarakat menyadari adanya suatu inovasi



BAGIAN VIII

KONKLUSI KAJIAN KOMUNIKASI BIROKRASI

Program “Bupati Ngantor di Desa” merupakan Program yang disusun dengan cermat, sejalan dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Labura Hebat. Program “Bupati Ngantor di Desa” juga dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik di tingkat desa. Hal ini berkaitan dengan Bupati mengeluarkan 2 (dua) kebijakan mengenai program “Bupati Ngantor di Desa” dari mulai pembentukan panitia hingga perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang mengatur pada program “Bupati Ngantor di Desa”.

Upaya pada program “Bupati Ngantor di Desa” sejalan dengan visi Labura Hebat yang ingin mewujudkan kabupaten Labuhanbatu Utara hebat dengan sumber daya manusia yang cerdas, sejahtera dan religius. Program “Bupati Ngantor di Desa” adalah salah satu instrumen penting dalam mewujudkan Labura Hebat. Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah berupaya menciptakan tatanan pembangunan yang inklusif, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Kehadiran pemerintah daerah di desa diharapkan dapat memudahkan masyarakat lokal dalam mengakses layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan layanan administrasi. Hal ini akan membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup daerah pedesaan serta mengurangi kesenjangan pembangunan antara perkotaan dan pedesaan.

Antusiasme masyarakat memungkinkan untuk mewujudkan visi Labura yang lebih luas melalui partisipasi aktif masyarakat dalam proses

pembangunan. Dialog langsung antara Bupati dan masyarakat desa menciptakan ruang partisipatif yang memungkinkan masyarakat lokal mengomunikasikan keinginan dan kontribusi mereka secara langsung kepada pemimpin lokal.

Penerapan Program “Bupati Ngantor di Desa” juga berpotensi meningkatkan keterlibatan dan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan. Masyarakat dapat merasakan langsung manfaat kehadiran pemerintah di desanya dan lebih bersedia berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah serta memberikan kontribusi yang lebih berharga dalam perencanaan dan pelaksanaan program pemerintah. Namun ketersediaan sumber daya dan infrastruktur yang memadai juga harus diperhatikan dalam implementasi usulan ini.

Pemerintah perlu memastikan bahwa pelaksanaan Program “Bupati Ngantor di Desa” dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif di seluruh desa tanpa mengurangi kualitas pelayanan atau mengabaikan kebutuhan masyarakat desa lainnya. Pentingnya program “Bupati Ngantor di Desa” juga tercermin dalam upaya membangun sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Program ini meletakkan dasar bagi kerja sama yang saling menguntungkan antara pemerintah dan masyarakat pedesaan melalui dialog dan koordinasi yang erat. Koordinasi ini akan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang diinginkan yaitu menjadikan Labra sebagai wilayah yang kuat dan berkembang. Oleh karena itu, implementasi program “Bupati Ngantor di Desa” tidak hanya menjadi salah satu alat untuk mencapai tujuan operasional sehari-hari, namun juga mendukung visi besar “Labura Hebat”. Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam program “Bupati Ngantor di Desa” ini tidak hanya akan mempersatukan pemerintah daerah dan masyarakat desa, namun juga memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan serta memastikan pelayanan publik dan reformasi birokrasi tidak sekedar retorika, namun benar-benar dirasakan manfaatnya.

DAFTAR PUSTAKA



- Abrar, A. N. (2008). *Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat dan Praktek*. Gava Media.
- Aditya, R. (2021). *Pengertian Komunikasi dan Cara Menerapkannya dalam Kehidupan*. <https://www.suara.com/news/>.
- Agustino, Leo. (2017). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta Bandung.
- Akhmad, B. A. (2019). *Komunikasi Politik*. Aswaja Pressindo.
- Akib, H. (2012). Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa dan Bagaimana. *Jurnal Ilmu Adm. Publik 1*, 1–11.
- al-Asqalani, S. A. F. A. bin A. bin M. bin M. bin A. bin M. bin A. bin H. (1999). *Fath al-Bary* (Jilid II). Dar al-Hadits.
- al-Baihaqi, A. B. A. bin al-H. (1410). *Syua'ab al-Iman: Vol. jilid III*. Dar al-Kitab al-Ilmiah.
- al-Busti, I. H. (1999). *Raudhatul 'Uqalâ' wa Nuzhatul-Fudhalâ'*. Dar Ibnu al-Jauzi.
- Al-Khasawneh, A. L., & Moh, S. (2013). The relationship between job stress and nurses performance in the Jordanian hospitals: A case study in King Abdullah the Founder Hospital. *Asian Journal of Business Management*, 5(2), 267-275.
- Agustino, Leo, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta Bandung.
- Ambar. (2017). *Komunikasi Pemerintahan – Pengertian, Prespektif, Prinsip dan Penjelasan*. <https://pakarkomunikasi.com/>.

- Anisya, P. (2024). Analisis Konseptual Teori Dan Proses Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora (JURRISH) Vol.3, No.1*.
- Ansory, A. F dan Indrasari. (2018). Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Indonesia Pustaka. Sidoarjo.
- Anwar Arifin. (2008). *Ilmu Komunikasi: Sebuah Pengantar Ringkas*. Rajawali Pers.
- Arifin, T. (2011). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Pustaka Indonesia Press.
- Aritonang, A. I. (2011). Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Komunikasi, Volume 1*(Nomor 3), 261–286.
- Arwildayanto, Sukung, A., & Sumar, W. T. (2018). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Kajian Teoretis, Eksploratif, dan Aplikatif*. Cendekia Press.
- As-Syatibi, A. I. (1341). *Al-Muawaffaqat fi Usul al-Ahkam*. Dār al-Fikr.
- B., M., & Huberman, A. M. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Soucebook* (2nd Edition). SAGE Publications, Inc.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Labuhanbatu Utara. (2019). *Sejarah Kabupaten Labuhanbatu Utara. Laporan Akhir*.
- Barzam. (2018, February 7). *10 Hambatan Interaksi Verbal dalam Komunikasi Massa*. <https://Pakarkomunikasi.Com/>.
- Cangara, H. (2008). *Pengantar Ilmu Komunikasi*.
- Cangara, H. (2013). *Perencanaan Strategi Komunikasi*. PT Raja Grafindo Persada.
- Creswell, J.W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*. United States: SAGE Publications.
- DeVito, J. (2011). *Human Communication*. New York: Pearson Education.
- Didas, M. (2017). *Apa itu hebat?* <https://Artikbbi.Com/Hebat/>.
- Dosen Pendidikan 2. (2023, February 20). *Analisis*. <https://Www.Dosenpendidikan.Co.Id/Analisis/>.
- Dunn, William N, 1999, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. (edisi ke-2). Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.

- Edquist, C. (2005), 'Systems of innovation: perspectives and challenges'. *The Oxford Handbook of Innovation, Chapter 7*. Oxford University Press: Oxford, pp. 181–208.
- Effendy, O. U. (1989). *Kamus Komunikasi*. Mandar Maju.
- Effendy, O. U. (2008). *Ilmu Komunikasi Teori & Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 25.
- "E-Learning Universitas Bina Sarana Informatika". (n.d.). <https://Repository.Bsi.Ac.Id/Index.Php/Unduh/Item/240403/Psikologi-Komunikasi-12.Pdf>.
- Esti Hayu Purnamaningsih, et. al. (1996). "Efektivitas Pelatihan Komunikasi Efektif pada Kelompok Remaja." *Jurnal Psikologi*, Vol. 23(No. 2), 32.
- Faisal, S. (1990). *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Yayasan Asih Asah Asuh Malang (YA3).
- Gemiharto, I., & Juningsih, E. R. (2021). "Komunikasi Pemerintahan Dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Tunai di Kabupaten Bandung". *Jurnal Manajemen Komunikasi*, volume 6(Nomor 1), 122.
- Hadari Nawawi. (1998). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Gajah Mada University Press.
- Haitao, N., & Ali, H. (2022). THE ROLE OF BANKING AND GOVERNMENT POLICY ON THE ECONOMIC SECTOR DURING THE COVID-19 PANDEMIC. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 3(2), 161–169.
- Hardjana, A. (2000). *Audit Komunikasi; Teori dan Praktek*. Grasindo.
- Hasibuan, M. S. P. (2007). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, edisi revisi. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Haryanto. (2017). *Elit, Massa, dan Kekuasaan: Suatu Bahasan Pengantar*. PolGov.
- Hasab-Elnaby, A.-H. M. (1988). "Power Structure and Social Participation in Community Action: A Case Study" [Dissertation Doctor of Philosophy]. Iowa State University.
- Hasan, E. (n.d.). *Modul 1 Paradigma Komunikasi Pemerintahan*. <https://Pustaka.Ut.Ac.Id/Lib/Wp-Content/Uploads/Pdfmk/IPEM4319-M1.Pdf>.

- Hefni, H. (2015). *Komunikasi Islam*. Prenada Media Group.
- Herdiana, D. (2018). Sosialisasi Kebijakan Publik: Pengertian dan Konsep Dasar. *Jurnal Ilmiah Wawasan Insan Akademik*, 1(3), 13-26.
- Holloway, G. (1991). "Access to Power: The Organisational Structure of The Wilderness Conservation and Anti-Nuclear Movements In Australia" [Dissertation Doctor of Philosophy]. University of Tasmania.
- Hupe, P., & Hill, M. (2021). Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance. *Implementing Public Policy*.
- Integra Indonesia. (2021). *Aplikasi E-Government Developer Aplikasi Pemerintahan*. <https://www.integraindonesia.co.id/e-government/>.
- Islamy, I. (1984) Prinsip-Prinsip Perumusan kebijaksanaan negara. Jakarta: Bumi Aksara.
- Jalaluddin Rakhmat. (2005). *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Remaja Rosdakarya.
- Jia, R., Roland, G., & Xie, Y. (2021). "A Theory of Power Structure and Institutional Compatibility: China vs. Europe Revisited" (No. 28403; JEL N40, O17, P48).
- Kartono, K. 2008. Pemimpin dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal itu?. Edisi Pertama. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khaeriyah, K., Rahman, A. A., Amirullah, I., Gentanegara, I., & Natsir, N. (2023). THE EFFECT OF SOCIAL MEDIA ON COMMUNITY SOCIAL CHANGE. *Brilliant International Journal Of Management And Tourism*, 3(1), 1-11.
- Kholil, S. (2006). *Metode Penelitian Komunikasi*. Citapustaka Media Group.
- Kholil, S. (2015). *Komunikasi Islam*. Citapustaka Media.
- Kholil, S., & Dalimunthe, M. A. (2015). *Isu-Isu Komunikasi Kontemporer*. Perdana Publishing.
- KKBI versi online. (n.d.). *Panasea*. <https://kbbi.web.id/>.
- Kompas.com/Skola. (2022). *Konteks Komunikasi: Pengertian dan Jenisnya*. Kompas.Com.
- Kustadi Suhandang. (2007). *Kustadi Suhandang, Manajemen Pers Dakwah: dari Perencanaan hingga Pengawasan*. Marja.

- LAN RI. (2021). *Penerapan Strategi Komunikasi Kebijakan yang Baik Memegang Peran Kunci Bagi Efektivitas Implementasi Kebijakan*. <https://lan.go.id/?P=6827>.
- Lektur.id. (n.d.). *Arti Irreversible*. <https://lektur.id/>.
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Liliweri, A. (1991). *Komunikasi Antar Pribadi*. -.
- Liliweri, A. (2010). *Komunikasi serba ada serba makna*. Kencana.
- Litwin GH, Stringer RA Jr. (1968). *Motivation and organizational climate*. Boston: Harvard University Press.
- Luzar, L. C., & Monica. (2014). "Penerapan Cultural Studies dan Aliran Filsafat Dalam Desain Komunikasi Visual." *Jurnal Humaniora*, Vol. 5(No. 2), 1296.
- Naisbitt, Mareth, Jr., (2004). *Communication in Definition of Concept*. Published by John Wiley and Sons, New York.
- Nuhui, Muspida, (2005). *Penerapan Komunikasi dan Bentuk-bentuk Komunikasi Efektif*. Penerbit Dian Sarana, Surabaya.
- Mahaputra, M. R., & Saputra, F. (2022). Determination of Public Purchasing Power and Brand Image of Cooking Oil Scarcity and Price Increases of Essential Commodities. *International Journal of Advanced Multidisciplinary*, 1(1), 36–46.
- Morissan. (2015). *Teori Komunikasi*. Kencana.
- Mubasyaroh. (2016). "Dakwah dan Komunikasi (Studi Penggunaan Media Massa dalam Dakwah)". *AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, Vol. 4(No. 1), 107.
- Muhawarman, Ayuningtyas, D., & Misnaniarti. (2017). "Formulasi Kebijakan Komunikasi Untuk Pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan". *JURNAL MKMI*, Vol. 13(N. 2).
- Mukarom, Z. (2020). *Teori-Teori Komunikasi*. Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Mulyana, D. (2005). *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Remaja Rosdakarya.
- Mutiasari, M., Yamin, M. N., & Alam, S. (2016). *Implementasi Kebijakan Perizinan Dan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat Pada Kepolisian*

- Resort (Polres) Kota Kendari. *Publica. Jurnal Administrasi Pembangunan dan Kebijakan Publik*, 7(1), 1-10.
- Neuman, W. (2014) *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson, Essex, UK.
- Noname. (2020). *6 Prinsip Komunikasi Islam: Ayat-Ayat Komunikasi*. <https://www.komunikasipraktis.com/>.
- Noname. (n.d.). *Napoleon Bonaparte*. <https://www.merdeka.com/>.
- Nugraha, J. T. (2020, October 26). *Kebijakan Publik dan Komunikasi*. <https://news.detik.com/kolom/d-5229357/>.
- Pace, R. W., & Faules, D. F. (2005). *Komunikasi Organisasi. Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan*. Alih bahasa: Deddy Mulyana. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Poerwadarminta, W. J. S. (1986). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (3rd ed.). Balai Pustaka.
- Pratamawaty, dkk. (2019). Policy Communication Strategy of Restaurant Tax to Increase. *IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science* 248 (2019) 012068.
- Purnomo, A. (2018). Pelaksanaan Kebijakan Komunikasi Organisasi Pemerintahan di Indonesia. *Jurnal Noken*, Vo. 3(No. 2).
- Pustovitovskij, A. (n.d.). "Reconceptualising Structural Power: A New Concept Made Out of Streling Parts." *E-International Relations*.
- Raco. (2010). *Metode penelltlan kualltatlf jenis, karakteristik, dan keunggulannya*. Jakarta: Gramedia.
- Rangkuti, ZA, & Rangkuti, MR (2021). Komunikasi Kebijakan Publik dalam Implementasi Program e-Parking di Kota Medan. *Jurnal Komunikasi Kalijaga*, 3(2), 141–151.
- Rakhmat, J. (2008). *Psikologi Komunikasi* (Cet. XXVI). Remaja Rosdakarya.
- Reardon Berlo, SA, S.J. (1987). *Interpersonal Communication, Relating to Others*, Allyn and Bacon. Boston.
- Ritonga, H. J. (2021). *Pengantar Filsafat Ilmu Komunikasi Islam*. Perdana Publisher.
- Rizal. Fahrul. (2012). Penerapan Teori Difusi Inovasi dalam Perubahan Sosial Budaya. *Hikmah*, 6(1), 129-140.

- Rogers, E., M. (2003). *Diffusion of Innovations*. Newyork City, NY: The Free Press.
- Rogers, E., M. (2009). *Diffusion of Innovations*. NY. Routledge
- Roger M & Shoemaker F. Floyd. (1971). *Communication of Innovation*. New York: The Free Press A Division of Macmillan Publishing Co. Inc.
- Rosmawaty H. P. (2010). *Mengenal Ilmu Komunikasi*. Penerbit Widya Padjadjaran.
- Rossy, Harold, 2008, *Theories Of Human Communication*, Fifth Edition, Wadsworth Publishing Company, California.
- Rubino. (2019). “Konseptualisasi Mekanistik Dalam Perspektif Komunikasi.” *Jurnal HIKMAH, Volume 13*(Nomor 1).
- Safira, M. E. (2018). Pembuatan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dalam sistem pembuatan perundangan-undangan menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 perspektif Fiqh Siyasa Dusturiyah (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya).
- Saputra, F., Khaira, N., & Saputra, R. (2023). Pengaruh User Interface dan Variasi Produk terhadap Minat Beli Konsumen (Studi Literature). *Jurnal Komunikasi Dan Ilmu Sosial (JKIS)*, 1(1), 18–25.
- Sazali, H. (2021). Komunikasi kebijakan publik dalam penanggulangan inses di kecamatan tanjung tiram. *inovasi: Jurnal Politik dan Kebijakan Vol. 18 No. 1, Mei 2021: 79 – 87*.
- SadamLa Ana. (2016). “Kebijakan Komunikasi.” https://www.kompasiana.com/sadam_laana/584506b624afbdd90620a464/kebiakan-komunikasi.
- Setiawan, A. B. (2017). “Kebijakan Teknologi Informasi dan Komunikasi Untuk Mendorong Pembentukan Model Bisnis Masa Depan.” *Jurnal Pekommas, Vol. 2*(No. 2), 193–204.
- Setiawan, E. (2023). *Domain*. <https://kbbi.web.id/domain>.
- Siswanto, B. D. L., & Abraham, F. Z. (2016). Peran Humas Pemerintahan sebagai Fasilitator Komunikasi pada Biro Humas Pemprov Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Komunikasi*, 19(1), 55–64.

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Suharto, E. (2008). *Analisis Kebijakan Publik, Panduan Praktis Mengakaji Masalah dan Kebijakan Sosial*. Alfabeta.
- Sunggono, B. (1994). *Hukum dan kebijaksanaan publik*. Sinar Grafika.
- Sutanto, V. W., & Alatas, dan S. (2015). “Menyoal Regulasi Penyiaran Digital (Studi terhadap Kepentingan Publik dalam Regulasi Televisi Digital di Indonesia).” *Avant Garde Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 3*(Nomor 2).
- Syukurdi. (2015). Filsafat Ilmu Komunikasi Islam. *Analytica Islamica, Vol. 4*(No. 2), 276–295.
- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*. Lukman Offset dan YPAPI.
- Tudjuka, N. S. (2018). “Makna Denotasi dan Konotasi Pada Ungkapan Tradisional Dalam Konteks Pernikahan Adat Suku Pamona.” *Jurnal Bahasa Dan Sastra, Volume 3*(Nomor 2).
- Ugboajah, F. (1980). *Communication policies in Nigeria*. Unesco Press.
- Van Dijk, T. A. (n.d.). *Power and the News Media*. University of Amsterdam.
- Wahab, S. A. (1997). *Evaluasi Kebijakan Publik, Konsep, Tipologi Penelitian dan Strategi Pemanfaataannya*. FIA Universitas Brawijaya.
- Wahyudi. (2017). *Manajemen Konflik dan Stres dalam Organisasi Pedoman Praktis bagi Pemimpin Visioner* (H. Akdon Ed.). Bandung: Alfabeta.
- Widjaya, A. W. (1986). *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Bina Aksara.
- Wikipedia. (2023). *Analisis*. <https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Analisis>.
- Wok, S., Ismail, N., & Hussain, Mohd. Y. (2004). *Teori-Teori Komunikasi*. PTS Publications & Distributors SDN BHD.
- Yanti, H. A. (2010). Pengaturan Rahasia Negara, Sebuah Kebijakan Komunikasi dari Perspektif Hubungan Negara dengan Industri Media Massa (Studi di Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Kajian, Vol.15*(No. 4), 633–662.
- Zahara, E. (2018). Peranan komunikasi organisasi bagi pimpinan organisasi. *Jurnal Warta*
- Zakaria, Z. A. (2016). *Tafsir Inspirasi: Inspirasi dari Kitab Suci Al-Qur`an* (Cet. V). Duta Azhar

TENTANG PENULIS



Dr. H. Ahmad Sampurna, S.Sos.I., MA., lahir di Marbau Selatan pada tanggal 21 September 1982. Beliau merupakan seorang pria yang berdedikasi tinggi dalam bidang pendidikan dan memiliki latar belakang keagamaan yang kuat. Saat ini, Ahmad Sampurna menjabat sebagai Kepala Laboratorium di Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK)

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Pendidikan formal Dr. H. Ahmad Sampurna dimulai dari SD Negeri 112315 di Marbau Selatan yang diselesaikannya pada tahun 1994. Selanjutnya, beliau melanjutkan pendidikan ke MTs Al-Wasliyah dan MAS Al-Wasliyah di Marbau, lulus masing-masing pada tahun 1997 dan 2000. Pendidikan tinggi beliau ditempuh di IAIN Sumatera Utara, Medan, dengan gelar Sarjana (S1) di Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) pada tahun 2004, Magister (S2) Komunikasi Islam (KOMI) pada tahun 2007, dan program Doktorat (S3) Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) di Tahun 2024 ini.

Beliau memulai kariernya sebagai Asisten Ahli/Dosen di UIN Sumut pada tanggal 9 Mei 2011, sebelum akhirnya diangkat menjadi Lektor pada 1 Oktober 2012. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Kepala Bidang Pendidikan Menengah dan Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial di Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara (Pemkab Labura) pada tahun 2015, serta Sekretaris Dinas Sosial dan Kepala Dinas Sosial Labura pada periode 2016 hingga 2017.

Pengalaman organisasi penulis juga sangat beragam. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua Umum BKPRMI Labura dari tahun 2000 hingga 2004, Wakil Direktur LPPTKA BKPRMI Sumut dari tahun 2004 hingga 2008, serta Kaur Diklat Resimen Mahasiswa UIN Sumut pada tahun 2002 hingga 2003. Di samping itu, beliau juga aktif sebagai Ketua Umum ICMI Labura pada tahun 2004 hingga 2007, Wakil Ketua Pemuda Islam Sumut dari tahun 2002 hingga 2007, Ketua Pimpinan Daerah Al Wasliyah Labura dari tahun 2016 hingga 2020, Kader PD-PKPNU Sumut sejak tahun 2022, Sekretaris Al Khairat Sumatera Utara hingga sekarang.

Dalam keluarga, Dr. H. Ahmad Sampurna menikah dengan Juliana Pratiwi. Beliau dikaruniai lima orang anak, yaitu Nailah Faizah S. Rambe, Faiz Arkan S. Rambe, Nazihah Ulya S. Rambe, serta dua anak kembar, Akram Khairy Hanif S. Rambe dan Ikram Khairy Hanif S. Rambe. Beliau saat ini berdomisili di Medan.

Sebagai penulis, beliau aktif menulis jurnal antara lain: Komunikasi persuasive pimpinan dalam membentuk karakter santri di pondok pesantren azhar center kecamatan kualuh selatan kabupaten labuhan batu utara (2024), Communication policy in realizing a great north labuhan batu through the “regency of ngantor” program in the village with an Islamic communication perspective (2024), Karakteristik pesan dalam komunikasi politik (2024), Komunikasi politik sebagai bidang studi baru (2024), Analysis forms of political communication in campaign strategies to increase voter participation in the 2024 sumut regional elections (2024), Strategi dakwah komunitas sahabat remaja salihah dalam menjaga kehormatan wanita generasi Z di kecamatan medan marelan (2024), Manajemen badan amil zakat nasional sumatera utara dalam meningkatkan kesejahteraan social mustahik (2024), Membangun kesehatan mental generasi alpha: urgensi konseling dalam mengatasi tantangan bullying di era social media melalui komunikasi empati (2024), Manajemen kegiatan keagamaan generasi remaja (genre) dalam pencegahan stunting di kota binjai (2024), Media baru : tren berita provokatif ditinjau dari etika komunikasi (2024), Application of new website technology and social media

on conventional media radio stations Indonesia (2024). Podcast spotify sebagai sarana broadcasting untuk mengembangkan kreativitas Mahasiswa dalam upaya komunikasi (2024), Peran podcast sebagai implikasi media di era 5.0 dalam penyiaran modern dengan menggunakan teori kebutuhan (2024), Pengembangan Dakwah kontemporer melalui media penyiaran radio (2024), Peran dan fungsi manajemen Tiktok dalam pengolahan media social di era digital bagi generasi Z (2024), Eksistensi radio dalam program podcast di era digital konten (2024), Dampak integrasi platform streaming online dalam transformasi broadcasting kontemporer (2024), Peran dan fungsi kemampuan manajemen dalam pengelolaan media soal di era digital (2024), Pengembangan model manajemen kompetensi SDM UMKM untuk mengelola Media social Instagram secara optimal (2024), perilaku birokrasi pemerintahan dalam pelayanan pada badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Utara (2023), Supervision Management of goods and Services Procurement bureu regional secretariat of north Sumatra Province (2023), political communication strategies of Muhammadiyah: case on medan city Mayoral Election in 2020 (2023), Implementation of qaulan layyina communication principles in implementing bureaucracy in the Provincial Government of North Sumatra (2023). Karya lainnya dapat diakses di google scholar https://scholar.google.com/citations?hl=id&user=MIsAVq8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Dengan berbagai pengalaman dan dedikasi di bidang pendidikan serta organisasi, Dr. H. Ahmad Sampurna terus berupaya untuk memberikan kontribusi terbaik bagi pengembangan masyarakat dan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Dedikasi dan komitmen beliau menjadi inspirasi bagi banyak orang, khususnya di lingkungan akademis dan komunitas keagamaan serta tatanan jaringan birokrasi.

TENTANG EDITOR



Anang Anas Azhar, lahir di Desa Tebing Linggahara, Kecamatan Bilah Hulu, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara tanggal 04 Oktober 1973. Menamatkan Sekolah Dasar, MTsN, dan MAN di Rantau Prapat (tahun 1982-1993). Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana tahun 1993 pada Program Studi Penyiaran Penerangan Agama Islam (PPAI) sekarang menjadi Komunikasi Dan Penyiaran Islam (KPI), Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UIN Sumatera Utara Medan. Gelar sarjana, magister dan doktor ia raih di almaternya sendiri. Ia pernah berprofesi sebagai wartawan hingga memperoleh sertifikat Uji Kompetensi Utama (UKW) Utama dari Dewan Pers Tahun 2014, bernomor; 6347-PWI/WU/DP/VIII/2014/04/10/74 dan anggota PWI bernomor ; 02.0013072.07 ini.

Suami Evi Sakdiah ini, dianugerahi empat orang anak yakni M Choirur Rais Alvizar (23), M Hafiz Alvizar (20), M Tahfif Alvizar (18) dan M Fikri Rizki Alvizar (14). Ia pernah aktif sebagai politisi sebelum dosen tetap PNS di UIN Sumatera Utara Medan. Kini, penulis fokus mencurahkan pikirannya di dunia akademik, mata kuliah yang diampu lebih banyak mengasuh mata kuliah rumpun komunikasi politik, rumpun keilmuan jurnalistik, media digital dan lainnya. Ia mengaktifkan diri sebagai pengajar/promotor/penguji disertasi di S3 KPI FDK UIN Sumatera Utara di samping tugas pokoknya sebagai dosen S1 pada Program Studi Ilmu Komunikasi FIS UIN Sumatera Utara, penulis juga mengajar di

Pascasarjana Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Selama aktif di dunia akademik, ia pernah diamanahkan menjadi Ketua Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi Ilmu Komunikasi FIS UINSU tahun 2016, Staf Ahli Rektor UINSU bidang Komunikasi 2017-2020. Sekretaris Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) S2 di FDK UINSU 2020-2021. Kini penulis menjabat sebagai Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama di FDK UINSU Medan periode 2023-2027.

Anak pasangan Saibon AS (*alm*) dan Jamilah SM (*almh*) ini, mengaktifkan diri sebagai aktivis. Tercatat penulis merupakan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) di Sumatera Utara, Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara periode 2006-2010, Ketua Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah periode 2010-2014. Penulis juga pernah menjabat sebagai Ketua Lembaga Pengembangan Cabang Ranting dan Pembinaan Masjid (LPCRPM) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Sumatera Utara, dan Wakil Ketua PW. Forum Keluarga Alumni (FOKAL) IMM Sumatera Utara hingga sekarang.

Karya Editor selama menjadi dosen, banyak dihasilkan melalui penelitian, buku dan tulisan ilmiah dalam bentuk opini. Karya di bidang penelitian, penulis pernah melakukan penelitian berjudul “*Pencitraan Politik Partai Amanat Nasional (PAN) Dalam Menarik Simpati Masyarakat Di Propinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2015*”. “*Pengaruh Membaca Berita Kriminal Di Surat Kabar Harian Medan Terhadap Kondisi Psikologis Mahasiswa IAIN Sumatera Utara*”. “[Kecenderungan Peminatan Mahasiswa Program Studi Komunikasi Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara \(UINSU\) Medan Tahun 2010-2016](#)”. Karya lain dalam bentuk penelitian dapat diakses melalui <https://scholar.google.co.id/citations?user=9zCjKx4AAAAJ&hl=en>.

Karya buku yang dipublis di antaranya berjudul, *Komunikasi Politik Untuk Pencitraan (Konsep, Strategi dan Pencitraan Politik)*, Perdana Publishing Medan (2017), *Pencitraan Politik Elektoral (Kajian Politik*

Segitiga PAN Dalam Merebut Simpati Masyarakat), Atab Buku, Yogyakarta (2017), *The Black Magic' of National Mandate Party/Partai Amanat Nasional Gaining The Real Vote*. Lambert Academi Publishing (2018), *Politisi Teladan (Biografi H Abdul Wahab Dalimunthe)* Penerbit Medan Kreasi (2023), *Komunikasi Islam (Kajian Konsep dan Implementasi Politik Islam)* Penerbit Medan Kreasi (2024), *Komunikasi Politik Kontemporer* Penerbit Pusdikra Medan, (2024), pernah menjadi kontributor dalam penulisan buku, *Dakwah Kerukunan Dan Kebangsaan*, Prenada Media Group (2019), *Menuju World Class University (Khair Al Jami'ah)*, CV Manhaji–UIN Press Medan (2018).

Aktif sebagai kolumnis di sejumlah media massa nasional dan lokal, seperti *Harian Umum Nasional Waspada* yang terbit di Medan dan beberapa media online lainnya. Tulisan artikel yang sudah dipublikasi mencapai 421 tulisan dalam bentuk opini/artikel terfokus pada kajian komunikasi politik kontemporer. Menjadi penulis aktif di sejumlah jurnal ilmiah, baik jurnal internasional bereputasi (Scopus) maupun jurnal yang terakreditasi Sinta 5 sampai Sinta 2. Selain itu, aktif juga sebagai pengamat komunikasi politik sebagai nara sumber di sejumlah media massa. Menjadi nara sumber aktif dalam forum kepemiluan dan diskusi publik terkhusus pada *Focus Group Discussion (FGD)* sejak 2013 hingga sekarang pada penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara. Informasi lebih lanjut tentang penulis dapat mengakses www.ananganasazhar.com atau melalui email : ananganas@uinsu.ac.id



Mujhirul Iman, M.Pd., lahir pada 14 Juni 1986 di Medan, Beliau aktif dalam bidang pendidikan dan sosial keagamaan. Beliau tercatat sebagai PNS di Kementerian Agama, di mana beliau telah memulai pengabdian sejak tahun 2014. Saat ini, beliau juga tercatat sebagai Dosen di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU). Sebelumnya, beliau juga pernah mengabdikan sebagai dosen di Universitas Medan Area (UMA) dari

tahun 2021 hingga 2023. Dalam bidang akademis, beliau sedang menyelesaikan studi Doktoralnya di Program Studi Manajemen Pendidikan Islam UIN Sumatera Utara, setelah berhasil memperoleh gelar Magister dari Pasca Sarjana UINSU pada tahun 2018 dan gelar sarjana dari IAIN SU pada tahun 2009. Pendidikan formalnya dimulai dari MIN Tanjung Harapan dan berlanjut hingga menamatkan pendidikan di MAN 2 Medan pada tahun 2004.

Di samping karir akademisnya, beliau aktif dalam berbagai kegiatan pendidikan, sosial dan keagamaan. Ia pernah menjadi Fasilitator Daerah (FASDA) Pembelajaran USAID Prioritas Kabupaten Serdang 2015-2017, beliau juga aktif dalam aktivitas Literasi yang tergabung dalam Forum Masyarakat Literasi Indonesia (Formalindo) Kabupaten Serdang Bedagai 2018-2022. Selain itu, Ia menjabat sebagai Bendahara LPCRPM PWM Sumut sejak tahun 2023 dan memiliki peran penting sebagai Wakil Sekretaris Umum BKPRMI Sumut sejak tahun 2022. Selain itu, beliau juga berperan sebagai Wakil Bendahara Asosiasi Yayasan Pendidikan Islam Kota Medan sejak tahun 2020 dan Wakil Bendahara FOKAL IMM Sumut sejak tahun 2024.

Sebagai penulis, Mujhirul Iman telah menerbitkan beberapa buku yang berfokus pada masalah Pendidikan dan Sosial, termasuk Buku berjudul “Mereduksi Traumatik: Sebuah Pendekatan dalam Mengurangi Trauma Bullying” Penerbit Literasi Nusantara (2024) “Diagnosis Kesulitan Belajar” Penerbit Literasi Nusantara (2024) dan Membangun Pendidikan Berkualitas: Analisis dan Inovasi Kebijakan Penerbit Literasi Nusantara (2024), Manajemen Risiko: Berbasis Teori dan Praktik Penerbit Pusdikra Medan (2024). Beliau juga aktif menuliskan beberapa Jurnal : “The Role of Inclusive Education : Analysis of Effectiveness and Problems”, “Penerapan Sistem Manajemen Pendidikan Berbasis Total Quality Management (TQM) Di Lembaga Pendidikan”, Implementasi Pendidikan Islam Multikultural Di Madrasah Aliyah Negeri Dolok Masihul Serdang Bedagai”, “Metode Pengembangan Manajemen Pendidikan di SMP IT Bina Insan Batang Kuis”, “Implementasi Riset Aksi Sebagai Desain Penelitian pada Masyarakat dan

Ilmu Ekonomi”, “The Significance of career Development for women in the contemporary Era”, “Strategi Peningkatan Mutu Universitas : Studi Kasus pada Universitas Dharmawangsa “, “The Role of Leadership in Building an Effective Communication Culture at Al Hijrah IT Middle School 2” dan beberapa jurnal lainnya. Karya lain yang bisa diakses di google scholar <https://scholar.google.com/citations?user=jbgPLw8AAAAJ&hl=id>. Ini menunjukkan dedikasinya dalam mengatasi isu-isu pendidikan dan sosial yang penting.

Beliau menikah dengan Khairina Sari, S.Pd.I dan dianugerahi Empat orang anak: Mahib Khairil Jaza, Muhammad Khairil Mushlih, dan Huwaina Khairah Muthi’ah, serta Hilya Khairah Jauza. Mujhirul Iman dan keluarganya saat ini tinggal di Kota Medan.

KOMUNIKASI BIROKRASI

Telaah dan Riset Kebijakan Publik

Buku ini merupakan panduan komprehensif yang mengupas tuntas tentang komunikasi birokrasi dan kebijakan publik, dimulai dengan pengantar komunikasi birokrasi yang memberi dasar pemahaman terhadap kompleksitas interaksi dalam lingkup administrasi publik. Melalui bagian pertama, pembaca diperkenalkan pada esensi dan pentingnya komunikasi yang efektif dalam birokrasi sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efisien dan transparan.

Bagian-bagian selanjutnya secara mendalam membahas dasar-dasar kebijakan komunikasi, mulai dari definisi, tujuan, hingga proses kebijakan komunikasi. Pembaca diajak untuk memahami bagaimana kebijakan komunikasi disusun dan diimplementasikan, serta prinsip-prinsip dan komponen kunci yang harus diperhatikan. Buku ini juga tidak luput membahas tantangan dan hambatan yang kerap dihadapi dalam implementasi kebijakan komunikasi, serta bagaimana komunikasi Islam memberikan perspektif etis dan prinsip-prinsip yang relevan dalam praktik komunikasi birokrasi.

Selain itu, buku ini mengeksplorasi hubungan antara inovasi kebijakan publik dan komunikasi organisasi, dengan membahas berbagai model keputusan inovasi, upaya meminimalisir disonansi, dan gaya kepemimpinan dalam komunikasi organisasi. Bagian akhir dari buku ini menyajikan telaah mendalam terhadap komunikasi kebijakan publik, termasuk faktor-faktor pendukung dan penghambatnya, serta model komunikasi birokrasi yang ideal. Keseluruhan pembahasan diakhiri dengan konklusi yang merangkum kajian komunikasi birokrasi, menawarkan pembaca wawasan strategis dan praktis dalam mengelola komunikasi di lingkungan birokrasi.

